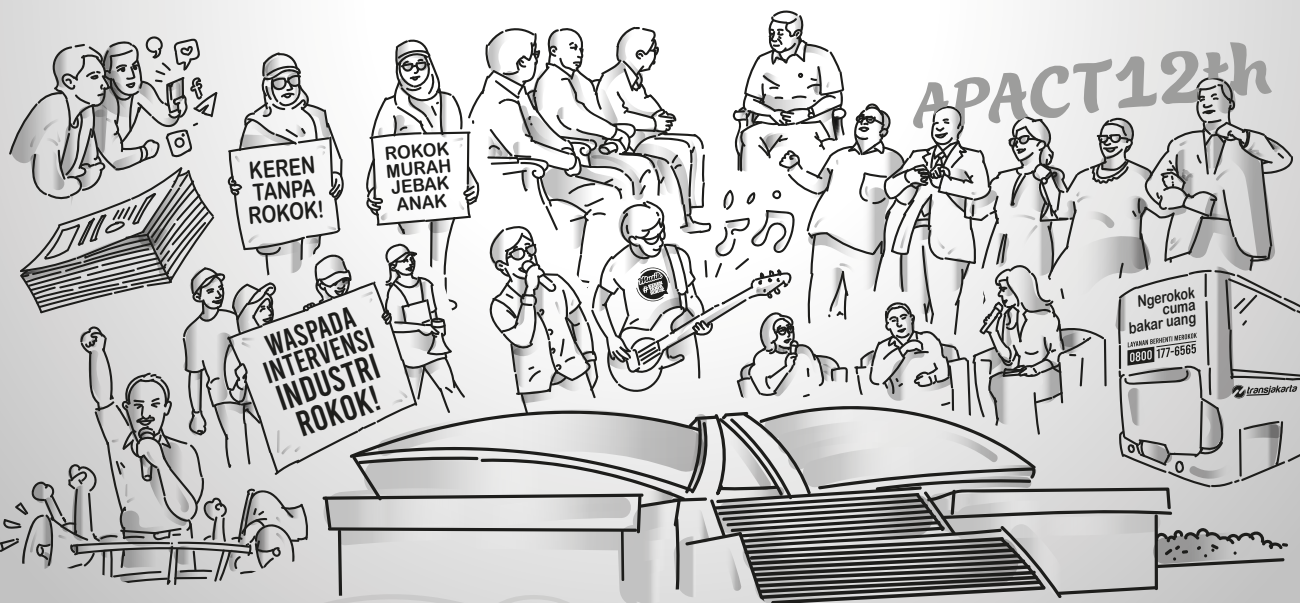




25 TAHUN KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU

MENJARING IKAN *dengan* JALA BERLUBANG



Andi Nafsiah Walinono Mboi | Dian Rahmawati | Emil Salim | Farid Afansa Moeloek | Fuad Baradja | Hasbullah Thabrany | Hasna Pradityas | Itsnaeni Abbas | Kiki Soewarso | Laksmana Yudha Saputra | Laksmiati A. Hanafiah | Lily Sulistyowati | Mardiyah Chamim | Merdias Almatier | Nina Samidi | Nina Windu Kirana | Nurul Nadia Luntungan | Putri Arfah | Prijo Sidipratomo | Rasis A. Panigoro | Ratu Siti Sapura | Soewarta Kosen | Tari Menayang | Taufik Hidayat | Tubagus Haryo | Tulus Abadi | Widyastuti Soerojo | Zaenal Arifin

2023

MENJARING IKAN *dengan* JALA BERLUBANG

Andi Nafsiah Walinono Mboi, Dian Rahmawati, Emil Salim, Farid Afansa Moeloek, Fuad Baradja, Hasbullah Thabrany, Hasna Pradityas, Itsnaeni Abbas, Kiki Soewarso, Laksmana Yudha Saputra, Laksmiati A. Hanafiah, Lily Sulistyowati, Mardiyah Chamim, Merdias Almatsier, Nina Samidi, Nina Windu Kirana, Nurul Nadia Luntungan, Putri Arfah, Prijo Sidipratomo, Raisis A. Panigoro, Ratu Siti Sapura, Soewarta Kosen, Tari Menayang, Taufik Hidayat, Tubagus Haryo, Tulus Abadi, Widyastuti Soerojo, Zaenal Arifin

**Komite Nasional Pengendalian Tembakau
2023**

Menjaring Ikan dengan Jala Berlubang

125, vi hlm.; 17,5 x 25 cm

ISBN: 978-623-09-6215-8

Rancangan Sampul & Tata letak:

Cahyono Budi Dharmawan

Penulis:

Andi Nafsiah Walinono Mboi, Dian Rahmawati, Emil Salim, Farid Afansa Moeloek, Fuad Baradja, Hasbullah Thabrany, Hasna Pradityas, Itsnaeni Abbas, Kiki Soewarso, Laksmana Yudha Saputra, Laksmiati A. Hanafiah, Lily Sulistyowati, Mardiyah Chamim, Merdias Almatsier, Nina Samidi, Nina Windu Kirana, Nurul Nadia Luntungan, Putri Arfah, Prijo Sidipratomo, Raisis A. Panigoro, Ratu Siti Sapura, Soewarta Kosen, Tari Menayang, Taufik Hidayat, Tubagus Haryo, Tulus Abadi, Widyastuti Soerojo, Zaenal Arifin

Penulis Pendukung:

R.A. Dania R. Nariswanti

Penyunting:

Nina Samidi

Penanggung Jawab Produksi:

Eka Saptiningrum

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama, September 2023

Diterbitkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau

Gedung PB IDI Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 29, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350 Indonesia

Telp. +62 21 391-7354

Email: sekretariat@komnaspt.or.id

Website: <https://komnaspt.or.id/>





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Sekapur Sirih	
"Membangun Manusia Sehat Sejahtera" oleh: Emil Salim	v
Kisah Sang Pencetus	
"Jalan Kita Masih Panjang" oleh: Laksmiati A. Hanafiah	1
Kisah Para Ketua	
"Apa yang tidak dibicarakan saat mereka membicarakan rokok" oleh: dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K)	6
"Jalan Terus Komnas PT!" oleh: Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG	11
"Bangsa Budak Akibat Rokok" oleh: Dr. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K), M.H	15
"Perjuangan Kita Sudah Berkembang, Tapi Jalan Kita Masih Panjang" oleh: dr. Andi Nafsiah Walinono Mboi, Sp.A., M.P.H.	20
"Generasi Emas atau Generasi Cemas" oleh: Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH	25
Kisah Para Pejuang	
"Harapan Kami pun Sama" oleh: Dian Rahma dan Putri Arfah NS	32
"Mengalir Mengikuti Takdir" oleh: Fuad Baradja	36
"Tahan Banting dan Tidak Baper Melawan Industri Rokok" oleh: Hasna Pradityas	40
"Dua Dekade Aktivisme dan Refleksinya" oleh: Itsnaeni Abbas	47
"Menjadi Petugas Kementerian, Mengawal Bola Sarat Kepentingan" oleh: Lily Sulistyowati	53
" <i>Giant Pack of Lies</i> : Praktik Menyesatkan Industri Tembakau" oleh: Mardiyah Chamim	59
"Membangun Kampanye Pengendalian Tembakau dari Serpihan" oleh: Nina Samidi	64
"Cerita Diplomasi dari Bali" oleh: Nurul Nadia Luntungan	69
"Catatan Awal Sang Sekretaris" oleh: Ratu Siti Sapura	74
"Advokasi: Antara Klaim dan Kenyataan" oleh: Soewarta Kosen	78
"Menaklukkan Batu Pijakan Pertama" oleh: Tari S. Menayang	83
"Upin Ipin Story" oleh: Taufik Hidayat (Bob) dan Laksmana Yudha Saputra	88

“Semua adalah (Pertarungan) Politik” oleh: Tubagus Haryo Karbiyanto	93
"Dari Advokasi ke Regenerasi: Melawan dengan Ofensif" oleh: Tulus Abadi	98
“Jatuh Bangun Meretas Perlindungan Hukum bagi Perokok” oleh: Widyastuti Soerojo	103
“Bukan Sembarang Kurir” oleh: Zaenal Arifin	111
Penghormatan	
Kartono Mohamad, “Yang Terhormat, dr. Kartono Mohamad” oleh: Nina Windu Kirana, Widyastuti Soerojo, Kiki Soewarso, Itsnaeni Abbas	116
Arifin Panigoro, “Perjuangan Penuh Kenangan” oleh: Rasis Arifin Panigoro	122

— *Kata Pengantar* —

MENJARING IKAN DENGAN JALA BERLUBANG

“**M**enjaring ikan dengan jala berlubang.” Kira-kira metafora inilah yang kami rasakan dan alami selama mengawal isu pengendalian tembakau. Keinginan dan harapan bisa menjaring ikan-ikan kebijakan yang bernutrisi tinggi untuk diberikan kepada masyarakat agar hidup mereka lebih sehat dan sejahtera bermodal jala yang penuh lubang, kami akui cukup menantang dan melelahkan.

Jala yang kami miliki punya banyak lubang, mulai dari lubang-lubang kecil seperti gangguan para pendukung industri tembakau yang sering kali mengecohkan gerakan, masyarakat yang sudah termakan mitos-mitos yang selama ini digaungkan industri, sampai keterbatasan kemampuan untuk bisa menyamakan gerakan industri dalam mengampanyekan ‘citra baik’ mereka. Tentu saja, lubang terbesar adalah kekuatan industri rokok yang mampu mengintervensi para pemangku kebijakan, sehingga mereka terpengaruh dan lubang besar lain pun muncul di jala yang kami gunakan: pemangku kebijakan yang tak acuh pada urgensi pengendalian konsumsi produk zat adiktif tembakau.

Namun, apakah lalu kami menyerah dan melempar jala kami ke tengah lautan dan membiarkan masyarakat semakin terancam kehilangan makanan bernutrisi? Tidak. Dengan bantuan banyak pihak, jala berlubang ini tetap bisa digunakan. Teman-teman seperjuangan yang memahami pentingnya pengendalian tembakau menyatukan barisan dan bergerak bersama. Inilah tambalan terbesar jala kami, sehingga ikan-ikan kecil kebijakan satu per satu dapat kami jaring.

Perjalanan menantang dan cukup melelahkan namun selalu melegakan setiap kali tangkapan ikan sedikit demi sedikit terjaring ke jala, menciptakan banyak sekali kisah di baliknya. Bagaimana tim penjala ikan ini harus berjibaku di subuh bahkan dini hari untuk memastikan sebuah kegiatan berjalan lancar, memastikan surat-surat advokasi terkirim dan

diterima sampai benar-benar dibaca di tangan pemangku kepentingan, sampai mengupayakan strategi dan kampanye sekuat mungkin di tengah berbagai keterbatasan. Tentu saja, yang semuanya dilakukan dengan bantuan teman-teman seperjuangan.

Dalam rangka 25 tahun Komnas Pengendalian Tembakau, melalui buku ini, kami, tim kerja harian Komnas Pengendalian Tembakau, mempersembahkan hadiah 25 Kisah di Balik Perjuangan Komnas Pengendalian Tembakau sebagai dokumentasi perjuangan kita bersama demi memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan nutrisi yang penting untuk hidupnya.

Dengan segenap cinta,

Diana Rahima, Dian Rahmawati, Eka Saptiningrum, Laksmana Yudha, Nina Samidi, Putri Arfah, Ratu Sapura, Sarah Muthiah Widad, Tari Menayang, Taufik Hidayat.

Jakarta, 27 Juli 2023

MEMBANGUN MANUSIA SEHAT SEJAHTERA

Ketika bapak-bapak pendiri negara kita menetapkan landasan filsafat negara bangsa kita, maka secara sadar dipilih jalan terjal negara Pancasila dan bukan negara berhaluan biasa. Jalan biasa membangun negara adalah dengan menggunakan rangsangan yang lazim dipakai untuk merangsang peran serta masyarakat seperti rangsangan intensif pajak, cukai dan sumber penerimaan lainnya untuk mencapai tujuan negara tersebut. Sehingga tujuan yang ingin dicapai negara bergandengan erat dengan jumlah dan cara pendapatan jumlah negara yang dapat dihimpun dan segala rangsangan ekonomi yang tersedia dipakai untuk keperluan pembiayaan pembangunan. Dalam kaitan inilah kita selesaikan bahwa landasan tumbuhnya industri rokok didasarkan terutama atas pertimbangan pendapatan negara dari pajak rokok, cukai dan efektifitas mengenakan pungutan pada sektor tembakau dan kegiatan berkaitan lainnya.

Prinsip yang dipakai dalam mobilisasi penerimaan keuangan negara adalah bahwa penerimaan negara menghalalkan segala aktivitas sumber perpajakan. Cita-cita Bapak-bapak pendiri negara Republik Indonesia adalah membangun negara yang dapat mengangkat rakyatnya mencapai tingkat kehidupan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip dasar negara Pancasila. Sehingga cara kita membangun negara tanah air dalam menggali sumber-sumber pendapatan bagi kebutuhan perpajakan dan pengeluaran negara seharusnya didasarkan pada falsafah Pancasila tersebut. Karena itu, maka sumber pendapatan tidak hanya berdasarkan jumlah dan dana yang bisa diraih dari masyarakat pengusaha tetapi di dalam cara pungutan perpajakan berdasarkan diri pada filsafat Pancasila ini, yang berarti bahwa sasaran perpajakan dan biaya pembangunan harus didasarkan pada pencapaian cita-cita Pancasila.

Karena itu, pada kasus rokok, apabila sasaran penerimaan pajak rokok didasarkan pada jumlah perokok dan merangsang pola pungutan industri rokok yang mengandung

rangsangan pengembangannya maka sifat pajak seperti ini tidaklah sehaluan dengan semangat Pancasila. Dalam rangka tercapainya cita-cita Pancasila, masyarakat adil dan makmur serta sehat berkecukupan dalam makanan bergizi dengan perawatan kesehatan yang baik maka usaha-usaha yang justru merusak kesehatan dan memperparah kehidupan sehingga merupakan beban berat bagi masyarakat, terutama akibat berkembangnya industri yang tak sehat seperti rokok, maka jelas sifat pembangunan ini tidaklah sesuai dengan cita-cita Pancasila yang mendambakan masyarakat yang adil, sehat dan sejahtera.

Oleh karena itu maka perjuangan menentang menyebarnya praktek merokok yang merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda perlu dirubah ke arah pola pembangunan yang lebih mengandalkan pada pola pendidikan yang sehat dan kesehatan tanpa terseret arus ketagihan nikotin yang merupakan unsur pokok dari merokok.

Tujuan pembangunan Indonesia tidak hanya menaikan pendapatan materi masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang semakin naik untuk menanggapi tantangan kehidupan materi yang semakin meningkat di masa datang. Kita perlu kembali pada keputusan Bapak-bapak pendiri Republik Indonesia yang telah menetapkan membangun negara dan bangsa tidak hanya di jalan kemakmuran tetapi juga di jalan kesejahteraan manusia dan masyarakat guna mencapai totalitas manusia Indonesia bernafaskan Pancasila.

Atas dasar inilah saya serukan agar seluruh dan semua pemimpin-pemimpin kita dapat kembali pada arah haluan pembangunan semesta Indonesia yang adil, makmur tanpa rokok berdasarkan Pancasila.

Selamat ulang tahun ke - 25 tahun perjalanan Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi perjuangan kita bersama mencapai Indonesia adil, makmur berdasarkan Pancasila tanpa kebiasaan kecanduan merokok.

Jakarta, 8 Mei 2023.

Emil Salim.

Kisah Sang Pencetus



JALAN KITA MASIH PANJANG

Oleh: **Laksmiati A. Hanafiah**

Ketua Harian Komnas Pengendalian Tembakau



Tidak ada yang mudah dalam memulai sesuatu. Berbagai tantangan dan hambatan pasti akan ada di sepanjang jalan. Itu yang saya rasakan sejak awal pembentukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau.

Sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung di Yayasan Jantung Indonesia, saya merasa harus ada yang dilakukan untuk membuat bangsa ini lebih sehat. Kita semua tahu bahwa rokok adalah salah satu pemicu terjadinya berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung, tapi, mengapa tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk menghindari generasi muda—terutama anak-anak—dari bahaya ini? Saat itu saya berpikir: Apa mungkin saya yang harus memulai pergerakan ini?

Maka tahun 1998, pada saat saya masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia, saya kemukakan ide ini kepada Emma Suratman dari Yayasan Kanker Indonesia. Kami bersepakat pada saat itu bahwa sudah tiba waktunya untuk membuat masyarakat lebih paham lagi tentang bahaya rokok pada generasi muda penerus bangsa.

Saya dan Ibu Ema berkeliling ke berbagai organisasi untuk menyampaikan ide ini sambil meminta kesediaan mereka untuk bergabung dalam sebuah komite yang khusus menyoroti soal penanganan tembakau. Bentuk dan rupanya akan seperti apa, kami belum pastikan. Yang penting saat itu adalah untuk menggalang dukungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya, setelah bergerilya selama beberapa waktu, kami mendapatkan dukungan dari 23 organisasi, termasuk Yayasan Kanker Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Setelah koalisi terbentuk, pekerjaan sesungguhnya barulah dimulai. Memang, semua pihak yang terlibat dan mendukung Komnas Pengendalian Tembakau sudah paham benar bahwa industri rokok itu kuat. Mereka punya *power* dan uang, dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia. Namun, yang membuat kami pantang mundur adalah kekhawatiran yang mendalam terhadap anak-anak yang sudah ikut menjadi sasaran kampanye industri rokok. Masalahnya, sekali teradiksi, akan sulit bagi anak-anak untuk berhenti.

Langkah selanjutnya adalah untuk mendatangi para petinggi-petinggi negara. Hampir semua presiden yang memimpin, sejak berdirinya Komnas Pengendalian Tembakau, sudah kami temui. Kebanyakan dari mereka awalnya tidak terlalu paham masalah dan bagaimana bahayanya. Tugas kami lah untuk menyampaikan bahwa kalau kita tidak bertindak sekarang, nantinya akan semakin sulit jalan yang harus ditempuh.

Salah satu advokasi di awal yang berhasil kami wujudkan bersama pemerintah adalah inisiasi pencantuman peringatan merokok di bungkus dan iklan rokok. Advokasi ini

berawal ketika kami melihat di luar negeri hal semacam ini sudah diterapkan, tapi di Indonesia belum ada sama sekali.

Semua kegiatan advokasi yang kami lakukan tampaknya membuat industri rokok mulai sadar bahwa ada yang perlahan mulai “mengusik” industri. Tentu saja mereka tidak tinggal diam. Perlawanan dari pihak industri terlihat semakin kencang dan garang, misalnya, dengan cara memasang iklan-iklan rokok di sekitar sekolah.

Semakin lama, tantangan yang harus dihadapi pasti akan semakin berat. Industri akan selalu punya cara untuk memberikan perlawanan balik dengan cara yang lebih masif—ya, karena mereka punya uang untuk melakukannya.

Hal ini juga yang masih kita perjuangkan, yaitu dukungan dari pemerintah yang bukan sekadar dukungan moral. Sampai detik ini, baru sedikit



Foto: Audiensi Komnas Pengendalian Tembakau dengan Wakil Presiden, Boediono 12 November 2010.



Foto: *Billboard* anak muda keren tanpa rokok di posisi strategis di jalan Sudirman, Jakarta.

sekali—kalau tidak mau dibilang tidak ada-- dukungan dana dari pemerintah untuk kampanye-kampanye Komnas Pengendalian Tembakau.

Beruntung kami mendapatkan dukungan dana dari Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) yang merupakan organisasi nirlaba asal Amerika Serikat yang mendukung pengurangan konsumsi tembakau di berbagai negara. Dengan dana itu, kami bisa maju dan bergerak.

Akan tetapi, kampanye dan gerakan apapun tak akan terasa jelas pengaruhnya tanpa adanya dukungan dari pemerintah lewat perundang-undangan. Hal ini masih terus kita perjuangkan bersama, terutama ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dukungan dari DPR sangat kita butuhkan supaya jangan sampai ada peraturan yang malah mementahkan semua usaha kita. Contohnya, soal rencana Undang-Undang Pertembakauan yang isinya bisa memukul mundur segala advokasi dan edukasi yang kita berikan selama ini.

Benar, jalan kita masih panjang untuk mencapai kondisi ideal seperti yang sudah dicapai oleh beberapa negara lain, tapi saya bangga dan terkesan sekali dengan 23 organisasi yang mendukung dan jalan bersama sejak awal pendirian Komnas Pengendalian Tembakau. Terkadang saya berpikir, mengapa mereka mau, ya, terjun ke dalam urusan pengendalian tembakau? Padahal sudah jelas lawannya berat. Ternyata, jawabannya kembali lagi ke anak-anak: demi melindungi mereka dari segala bahaya rokok, termasuk adiksi dan penyakit yang menyertainya.



Foto: Seruan tokoh tolak Rancangan Undang-Undang Pertembakauan pada tahun 2016.

Kami terus mengharapkan dukungan pemerintah untuk lebih tegas dalam peraturan yang menyangkut industri rokok. Saya paham pemerintah sudah mendapat banyak dukungan dari industri rokok, tapi jika peraturan tidak diperketat, masa depan bangsa Indonesia yang akan jadi taruhannya. Lihat saja sekarang, rokok bebas dijual satuan/ketengan, bebas dijual di mana pun bahkan di warung-warung sekitar sekolah. Padahal sudah jelas bahayanya jika anak terpapar dan kemudian teradiksi rokok.

Dalam rangka ulang tahun Komnas Pengendalian Tembakau yang ke-25, saya berharap usaha kita ini mendapat dukungan yang lebih nyata dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Keduanya sama pentingnya. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peraturan yang lebih ketat, sedangkan dari masyarakat adalah dukungan dalam bentuk penyebaran edukasi mengenai bahaya rokok, sampai ke akar rumput. Intinya satu: jangan sampai anak-anak kita jadi perokok.

Semoga semua kerja keras kita berbuah masa depan yang cemerlang bagi anak-anak Indonesia.

Kisah Para Ketua



APA YANG TIDAK DIBICARAKAN SAAT MEREKA MEMBICARAKAN ROKOK

Oleh: dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K)

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Periode 1998-2003



Yang menghilang bersama asap rokok

Yang kerap kali disebut orang saat menyebut rokok adalah betapa sektor ini menyumbang banyak buat kas negara. Pada masa saya dulu, angka itu pernah mencapai 2,5 triliun rupiah—dari pajak atau cukai rokok. Tapi orang tidak pernah menghitung dan menyinggung berapa banyak yang harus ditanggung APBN untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan rokok: mulai dari penyakit jantung, pernapasan, stroke, hingga kanker—yang boleh jadi angkanya berkali-kali lipat.

Kita juga perlu menghitung berapa banyak produktivitas yang telah dan akan menghilang dari individu-individu yang merokok. Oleh karena kecanduan dan kesehatan yang terus menurun, produktivitas mereka pasti ikut menurun dan boleh jadi mengganggu pembangunan dan ekonomi bangsa. Hal yang lebih parah lagi, rokok juga akan senantiasa mengintip generasi yang akan datang. Anak-anak sekolah yang sejak dini terpapar rokok—akibat gampangya memperoleh rokok secara eceran—yang akhirnya berdampak Olehpada masa depan mereka.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 2020 menyebut kematian akibat rokok di seluruh dunia mencapai sepuluh juta lebih. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus meregulasi sektor ini. Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban memberlakukan aturan-aturan untuk perlindungan tersebut. Toh, dalam Undang Undang Dasar 1945, negara punya kewajiban dalam melindungi masyarakatnya, tumpah darahnya. Pemerintah harus menjaga dan melindungi masyarakat generasi sekarang maupun generasi yang akan datang itu supaya tidak terpapar dengan rokok, dengan terlalu banyak, terlalu lama, dan terlalu tinggi dosisnya, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang produktif.

Ikut ratifikasi untuk memperkuat regulasi

Mengingat begitu berbahayanya rokok, WHO mengeluarkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 2003 sebagai panduan dan kesepakatan negara-negara yang meratifikasi untuk mengendalikan tembakau. Sampai dengan tahun 2004, 168 negara telah meratifikasi konvensi ini.

Meratifikasi kerangka kerja internasional tersebut dapat membantu pemerintah Indonesia untuk memperkuat regulasi. Nantinya, kerangka kerja tersebut bisa ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk pengaturan tembakau. Untuk itu, beberapa kelompok masyarakat sipil telah mengadvokasi agar pemerintah ikut konvensi tersebut di antaranya dengan berdialog dengan tim Badan POM dan Menteri Kesehatan yang hendak ke Jenewa untuk menghadiri sidang-sidang WHO.

Hingga hari ini, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi ini. Hanya ada beberapa negara kecil saja yang belum meratifikasi, seperti Andorra, Dominican Republic, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monaco, Somalia, dan Sudan Selatan. Celakanya, Indonesia adalah salah satu di antaranya.

Jejak advokasi melawan asap rokok

Melawan arus tembakau dan industrinya bukan perkara baru. Pada 1998 saya pertama kali menjabat sebagai ketua Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok



Foto: Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) bersama para binaragawan dan artis nasional tahun 2002.

hingga tahun 2003. Ini adalah salah satu organisasi yang tumbuh untuk menanggulangi persoalan tembakau di antara beberapa organisasi yang lain—misalkan ada Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3) yang didirikan dan mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia yang para anggotanya adalah perorangan dan juga ada Wanita Indonesia Tanpa Tembakau.

Sebelumnya, lewat serangkaian diskusi, di antaranya dengan Ibu Mia Hanafiah dari Yayasan Jantung Indonesia, akhirnya kami bersepakat membuat organisasi payung yang menghimpun organisasi-organisasi yang ada, yang punya kepentingan dalam menangani persoalan rokok. Beberapa individu yang punya pemikiran-pemikiran dalam bidang penanggulangan masalah merokok juga diajak bergabung. Beberapa organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak, dan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ikut bergabung. Ada juga yayasan-yayasan, seperti Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Asma Indonesia, Yayasan Asma Anak Indonesia, Perhimpunan Penanggulangan Tuberkulosis Indonesia, Dokter Paru, dan sebagainya sehingga mencapai kira-kira dua puluh organisasi bergabung, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, radio-radio siaran, artis sinetron, hingga artis film.



Foto: Deklarasi perlindungan generasi muda dari bahaya rokok dalam rangka HTTS 2004.

Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok pada akhirnya berganti nama menjadi Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Organisasi ini bersama-sama dengan organisasi lain dan individu di luar Komite Nasional sederhananya ingin membantu upaya-upaya yang ada dalam rangka melindungi masyarakat khususnya generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dari bahaya konsumsi rokok dan bahaya asap rokok.

Atas dasar itulah Komite Nasional ini terus mendorong pemerintah agar menandatangani FCTC, meskipun hingga sekarang belum berhasil.

Pada masa ini, penolakan secara fisik kepada Komite Nasional memang tidak begitu terlihat. Karena Komite Nasional tidak begitu frontal dan lebih banyak bekerja sama dan berdialog dengan pemerintah sebagai pihak yang amat menentukan eksistensi aturan dan penegakannya. Dalam proses lahirnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, peran Komite Nasional sangat besar. Kami diajak serta oleh Kementerian Kesehatan untuk sama-sama membuat aturan itu. Ini adalah perkara strategis untuk menambal kekosongan aturan karena belum diratifikasinya FCTC.

Mengawal aturan, menjaga batas-batas

Meski belum meratifikasi konvensi tembakau WHO, Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Inilah yang menjadi fokus kegiatan kolektif. Kita menuntut pihak-pihak yang terkait untuk betul-betul melaksanakan. Misalkan yang terkait dengan iklan rokok. Awalnya, iklan rokok tidak boleh sama sekali di media elektronik. Tapi sekarang akhirnya dibolehkan tayang, meski di atas jam sepuluh malam. Betul, memang iklan rokok sekarang tidak menampilkan fisik rokok dan aktivitas merokok. Tapi sebagai gantinya iklan-iklan ini malah menampilkan kegagahan, petualangan, dll yang akhirnya menimbulkan asosiasi rokok dengan hal-hal tadi.

Aturan lainnya—yang juga selaras dengan FCTC—adalah soal pembatasan orang merokok setelah 18 tahun. Tapi kita tahu persis bahwa di sini anak-anak SMP dengan mudah mendapatkan rokok secara eceran di pedagang-pedagang kecil. Di sini aturan tidak ditegakkan dengan ketat.

Hal yang juga sering diabaikan dan karena itu patut mendapat perhatian adalah ambang batas kandungan rokok yang berbahaya buat kesehatan. Tercantum di dalam peraturan pemerintah bahwa kadar tar yang ditoleransi adalah 20 mg. Ukuran tersebut sebenarnya lebih tinggi daripada negara-negara di sekitar kita. Singapura, misalnya, cuma mengizinkan 15 mg. Negara-negara Eropa lebih rendah lagi. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru. Tar yang masuk ke peredaran darah juga meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan.

Kandungan nikotin dalam rokok juga tak kalah berbahaya. Nikotin yang masuk ke dalam aliran darah akan merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon

adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Inilah yang kemudian menyebabkan tubuh menjadi kecanduan dan ketergantungan. Seakan kita tak bisa beraktivitas normal sebelum menghisap rokok.

PR yang belum selesai

Meregulasi tembakau pada akhirnya harus dilakukan secermat mungkin dan sistematis. Mulai dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, ada para petani tembakau yang keberatan bila tanamannya diganti. Sudah sepatutnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggali dan meneliti tanaman-tanaman pengganti yang bahkan bisa lebih baik hasilnya daripada tembakau. Masih di hulu, kira-kira ada enam juta pekerja pada industri tembakau. Untuk para pekerja industri ini—yang sebenarnya jumlahnya telah berkurang akibat mekanisasi pekerjaan—perlu juga disiapkan alternatif lapangan pekerjaan lain, yang juga sebenarnya dibutuhkan oleh para pengecer dan pedagang rokok. Beberapa segmen dalam alur produksi dan konsumsi tembakau pada akhirnya membutuhkan respons-respons yang khusus dan kerap kali menantang.

Terakhir, harapan saya adalah supaya pemerintah bersungguh-sungguh mendukung dan bahkan memfasilitasi kerja Komnas Pengendalian Tembakau. Tegakkanlah hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap penggunaan rokok yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan demi masa depan bangsa dan negara kita.

JALAN TERUS KOMNAS PT!

Oleh: Prof. Dr. Farid Afansa Moeloek, Sp.OG(K)

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Periode 2003-2012



Start di saat yang berat

Salah satu kendala besar yang dihadapi semua orang, termasuk saya ketika menjabat sebagai ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, adalah menghadapi ‘wabah’ rokok yang menjangkiti begitu banyak orang di Indonesia. Mereka telah menjadi pecandu karena memang zat-zat di dalam rokok membuat para penghisapnya senantiasa bergantung pada aktivitas merokok untuk mendapatkan rasa tenang, kenikmatan, dan sebagainya. Sekali merokok, biasanya mereka ingin terus-menerus. Tak heran, industri biasanya menasar anak-anak dan pemuda sebagai target pasarnya. Karena kalau sudah jadi konsumen, pasti mereka akan menjadi konsumen yang *loyal* dalam jangka waktu yang panjang.

Hal yang juga cukup berat menurut saya, saat itu pemerintah sendiri sepertinya ‘setengah hati’ alias tidak terlalu merestui keberadaan Komisi Nasional ini. Jadi kita terus berdialog, mendatangi pemerintah, dan memohon kepada mereka supaya ikut serta dalam gerakan ini. Pemerintah tentu saja tak mudah untuk dipengaruhi, mengingat mereka juga membutuhkan cukai tembakau untuk pendapatan dan membiayai pembangunan. Jadi bisa dibayangkan kesulitan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dalam bergerak dalam situasi pemerintahan yang seperti itu.

Akan tetapi, bagaimanapun pemerintah sebenarnya juga merupakan sekutu. Mereka saya kira sadar dengan persoalan kesehatan yang disebabkan tembakau dan rokoknya. Hal ini yang harus ditanggulangi bersama-sama, tidak bisa sendirian. Kita harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak demi perjuangan. Semua butuh strategi dan kompromi untuk mencapai tujuan bersama.

Masyarakat sebagai sekutu

Dalam perjalanannya, memang tidak mudah untuk mengidentifikasi mana yang kawan, mana yang lawan. Tetap saja semuanya harus dihadapi dengan baik. Justru pada saat kita ragu seperti itu, masyarakat bisa kita gandeng. Mereka juga merupakan sekutu kita. Mereka bisa menyediakan bantuan dan dukungan ketika kita menghadapi persoalan. Mereka juga bisa mengerti dampak buruk dan mungkin telah merasakan juga efek negatif dari rokok sehingga bisa memberikan simpati pada perjuangan kita.

Apakah mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat? Tentu saja bukan perkara gampang. Sebab sebagaimana kita ketahui kebanyakan orang Indonesia adalah perokok yang sudah tentu tidak suka dengan upaya-upaya pembatasan. Untuk itu, Komnas melakukan sosialisasi dan kampanye atas setiap kebijakan, baik yang sedang didorong maupun yang sudah dikeluarkan, seperti mengisi dialog-dialog di media televisi, radio, hingga melakukan advokasi ke berbagai elemen masyarakat.

Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan adalah advokasi tentang kamar dagang dan industri yang bertujuan agar Kadin mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada perusahaan-perusahaan anggotanya agar mereka dapat menerapkan KTR di tempat kerjanya masing-masing demi melindungi kesehatan para pekerja. Selain itu, Komnas PT juga mengajak wajah-wajah familiar, seperti para selebriti, Putri Indonesia, olahragawan, dan seniman lainnya, untuk menjadi narasumber yang berperan dalam kegiatan maupun kampanye.

Untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan itulah diperlukan kesolidan internal. Syukurnya pada saat saya menjabat sebagai ketua Komisi Nasional, tidak ada konflik internal yang berarti. Untuk menjaga kesatuan itu, kita harus terus

berdiskusi dan menimbang baik-baik semua keputusan yang akan diambil. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa semua anggota organisasi menyetujui tujuan dan keputusan yang diambil.

Pencapaian Penuh Kesan

Beberapa dari banyak hal yang saya syukuri tercapai selama kepemimpinan saya adalah merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2008 di Istana Negara. Awalnya, Komnas PT mengajukan audiensi dengan Ibu Negara saat itu, Ibu Ani Yudhoyono, untuk menyampaikan aspirasi terkait upaya perlindungan generasi muda dari dampak buruk rokok. Komnas PT memohon izin agar Ibu Ani berkenan membuka acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Dengan tangan terbuka, beliau menyetujui hal ini, bahkan pada akhirnya HTTS dilaksanakan di Istana Negara.



Foto: Acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tahun 2008 di istana negara.

Komnas PT kemudian melakukan berbagai persiapan dengan melibatkan ratusan siswa-siswi SD dan SMP se-Jabodetabek yang koordinasinya dibantu oleh PGRI, WITT, dan organisasi anggota lainnya bersama dengan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Anak-anak ini menampilkan pertunjukan drama teatrikal tentang rokok dan juga paduan suara. Beberapa orang yang hadir di dalam kegiatan ini antara lain adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Perwakilan WHO, Ketua Umum Komnas, Ibu Negara, dan anggota Komnas PT.

Keberhasilan HTTS di tahun 2008 berlanjut dengan permohonan audiensi yang diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011. Bersama dua anggota Dewan Penasehat Komnas PT, yaitu (alm.) Arifin Panigoro dan Imam Prasadjo, saya menghadap Presiden SBY di Kantor Kepresidenan untuk memberikan masukan soal perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dampak dari penggunaan tembakau.



Foto: Audiensi dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Harapan dan Masa Depan

Saya mengharapkan sekali Komisi Nasional Pengendalian Tembakau terus berjalan dan menunjukkan pengaruhnya. Mengapa? Karena bagaimanapun juga ikhtiar pengendalian tembakau adalah hal penting yang dibutuhkan masyarakat kita. Bila upaya-upaya ini berhasil, masyarakat juga yang akan menikmati dampaknya. Paling sedikit, mereka bisa terhindar dari dampak-dampak buruk yang disebabkan asap rokok.

Saya membayangkan Indonesia pada 2045 bisa mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera, tanpa asap rokok. Ini adalah tantangan dan tujuan yang bisa kita capai bersama. Oleh sebab itu, upaya-upaya pengendaliannya harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Kita harus terus bergerak karena taruhannya adalah anak-anak, cucu-cucu, dan generasi penerus kita.

Apakah kita akan membiarkan mereka terjerat asap rokok dan hidup dalam bayang-bayang aneka penyakit yang menyertainya? Merekalah yang kita harapkan bisa membawa Indonesia menjadi masyarakat yang betul-betul sehat secara fisik dan secara mental. Saya kira ikhtiar ini tidak boleh gagal.

BANGSA BUDAK AKIBAT ROKOK

Oleh: Dr. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K), M.H

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Periode 2012-2019



Mengedukasi Pemerintah: Tidak Mudah

Sampai saat ini, masih banyak orang di Indonesia yang menganggap bahwa rokok itu sesuatu yang biasa saja, bahkan telah menjadi bagian dari budaya. Ya, tidak heran kalau sumber daya manusia kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Kita akan terus miskin dan terjajah, hanya karena tidak bisa melawan industri rokok.

Saya menjabat sebagai Ketua Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) periode 2012-2019, sambil juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Sejak berdirinya, Komnas PT telah melakukan berbagai upaya untuk sosialisasi, advokasi, dan edukasi, terutama pada pemerintah sebagai pemegang keputusan. Namun, jalannya tentu tidak mulus.

Secara umum, setiap presiden mulai dari Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Jokowi tidak terlalu *welcome* untuk membahas soal pengendalian tembakau. Mungkin karena mereka kurang paham bahwa persoalan mendasar dari rokok itu sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Atau mungkin ada alasan lain yang tidak kita ketahui?

Tahun-tahun pertama saya menjabat Ketua Komnas PT, masih di bawah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa itu, terjalin komunikasi yang cukup baik antara Komnas PT dengan Presiden SBY, salah satunya adalah karena terjadi kegagalan Presiden SBY dalam mewujudkan Milleniums Development Goals (MDG) 4 dan 5 yang sangat berhubungan dengan masalah kemiskinan. Pemerintah saat itu paham bahwa kemiskinan itu erat hubungannya dengan rokok, maka komunikasi dapat terjalin dengan cukup baik.

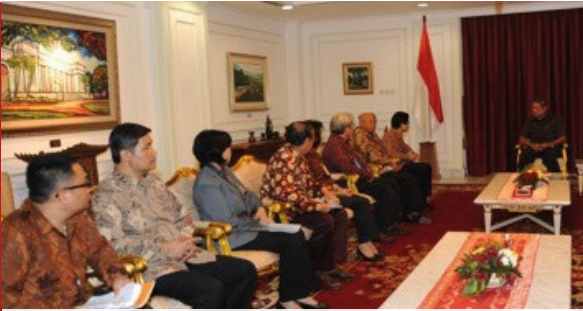


Foto: Komnas Pengendalian Tembakau bertemu dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 26 September 2011.

Walaupun tidak bisa dibilang ada perubahan besar, Presiden SBY mau menerima Komnas PT, masih mau mencoba memahami, dan juga berdiskusi. Lain halnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Walaupun tidak bisa dibilang ada perubahan besar, Presiden SBY mau menerima Komnas PT, masih mau mencoba memahami, dan juga berdiskusi. Lain halnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya bisa katakan bahwa Komnas Pengendalian Tembakau tidak pernah sama sekali diterima bertemu Presiden Jokowi untuk memberikan masukan ataupun saran.

Dalam perjalanannya, kami bersyukur bahwa Komnas PT selalu bersinergi dengan Menteri Kesehatan karena kami membantu dalam upaya menyelesaikan indikator-indikator kesehatan. Semasa saya menjabat Ketua Komnas PT, kami bersinergi erat dengan para Menkes, seperti Ibu (almh.) Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, M.P.H., dr. Nafsyah Mboi, Sp.A, M.P.H, dan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M(K). Mereka semua antusias dengan isu pengendalian tembakau.

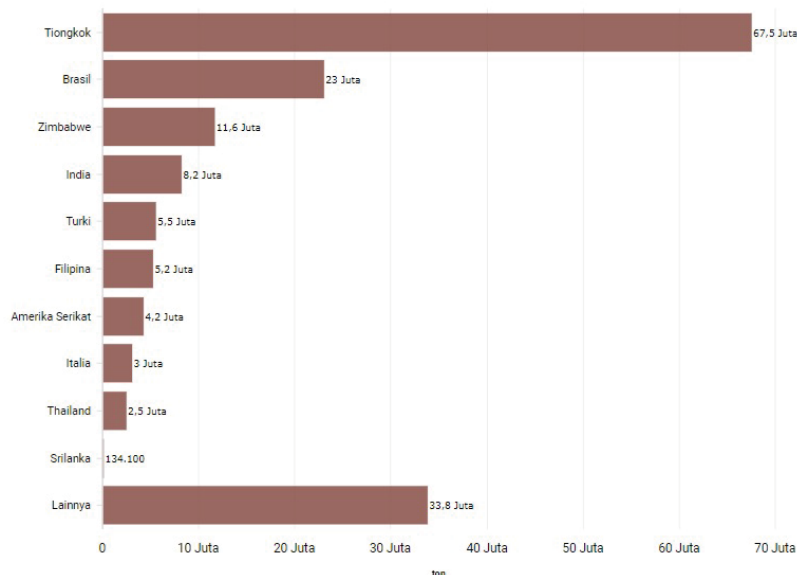
Sayangnya, setelah Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) diangkat menjadi Menkes, saya harus mengundurkan diri demi menjaga imparialitas dari Komnas PT. Jangan sampai Komnas tersangkut dan tersandera karena saya sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran telah menjatuhkan hukuman etik kepada dr. Terawan. Namun, jika dipikirkan kembali, ada baiknya juga saya mengundurkan diri, sehingga tidak perlu berhadapan langsung dengan satu-satunya Menteri Kesehatan yang menyatakan merokok itu tidak apa-apa kalau tidak lebih dari 20 batang.

Ini tidak masuk akal. Padahal, segala macam *evidence* dari berbagai penelitian di dunia Barat itu sudah jelas terlihat bahwa rokok menyebabkan banyak sekali penyakit. Sementara itu, data BPS menyatakan bahwa pengeluaran terbanyak kedua, setelah membeli nasi, adalah membeli rokok. Jadi walaupun Presiden punya program Bantuan Tunai Langsung, selama yang menerima BLT itu atas nama Kepala Keluarga atau suami, jatuhnya akan tetap dipotong banyak untuk rokok. Banyak yang lebih memilih beli rokok daripada mencukupi kebutuhan gizi dan pendidikan bagi keluarganya. Ini sangat mengkhawatirkan.

Kebijakan yang Menguntungkan Industri Rokok

Sejauh ini, belum ada presiden di Indonesia yang memprioritaskan masalah pengendalian tembakau karena rokok dianggap memberikan kontribusi yang besar bagi APBN. Padahal, berdasarkan penelitian dari Litbangkes Kementerian Kesehatan, biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi penyakit yang diakibatkan rokok bisa tiga kali lebih banyak daripada pemasukan APBN dari cukai rokok yang ditanggung oleh si pembeli rokok. Catat, pemasukannya dari cukai pembelian rokok, bukan dari perusahaan rokok.

Para juragan rokok ini pandai, kuat diduga mereka mendanai partai-partai yang ada di Indonesia sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu menguntungkan pabrik rokok. Dan kita salah besar kalau mengira pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia itu murni punya Indonesia. Pemegang saham perusahaan-perusahaan rokok besar di Indonesia adalah asing.



Grafis: 10 Negara Teratas dengan Volume Impor Tembakau Terbesar ke Indonesia (2022).

Sering juga kita mendengar alasan tidak diterapkannya larangan yang terkait rokok adalah karena rokok membantu para petani kecil. Ini bisa saya katakan omong kosong karena dari data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 saja, terlihat bahwa lebih dari 60% tembakau yang dipakai untuk memproduksi rokok di Indonesia adalah tembakau impor. Jadi apa rokok ada gunanya buat bangsa ini? Tidak sama sekali. Industri rokok ini memiskinkan dan menghancurkan bangsa ini.

Sampai saat ini saya lihat belum ada kebijakan pemerintah yang serius terkait pengendalian rokok. Kalau melihat negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang, jelas sekali rokok itu dilarang. Hal ini menyebabkan perusahaan rokok dari negara-negara maju itu menjual rokoknya di Indonesia. Kita ini hanya dijadikan pasar saja karena rokok belum dilarang di sini.

Sebagai seorang dokter interventional radiologi yang mengobati pasien, saya berpikir alangkah lebih murahnya biaya kesehatan itu kalau kita melakukan upaya preventif dan promotif ketimbang kuratif. Persis seperti kata pepatah, mencegah itu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati.

Jadi kalau kita belum bisa menurunkan prevalensi merokok, paling tidak kita harus berani memberikan pajak atau cukai yang setinggi-tingginya supaya efeknya lebih ampuh. Dana yang didapat dari *sin tax* alias “pajak dosa” ini kemudian dikembalikan untuk kepentingan sektor kesehatan.

Sejak tahun 2014 sampai masa jabatan saya berakhir di tahun 2019, setiap kali ada rapat terbatas yang akan membicarakan kebijakan tentang rokok, hasilnya tidak pernah sampai pada putusan final. Kita sebagai LSM terus melakukan advokasi terutama kepada semua stakeholder, baik DPR, pemerintah, pemerintah daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan juga ormas.

Antara Rokok, Kemiskinan, dan Lemahnya Generasi Mendatang

Kembali lagi kepada kenyataan bahwa rokok adalah belanja terbesar kedua dari sebuah keluarga. Dampak dari kenyataan ini adalah ibu-ibu yang hamil akan mengalami anemia karena kekurangan protein. Anemia pada saat mengandung pasti mempengaruhi kondisi janinnya karena 1000 hari pertama siklus hidup manusia itu sangat berarti. Kalau dalam 1000 hari pertama kita bisa menjaganya dengan optimal, lahirlah generasi yang intelektualnya tinggi.

Lalu, bagaimana kalau sang ibu mengalami anemia? Anaknya kemungkinan besar mengalami gangguan proses pembentukan otak dan banyak juga yang kemudian lahir secara prematur. Lebih parahnya lagi, kemungkinan sang ibu yang anemia juga meninggal saat melahirkan semakin tinggi karena pembuluh darahnya lemah. Jadi, kalau masih mengutamakan rokok dibanding gizi seimbang, akibatnya tinggal pilih: tetap miskin, melahirkan anak-anak yang perkembangan otaknya terhambat, atau ibu yang meninggal saat melahirkan.

Jadi, yang katanya tahun 2045 kita akan bonus demografi itu omong kosong. Jumlah populasinya memang membesar, tapi kualitasnya sangat meragukan. Hasilnya apa? Kita tidak punya daya saing, semua SDM kita akan dikuras, dan kita hanya akan menjadi bangsa 'budak'. Kita akan terjajah secara *sustainability* seumur hidup—jika tidak ada kebijakan yang tegas dan berani soal pengendalian tembakau.

Sejak awal bergabung di Komnas PT, saya terenyuh karena motor penggeraknya adalah kaum perempuan. Memang, Ketua Komnas PT bisa saja laki-laki, tapi sebenarnya para perempuannya lah yang lebih bisa berempati dan semangat terjun langsung karena mereka lah yang paling mengerti merawat anak-anak yang nantinya akan jadi penerus bangsa. Perempuan itu ibu bangsa. Jangan sepelekan peran perempuan dalam membangun negeri ini.

Saya berharap apa yang diusahakan kawan-kawan di Komnas Pengendalian Tembakau ini bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan dan keputusan. Kenapa? Karena saya sebagai seorang dokter melihat betul bahwa masalah di Indonesia terletak pada sisi sumber daya manusianya, sementara SDM itu penopangnya ada dua, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kalau keduanya tidak diperhatikan, Indonesia akan semakin terpuruk. Semoga sebelum hal terburuk terjadi, pemerintah berani mengambil langkah pelarangan rokok di Indonesia.



Foto: Kampanye 1000 perempuan dukung rokok harus mahal, April 2018.

PERJUANGAN KITA SUDAH BERKEMBANG, TAPI JALAN KITA MASIH PANJANG

Oleh: **dr. Andi Nafsiah Walinono Mboi, Sp.A., M.P.H**

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Periode 2019-2020



Sudah jadi rahasia umum bahwa intervensi industri tembakau itu telah menjalar ke mana-mana. Pengaruhnya sudah menyentuh baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif negara. Keberadaannya bisa kita rasakan lewat iklan-iklan, promosi, dan program-program CSR yang tampak menggiurkan, terutama untuk generasi muda sekarang.

Begitu derasnya pengaruh lobi dan dampak tembakau yang telah menggurita dan terasa hingga kemana-mana, menurut saya sudah tidak tepat jika kita melihat urusan tembakau melulu sebagai urusan kesehatan. Pembatasan tembakau sudah menjadi urusan politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Oleh karena itu, pendekatan multisektor perlu digalakkan. Kementerian Pendidikan dibutuhkan untuk mengenalkan bahaya rokok sejak pendidikan dasar mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar.

Kita bisa mencontoh Jepang yang menjalankan gerakan masyarakat hidup sehat mulai dari sebelum anak-anak masuk TK. Di sana, anak-anak kecil sudah bisa memberi tahu bapaknya kalau merokok itu bisa membuat penyakit buat dia dan keluarganya. Merefl-

eksikan hal ini, kadang-kadang seorang perokok akan bergeming bila disuruh berhenti oleh istrinya, tapi akan beda dampaknya jika anak yang meminta. Hingga sekarang saya belum melihat adanya keterlibatan Kementerian Pendidikan dalam persoalan ini.

Menjadi Menteri Kesehatan

Saya menjadi Menteri Kesehatan pada 2012, menggantikan Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, M.P.H. yang meninggal pada tahun yang sama. Saya meneruskan pekerjaan-pekerjaannya termasuk menyosialisasikan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang telah dikembangkan dokter Endang. Peraturan inilah yang saya bawa ke mana-mana: saat bertemu dengan sesama lembaga eksekutif, bertemu dengan pihak legislatif, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan rapat bersama gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Saya berbicara dengan Asosiasi Dinas Kesehatan dalam rapat-rapat kesehatan dan juga berbicara pada media massa. Semuanya dilakukan agar mereka tahu betul apa isi peraturan tersebut dan mengapa aturan tersebut penting untuk ditegakkan.

Saya bahkan mengundang perwakilan industri rokok dan mengatakan bahwa ini adalah peraturan pemerintah, jadi kami harapkan saudara-saudara *nurut*. Kalau tidak, saya bisa tindak.



Sumber Foto: Sehat Negeriku Kemenkes.

Namun, jalan ini tentu saja tidak mudah. Tidak semua sektor, misalnya, setuju dengan *roadmap* kesehatan yang telah kami susun. Pihak industri juga memberikan perlawanan. Selain itu, upaya kami agar jumlah perokok semakin sedikit juga kontradiktif dengan *roadmap* dari sektor perindustrian yang justru ingin meningkatkan produksi dan kontribusi industri rokok. Ini tentu tidak cocok.

Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu mengenai Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang setelah kami analisis ternyata punya pesan-pesan yang sangat kental dengan kepentingan industri. Saya yang memimpin perwakilan pemerintah (saat itu terdiri dari Kementerian Pertanian,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan), bersama anggota yang lain sepakat menolak RUU tersebut. Kami merasa tidak perlu ada lagi undang-undang pertembakauan yang berpotensi tumpang tindih. *Toh*, kepentingan petani sudah diatur dalam Undang-Undang Pertanian, demikian juga untuk bidang perdagangan dan bidang industri. Akhirnya, pemerintah sepakat menolak RUU tersebut.

Mitra dan Kerja Sama

Menghadapi tantangan yang sedemikian besar, kami berusaha memperkuat aliansi seluas mungkin dengan para mitra kami, terutama yang setia, seperti Komisi Nasional Pengendalian Tembakau yang waktu itu dimotori juga oleh dokter Kartono Muhammad. Mereka datang ke kantor dan minta saya agar mendukung upaya pembatasan tembakau. Saya bilang kepada mereka bahwa saya sudah dari dulu mendukung upaya tersebut. Saya sudah anti-rokok sejak tahun 70-an.



Foto: Konferensi pers mengenai ancaman rokok elektronik pada tahun 2018.

Jadilah kami bekerja sama. Apa yang bisa dilakukan pemerintah, akan kami lakukan. Apa yang perlu diupayakan masyarakat sipil, terus diusahakan. Semua dilakukan agar ikhtiar ini bersinergi dan betul-betul pas dan bisa memberi hasil atau dampak. Kemitraan kami bahkan sempat menasar hingga ke tingkat keluarga. Kami berusaha agar gerakan ini sampai hingga pelibatan

PKK. Sayangnya, upaya ini dibatasi waktu. Saya hanya menjabat sebagai menteri kesehatan selama dua tahun saja.

Perkembangan, Tantangan, dan Masa Depan

Hingga sekarang, saya melihat upaya-upaya pembatasan tembakau sudah mengalami banyak kemajuan. Saya melihat jangkauan kampanyenya sudah lebih luas hingga ke daerah-daerah. Banyak pemerintah daerah yang sekarang membuat peraturan mereka sendiri untuk membatasi rokok.

Saya juga melihat upaya Komnas Pengendalian Tembakau memberikan penghar-



Foto: Kampanye #RokokHarusMahal bekerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia dalam rangka HTTS 2018.

gaan kepada kepala daerah yang bersemangat membatasi tembakau sebagai hal yang positif. Hal yang juga membahagiakan adalah saya melihat Komnas juga sudah mulai melibatkan generasi muda. Merekalah yang menjadi sasaran empuk kampanye rokok dan oleh sebab itu melibatkan mereka merupakan hal yang strategis. Saya juga

melihat kemajuan dalam upaya Menteri Keuangan yang menaikkan cukai rokok.

Akan tetapi jalan kita masih panjang. *There is a long way to go baby*. Kita masih belum melihat 'tidak merokok' sebagai *lifestyle, way of life*. Kita juga masih harus memperhatikan apa dampak Omnibus Law Kesehatan. Ingat juga bahwa tahun depan (2024), akan ada presiden baru, kabinet baru, anggota DPR baru, gubernur, bupati, dan kepala desa yang baru. Apakah mereka pro-industri atau tidak? Kalau pro, maka kita harus berjuang dari nol lagi. Kita perlu mereka untuk paham betul bahwa rokok sama dengan racun! Mereka ini perlu didampingi, perlu juga untuk dimonitor.

Kita juga perlu untuk memanfaatkan *big data*. Saya kira sudah saatnya juga Badan Riset dan Inovasi Nasional dilibatkan, termasuk akademisi-akademisi dari kampus. Mereka bisa memperkuat perjuangan kita dengan membuat riset termasuk memonitor dan mengavaluasi strategi-strategi pembatasan tembakau yang ada. Kita harus melakukan upaya-upaya ini dalam basis yang rutin. Tidak hanya sekali saja.

Hal yang paling penting, seperti yang saya bilang di awal, adalah untuk melihat ikhtiar pembatasan tembakau bukan hanya dari kaca mata dan melulu urusan kesehatan! Kita butuh menanamkan ide bahwa rokok itu beracun dan berdampak pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan budaya. Dengan begitu, kita terpacu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan secara holistik dan komprehensif.

Jadi pekerjaan masih banyak. PR-nya masih banyak sekali. Kita masih membutuhkan pejuang-pejuang yang tidak mau anak bangsa mati karena racun rokok. Kita perlu pejuang-pejuang yang tidak mau anak bangsa menjadi miskin karena tembakau. Kita membutuhkan pejuang-pejuang ini dari Sabang hingga Merauke, dari pelosok desa hingga ke

“

Menurut saya sudah tidak tepat jika kita melihat urusan tembakau melulu sebagai urusan kesehatan. Pembatasan tembakau sudah menjadi urusan politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Oleh karena itu, pendekatan multisektor perlu digalakkan.

”

kota-kota. Kita membutuhkan pejuang-pejuang yang *committed*.

Kita perlu terus menuntut pemerintah agar terus berkomitmen menyediakan perangkat kebijakan dan aturan juga sumber daya untuk perjuangan ini. Kita juga perlu bermitra dengan pihak swasta yang mungkin bisa memberikan *resources* dan tambahkan tenaga. Satu lagi yang tak kalah penting, kita juga harus mampu memberikan satu atau beberapa jalan keluar bagi petani tembakau agar mereka tidak lagi menanam tembakau. Kita harus tahu dan sampaikan bahwa mereka justru akan makin sejahtera dengan menanam tanaman perdagangan yang lebih menguntungkan dan tidak mengandung racun. Untuk itulah inovasi-inovasi dibutuhkan.

05

Kisah Para Ketua

GENERASI EMAS ATAU GENERASI CEMAS?

Oleh: Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Periode 2018-2023



Juara Prevalensi Merokok

Dua puluh lima tahun sudah Komite Nasional Pengendalian Tembakau berdiri, tapi konsumsi rokok masih sangat tinggi di Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi lingkungan kebijakan, lingkungan pasar, lingkungan budaya, lingkungan perilaku, baik pejabat maupun masyarakat masih belum menunjukkan tanda-tanda sebagaimana di beberapa negara maju.

Kita bersyukur kemarin Timnas Sepakbola kita menang di final SEA Games 2023, kita rayakan setelah 32 tahun menunggu. Tapi saya belum puas karena kalau memakai ukuran kualitas bangsa ini, kita belum cukup kompetitif di tingkat Asia Tenggara sekalipun. Ini bisa dilihat dari pencapaian kita yang hanya menjadi juara ketiga di SEA Games tahun ini. Juara pertama dipegang Vietnam, padahal penduduk Vietnam cuma seratus juta lebih sedikit. Jadi kalau dibandingkan perolehan medali emas per satu juta penduduk, kita masih jauh di bawah. Hal ini menunjukkan kualitas bangsa kita belum bagus.

Namun, kalau dilihat prevalensi merokoknya, sayangnya kita juara. Hal ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita semua yang peduli akan masa depan generasi muda

menuju Generasi Emas 2045. Bagaimana cara kita menghasilkan generasi emas dalam 22 tahun ke depan jika perilaku bangsa kita masih terus berupaya meniadakan risiko-risiko perilaku yang merusak kualitas bangsa?



Foto: Kampanye anak Indonesia hebat tanpa rokok pada peringatan Hari Anak Nasional, 2017.



Foto: Konferensi pers mengenai larangan rokok ketengan rugikan pada februari 2023.

Saya rasa semua orang seharusnya sudah paham bahwa merokok adalah perilaku yang merusak kesehatan, produktivitas, bahkan juga merusak ekonomi kita. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang agama Islam, merokok sebenarnya termasuk perbuatan mubazir karena memang tidak ada manfaatnya. Sementara itu, dalam Al-Quran surat Al Isra ayat 27 sudah jelas Allah berfirman: *Innal mubazzirina kaanu ikhwanasy syaatiini*, yang artinya sesungguhnya orang yang pemboros/mubazir itu adalah saudara setan.

Setiap tahun, mulai tahun ini sampai ke depan, kalau tidak terjadi pengendalian yang baik, bangsa ini akan membakar uang 500 triliun per tahun hanya untuk rokok.

Kenyataan ini pun diperparah dengan sedikitnya anggaran yang diberikan pemerintah

untuk Kementerian Kesehatan. Bayangkan saja, anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara mencapai 400 triliun rupiah, sementara untuk anggaran Kementerian Kesehatan hanya 150 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan keengganan untuk turut membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif di masa depan. Terbatasnya anggaran kesehatan berdampak langsung pada kurangnya usaha pengendalian konsumsi rokok yang akan berpengaruh pada rusaknya kesehatan, produktivitas, dan ekonomi bangsa.

Hak Mendapatkan Lingkungan yang Sehat

Saya mengimbau semua akademisi, para kiai, para ulama, pejabat, dan wakil rakyat: Mari kita pikir, dengan akal sehat, apa jadinya bangsa kita di tahun 2045 kalau terus begini? Sekarang ini, seperlima sampai sepertiga dari anak-anak sekolah kelas 7 sampai kelas 9 sudah menjadi pecandu rokok. Jika mereka sudah kecanduan, sepanjang hidupnya akan terjadi pemborosan belanja yang mubazir dan merusak diri dan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam periode pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan* ini, saya sangat berharap pemerintah dan anggota DPR berani bersikap melindungi rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan: *bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

Saya ingin menggarisbawahi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Tapi sayangnya, sampai detik ini, belum ada yang berani melarang iklan rokok, melarang penjualan rokok ketengan, memperkuat pengendalian konsumsi rokok, memperkuat kawasan tanpa rokok, dan memperbesar *graphic warning*--yaitu gambar peringatan bahaya merokok di bungkus rokok. Padahal, rokok buatan Indonesia yang dijual di Nepal, misalnya, 90% dari bungkusnya sudah dihiasi dengan gambar penyakit-penyakit yang diakibatkan rokok. Lantas, mengapa di negeri sendiri malah tidak bisa?

“Saya khawatir, jangan-jangan para pejabat ini terkecoh dengan bisikan-bisikan orang-orang yang ingin cari keuntungan.”

Ada apa ini antara pejabat Indonesia yang punya kewenangan mengatur periklanan rokok, mengatur penjualan rokok, mengatur pertanian dan tata niaga tembakau dan rokok, mengatur ketenagaan rokok? Mengapa terkecoh dengan berita-berita yang tersebar, seolah-olah pengendalian tembakau akan membahayakan petani tembakau dan pekerja rokok?

Buka mata dan bacalah berbagai studi yang dilakukan Bank Dunia. Anda akan menemukan bahwa apa yang banyak ditakutkan dan dikemukakan para pejabat itu tidak memiliki

dasar yang kuat. Faktanya, salah satu studi itu menunjukkan bahwa angka kemiskinan para petani tembakau dan pekerja rokok jauh lebih rendah daripada angka kemiskinan masyarakat umum. Jadi, jelas bahwa apa yang disampaikan sebagian pejabat tentang pengendalian rokok akan berdampak bahaya bagi para petani dan pekerja rokok itu hanya omong kosong. **Saya khawatir, jangan-jangan para pejabat ini terkecoh dengan bisikan-bisikan orang-orang yang ingin cari keuntungan.**

Mari saudara sekalian, para akademisi, para kiai, para tokoh agama, buka mata.

Jangan sampai penduduk kita terus-menerus membakar uang secara mubazir dan merusak diri sekaligus merusak orang lain dengan rokok. Ribuan artikel ilmiah telah membuktikan bahwa konsumsi rokok itulah yang membahayakan. Perlu bukti apa lagi?

Rokok Bukan Budaya Kita

Pada tahun 1980, Mufti atau kepala Lembaga Fatwa Mesir, sudah mengeluarkan fatwa bahwa membuat, menjual, dan mengkonsumsi rokok itu hukumnya haram. Mari kita pikirkan: Mengapa kita terlalu terbelenggu kepada *ijma* ulama atau kias-kias yang berlaku di masa lalu sebelum adanya bukti-bukti ilmiah bahwa rokok itu berbahaya? Dengan sifatnya yang merusak diri sendiri, merusak orang lain, dan mubazir, mengapa hanya dianggap makruh?

Bukankah hukum fiqih itu dinamis? Dengan adanya bukti-bukti ilmiah yang jelas merusak umat, harusnya kiai-kiai berani membuka mata, berani merevisi fatwa-fatwa. Saat ada fakta-fakta baru yang membuktikan rokok itu merusak umat secara fisik, ekonomi, atau sosial, maka hukumnya harusnya berubah. Sejauh ini, baru Muhammadiyah yang sudah berani mengeluarkan fatwa rokok haram. Yang lain, kapan menyusul?

Miris sekali mendengar ada sebagian orang yang merasa bahwa merokok adalah bagian dari budaya bangsa—padahal itu tidak tepat. Rokok baru diperkenalkan di Indonesia sekitar 200 tahun yang lalu, dibawa oleh pemerintah Belanda dari Amerika.

Walaupun demikian sejarahnya, ternyata Amerika juga yang kemudian pada tahun 1960-an mengeluarkan laporan bahwa merokok itu menyebabkan kanker paru-paru. Sejak saat itu, berbagai studi dan kajian selama 50 tahun pengendalian tembakau dilakukan di Amerika. Kita pun bisa membaca laporan ilmiah Surgeon General tahun 2014 yang menunjukkan ratusan penyakit yang diakibatkan rokok. Jadi secara ilmiah, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa merokok itu sama dengan mengonsumsi zat adiktif yang merusak diri sendiri dan lingkungan.

Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya yakin semua agama pasti melarang umatnya untuk merusak diri dan lingkungannya. Maka, tiap pemuka agama harusnya turut berperan dalam memberikan fatwa atau keputusan kepada umat masing-masing tentang keburukan merokok.

Jika keacuhan ini terus berlangsung, kita tidak akan mampu menciptakan generasi emas di tahun 2045. Sebaliknya, kita menciptakan generasi cemas yang rentan terkena penyakit mematikan dan kecanduan konsumsi rokok.

Tahukah Anda, dari perusahaan-perusahaan rokok yang *go public*, persentase keuntungan terhadap hasil penjualan, setelah dikurangi cukai rokok pun, masih mencapai 25 sampai 35%. Persentase ini menjadi keuntungan yang berkali-kali lipat karena orang yang sudah kecanduan pasti akan mengusahakan apapun untuk terus bisa mengonsumsi rokok.

Apakah kita akan diam saja? Mereka-mereka yang mempunyai kepentingan dan bisnis pada barang-barang yang sifatnya menimbulkan kecanduan ini akan berusaha keras mengarahkan kebijakan publik agar mereka leluasa menjalankan bisnisnya, dengan cara mempengaruhi pejabat legislatif maupun eksekutif, bahkan kalau perlu para pemuka agama.

Oleh karena itu, masyarakat yang peduli dengan generasi muda harus berani menyampaikan fakta dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Saya sangat mengimbau saudara-saudaraku para akademisi, para intelektual, para tokoh agama, mari kita lakukan *mindset resetting* atau menyetel ulang pola pikir kita. Jangan terbelenggu dengan pikiran-pikiran dan informasi lama yang sudah tidak berlaku.

Khusus buat saudara-saudaraku umat Islam, bukalah Al-Quran, maka Anda akan menemukan 13 ayat yang mengandung kata-kata *afala ta'qilun*, *afala tatafakkarun*, yang artinya “apakah kamu tidak berakal?” dan “apakah kamu tidak berpikir?” Dengan banyaknya bukti ilmiah tentang bahaya merokok, apa kita mau jadi umat yang tidak berakal dan tidak berpikir? Insya Allah, kalau kita memikirkan kepentingan rakyat banyak, Allah akan mempermudah usaha kita.

Mari kita perkuat bersama membangun sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif demi generasi emas Indonesia!

Wassalamualikum wr. wb.

**tulisan disusun penulis ketika UU Kesehatan monibus masih dibahas di Pemerintah dan DPR dalam bentuk rancangan.*



DIALOG TOKOH DAN AKADEMISI

Prof. dr. Azyumardi Azra, MA, CBE
 Ketua Komisi Nasional Anti-Terror
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Assoc. Prof. H. Wirwan Gunawan
 Akhbar Wahid, Lic. M.Agr.
 Majelis Tarjih dan Tajdid PPK Muhammadiyah

Moderator
 Vella Andapilla
 Anggota Komite Nasional Indonesia Jakarta

ROKOK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KENDALI KONSUMSI MELALUI KENAIKAN CUKAI

PEMANTIK DISKUSI

Dr. Agus Suprpto, M. Kes
 Deputi 3 Menteri PPK
 Bidang Kesehatan Pengendalian Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Gumilang Arya Sahadewo, S.E., M.A., Ph.D
 Chief Of Economics
 Universitas Gadjah Mada

Dr. Benny Hurbasahah, MA
 Peraih Juara 1
 Lomba Sastra
 Universitas Indonesia

Zainal Muttaqin, MPP
 Akademisi Ekstern UIN
 Sunan Kalijaga Jakarta

Moderator
 Kiki Soewarso
 Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau

SELASA, 09 NOVEMBER 2021
 13.00 - 15.00

ht.ly/rokokperspektifislam
 Meeting ID: 857 6031 1302
 Passcode : 091121

YouTube LIVE STREAMING
 Komnas Pengendalian Tembakau

Komnas Pengendalian Tembakau @komnaspt @komnaspt.or.id



Foto: Beberapa kegiatan kampanye dan advokasi Komnas Pengendalian Tembakau.

Kisah Para Pejuang





Kisah Para Pejuang

HARAPAN KAMI PUN SAMA

Oleh: Dian Rahma dan Putri Arfah

Tim Administrasi dan Keuangan Komnas Pengendalian Tembakau



POV: *Awal Mula Dian Rahma.*

25 tahun Komnas Pengendalian Tembakau dan 12 tahun yang lalu saya mulai bergabung di Komnas Pengendalian Tembakau pada 2011. Bekerja di dalam tim kampanye pengendalian tembakau tidaklah

“seserius” sekarang, kampanye yang kita lakukan dahulu banyak menargetkan langsung kepada masyarakat dan anak-anak, khususnya remaja. Saat itu, saya tidak berada dalam tim program melainkan menjadi staf administrasi dan keuangan. Saya selalu turut serta di dalam acara dan kegiatan yang diselenggarakan Komnas Pengendalian Tembakau, bersama tim bekerja sama untuk mensukseskan setiap kegiatan.

Pada dasarnya, di dalam lubuk hati dari saya kecil, saya memang tidak menyukai rokok. Pada saat Bapak saya merokok di depan pintu rumah, saya selalu tegur “Bapak asapnya bau, jangan merokok di dalam, *dong*,” dengan bahasa anak-anak waktu itu, sederhana dan spontan. Buat saya, saya tidak bisa menikmati bau asap rokok. Mungkin ada

sebagian orang yang tidak merokok tapi mencium bau rokok juga biasa-biasa saja. Tapi bagi saya, bau rokok itu mengganggu dan jika terpapar lebih lama, kepala saya bisa sakit. Pada waktu saya SD itu, anak-anak sudah pasti suka menonton acara TV di hari Minggu. Di situ anak-anak sangat terpapar oleh iklan-iklan rokok yang masih gencar-gencarnya tayang di siang hari. *Wah*, kalau dipikir-pikir sekarang, sasaran yang sangat empuk anak-anak di jaman saya. Namun pada waktu saya kecil pun, saya sudah mulai berpikir ketika saya membaca kalimat peringatan bahaya rokok di setiap akhir iklan, saya merasa ada yang aneh, “Kok bisa ya, barang yang bikin penyakit masih dikonsumsi orang-orang?” Jadi saya bisa katakan, iklan rokok yang keren itu tidak berhasil mempengaruhi saya kecil, malah saya benar-benar anti dengan rokok.

Kesempatan saya bekerja di Komnas Pengendalian Tembakau sampai sekarang pun, mungkin karena memang di hati nurani saya sejalan dengan gerakan yang mendorong agar masyarakat Indonesia sadar bahwa rokok itu tidak layak untuk dikonsumsi. Rokok hanya membawa racun, yang seperti bom waktu yang kita tidak tahu kapan akan meledak dan menyebabkan berbagai penyakit berbahaya juga kematian.

POV: Awal mula Putri Arfab. Saya mulai bergabung di Komnas Pengendalian Tembakau pada pertengahan bulan Juli 2015. Awalnya karena diminta oleh Ibu Tari Menayang untuk membantu bagian keuangan dan administrasi. Selain itu, karena latar belakang organisasi ini hampir sama seperti yayasan tempat saya bekerja sebelumnya,

yang juga bergerak untuk kepentingan keberlanjutan masyarakat banyak berkaitan dengan lingkungan hidup, hanya saja Komnas Pengendalian Tembakau lebih spesifik untuk gerakan pengendalian konsumsi rokok dengan menjaga kesehatan masyarakat dari pengaruh adiksi nikotin.



Foto: Tim kerja Komnas Pengendalian Tembakau.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh Komnas Pengendalian Tembakau saat menjalankan setiap kegiatannya, target yang ingin dicapai pun berubah seiring dengan berbagai isu yang berkembang. Salah satu tantangan terbesar bagi kami adalah kurangnya sumber dana, Komnas Pengendalian Tembakau tidak mudah mendapatkan bantuan dana dari organisasi/lembaga maupun perusahaan. Mungkin karena nama kita sangat spesifik untuk pengendalian tembakau atau rokok, perusahaan-perusahaan swasta apalagi BUMN tidak akan tergerak hatinya untuk mudah memberikan donor kepada kami. Namun kami tetap berusaha menggunakan sumber daya yang ada, tentunya pengurus Komnas Pengendalian Tembakau yang hebat-hebat. Lewat beliau-beliau itulah kami beberapa kali berkesempatan bekerja sama dengan perusahaan swasta, misalnya promotor musik Java Musikindo yang berkomitmen menyelenggarakan konser musik tanpa sponsor industri rokok. Mereka membuktikan bahwa konser-konser yang digandrungi anak muda bisa berjalan tanpa industri rokok di mana sampai saat ini memang industri rokok masih gencar masuk melalui promotor-promotor musik lainnya di konser-konser besar.

POV: Dian dan Putri. Awalnya, kampanye-kampanye yang kita lakukan memang sangat menyenangkan, banyak relawan-relawan muda yang turut serta bergabung berkampanye. Salah satunya kampanye di konser musik, pameran-pameran, dan turun langsung ke jalan dengan gerakan aksi damai di Bundaran HI. Namun, sekarang perjuangan berubah haluan, kami melihat sendiri bagaimana bagian program memutar otak mencari strategi jitu menembak arah peluru ke kompleks parlemen ketika tahu ternyata RUU Pertembakauan mengancam pengendalian rokok di Indonesia, misalnya. Di situlah kami tersadar, bahwa jika kami hanya menuntut pada kampanye aktif di *grassroot*, hal tersebut tidak akan ada habisnya. Sedangkan di sisi lain, industri tembakau merajai iklan di media sosial, digital maupun TV.

“Menjadi bagian di dalam manajemen Komnas Pengendalian Tembakau membuat kami menyadari ternyata perjuangan melawan industri rokok sangat terjal dan rumit. Kemampuan dana yang terbatas membuat kami mencari berbagai macam cara agar kampanye pengendalian tembakau atau rokok dapat sedikit demi sedikit tercapai.”



Foto: Tim Komnas PT dengan tim IYCTC Buka Puasa Bersama.

Anggaran yang kami dapat terutama hanya dari Grant Bloomberg Initiative/Campaign for Tobacco-free Kids. Anggaran yang sudah disusun dan disetujui oleh *grant* pun kami upayakan agar bisa mencukupi semua kegiatan yang ingin dilakukan oleh bagian program, walaupun terkadang kegiatan yang ingin dilakukan melebihi dari budget, hanya saja selalu diupayakan agar semua kegiatan bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin dan dengan biaya yang diatur sedemikian rupa agar bisa mencukupi.

Harapan

Perjalanan 25 tahun Komnas Pengendalian Tembakau berada di lorong-lorong jalan menuju generasi sehat, sungguh, kami rasa masih berada jauh di bawah. Menengadah mata kami ke atas, melihat anak-anak masih dikelilingi oleh bayang-bayang hitam yang mengejar mereka penuh



Foto: Tim kerja Komnas Pengendalian Tembakau.

dengan racun mematikan. Apakah kita hanya pintar sendiri? Kami sebagai “pasukan di balik meja” bertanya dalam hati, atau kami hanya berharap hati anak-anak kami dijaga Tuhan agar dijauhkan dari rokok? Tentu tidak cukup. Meski di balik meja administrasi, seruan kami sama. Mari kita bergerak bersama, menanjak, agar kita dapat berdiri kokoh di atas bumi melihat anak-anak kita bebas berkarya, memiliki jiwa raga yang sehat, bahagia tanpa bergantung kehidupannya dari adiksi rokok yang mematikan.

Harapan kami pun sama, Komnas Pengendalian Tembakau semoga selalu menemukan jalan untuk terus menerjang jalan penuh liku dan perdebatan, mari kita ikut serta bersama peduli sejak dini akan kesehatan anak Indonesia menuju Indonesia emas 2045 karena Indonesia emas diwujudkan oleh generasi muda yang berkualitas.



Kisah Para Pejuang

MENGALIR MENGIKUTI TAKDIR

Oleh: Fuad Baradja

Praktisi Bantuan Berhenti Merokok (Pengurus Komnas PT)



Saya merasa, keberadaan saya di dunia Tobacco Control adalah sebuah takdir, atau lebih tepat saya katakan, memang sudah menjadi garis hidup saya.

Betapa tidak. Di saat saya sedang aktif-aktifnya bekerja sebagai pemain sinetron, tiba tiba sebuah artikel pendek di Harian KOMPAS telah membelokkan pemikiran saya.

Ini terjadi di pertengahan tahun 1998, saat secara tidak sengaja saya membuka lembaran harian tersebut di sebuah lokasi syuting. Saya tertarik untuk membaca sebuah artikel yang intinya menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah dari cukai rokok tahun sebelumnya adalah 3,5 triliun rupiah, sementara biaya kesehatan yang harus dibayar pemerintah dan masyarakat adalah 13 triliun rupiah!

Entah mengapa, artikel ini "menghantui" pikiran saya selama beberapa hari setelahnya. Di dalam otak saya berseliweran pertanyaan tentang betapa bodohnya pemerintah yang hanya mendapat pemasukan berupa cukai rokok sebesar 3,5 triliun, tapi harus mengeluarkan dana 3,5 kali lipatnya?

Singkat cerita, saya lalu mencari tahu tentang sang narasumber yang memberikan

pernyataan pada artikel tersebut. Beliau adalah ibu Renie Singgih, istri jaksa agung Singgih kala itu, yang menjadi ketua umum Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM-3), sebuah NGO penanggulangan masalah merokok pertama di Indonesia. Dari buku daftar pelanggan telepon akhirnya saya temukan alamat rumah Pak Singgih di seputaran Cempaka Putih yang kebetulan difungsikan sebagai kantor sekretariat LM-3.

Saat pertama kali berkunjung ke kantor tersebut, para staff merasa heran, kok bisa ada artis sinetron nyasar ke kantor tersebut.

Saya katakan bahwa saya membutuhkan informasi tentang masalah rokok. Mereka pun memberikan kepada saya berbagai brosur, leaflet dan aneka *fact sheet* tentang masalah merokok yang membuat saya makin kebingungan. **Betapa tidak. Masalah rokok yang selama ini saya pahami hanya tentang kesehatan, seperti masalah kanker, serangan jantung dan impotensi, ternyata jauh lebih dahsyat; yaitu tentang masa depan bangsa saya, yang sebagiannya merasa lebih baik anak-anaknya kehilangan kesempatan untuk bersekolah, asal dirinya bisa tetap ngebul.** Bahkan ada yang biaya rokoknya mengorbankan penyediaan gizi yang baik untuk anak-anaknya yang masih berada dalam masa pertumbuhan.



Foto: Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2010.

“
Betapa bodohnya pemerintah yang hanya mendapat pemasukan berupa cukai rokok sebesar 3,5 triliun, tapi harus mengeluarkan dana 3,5 kali lipatnya?
”

Saya pun kemudian bergabung di sana dan diposisikan sebagai ketua bidang Pendidikan dan Penyuluhan. Debut pertama saya, selama satu tahun, saya berhasil memberikan penyuluhan kepada siswa kelas 6 SD di 52 sekolah, tentunya di sela-sela kesibukan syuting sinetron *Jin dan Jun*. Aktivitas inilah yang kemudian diapresiasi oleh kementerian

kesehatan dengan sebuah penghargaan yang diberikan pada acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2000. Beberapa tahun kemudian, saya pindah ke Komnas Pengendalian Tembakau - Jakarta, karena LM-3 menjadi kurang aktif akibat para pengurusnya semakin sibuk di pemerintahan dan aktivitas luar kantor. Ada yang jadi Dirjen, ada yang sibuk berkarir di kedokteran dan lembaga lembaga lainnya. Hal inilah yang menjadikan LM-3 *underled* dan juga *undermanaged*.

Tahun-tahun berikutnya, saya harus rela meninggalkan dunia seni yang selama ini saya tekuni demi memilih terjun penuh di *tobacco control* atau pengendalian tembakau, karena aktivitas syuting sinetron tidak bisa dijadikan sambilan untuk aktivitas edukasi anti rokok. Begitu juga sebaliknya. Aktivitas di upaya pengendalian tembakau pun mengharuskan saya sering pergi ke luar kota memenuhi undangan untuk memberikan penyuluhan dalam bentuk berbagai seminar tentang bahaya merokok kepada masyarakat di hampir seluruh penjuru Nusantara. Ditambah lagi dengan aktivitas penulisan buku-buku, yang saya harapkan bisa "hadir" di tengah-tengah mereka yang tidak bisa menghadiri seminar-seminar saya. Alhamdulillah, hingga menjelang pandemi COVID-19, saya bisa menyelesaikan penulisan 3 buah buku yang memuat lebih dari 700 artikel tentang rokok dan masalahnya.



Foto: Buku-buku karya Fuad Baradja.

Saya juga bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan SEFT. Sebuah metode penyembuhan holistik untuk berbagai keluhan fisik maupun psikis, yang juga bisa digunakan untuk membantu mereka yang ingin berhenti merokok. Dengan keahlian yang



Foto: Terapi SEFT (*Spiritual Emotional Freedom Technique*) sebagai terapi berhenti merokok.

saya dapatkan dari pelatihan tersebut, saya membuka sebuah klinik terapi bagi yang punya keinginan untuk berhenti merokok, dan ini juga berarti tambahan *income* bagi saya dan keluarga.

Bila ditanyakan kepada saya, apa, *sib*, nikmatnya aktivitas *ngurusin* rokok ini? Maka saya jawab bahwa saya merasa sangat bahagia karena bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air dengan memberikan informasi yang bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk tetap bertahan tidak merokok, dan bantuan terapi bagi mereka yang ingin meninggalkan perilaku adiktif tersebut.

Selebihnya, saya serahkan kepada Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tanpa harus memikirkan datangnya rezeki, karena itu pasti akan datang sesuai takdir-Nya, bukan karena upaya, apalagi kepandaian kita.

Merdeka.



Foto: Edukasi bahaya merokok kepada mahasiswa.



Kisah Para Pejuang

TAHAN BANTING MELAWAN INDUSTRI ROKOK

Oleh: Hasna Pradityas

Co-founder Smoke-Free Agents - SFA



Serba Kebetulan atau Sudah Suratan?

Perjalanan panjang saya dan teman-teman penggiat pengendalian tembakau diawali dari sebuah lomba membuat aplikasi. Sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma, saya diajak teman di kelas untuk ikut mendesain aplikasi berhenti merokok. Saya saat itu adalah seorang perokok sosial yang punya niat untuk berhenti walaupun tidak tahu caranya.

Ternyata lomba ini yang menunjukkan kemana arah hidup Saya. Setelah masuk semifinal, walaupun gagal jadi juara, kami saat itu sudah punya produk berupa aplikasi untuk berhenti merokok. Akhirnya, teman-teman sepakat untuk menjadikan aplikasi ini, sebagai awal dikembangkannya menjadi website komunitas berhenti merokok yang diberi nama Indonesia Bebas Rokok di tahun 2012.

Komunitas ini banyak bersuara melalui kanal-kanal digital, khususnya media sosial yang pada saat itu belum segecar sekarang penggunaannya, namun kami sadar media sosial adalah pendekatan yang paling dekat dengan anak muda. Kami menggunakan website untuk mengedukasi mereka yang belum paham benar tentang bahaya rokok karena mereka,

bahkan Saya sendiri merasa tidak “dekat” dengan informasi itu. Pada akhirnya komunitas Indonesia Bebas Rokok memulai banyak ikut acara anak muda dan menjaring lebih banyak anak muda untuk bergabung di website kami untuk menjadi Smoke-Free Agents. Tim dari komunitas kami, secara tidak sengaja, kebanyakan adalah anak desain.

Dari pergerakan di media sosial dan jumlah “agents”, kami lihat bahwa sebenarnya ada juga teman-teman komunitas lain yang peduli juga dengan bahaya rokok, antara lain Komunitas Anti Rokok Indonesia (KARI) dan gerakan Keren Tanpa Rokok. Setelah saling kopi darat, kami senang sekali karena komunitas-komunitas media sosial ini akhirnya diperemukan oleh Komnas Pengendalian Tembakau pada tahun 2013 untuk membuat petisi tolak iklan rokok lewat www.change.org.

Petisi ini membuat kami semakin kompak dan erat satu sama lain sehingga membuat banyak sekali “amunisi” untuk menyebarkan konten-konten kreatif tentang bahaya rokok di media sosial. Salah satu akibatnya adalah kami semua mendapat ancaman dari

kelompok pendukung industri tembakau. Mereka menyerang di Twitter kami, menyebut kami sebagai pembunuh petani tembakau. Mereka tidak tahu, tekanan ini justru membuat kami semakin bersemangat melawan. Saya pun saat itu akhirnya berhenti merokok—bukan hanya karena isu kesehatan—tapi karena marah dengan industri rokok dan tidak mau uang dan Kesehatan Saya dikontrol mereka. Intinya pada saat itu saya sudah tidak mau lagi ditipu oleh industri rokok yang menunjukkan bahwa rokok itu normal dan keren.



Foto: Tim kerja Komnas Pengendalian Tembakau.

Lahirnya Smoke-Free Agents

Pada tahun 2013, sekelompok komunitas anak muda yang punya *passion* soal pengendalian tembakau kemudian menyebut diri kami adalah Smoke-Free Agents (SFA). Nama ini kita putuskan menjadi gerakan dan menjadi salah satu inisiator untuk gerakan *tobacco control* yang lebih kreatif – dari anak muda untuk anak muda. Sosialisasi yang dilakukan sudah tidak banyak lewat aksi turun lapangan dan edukasi saja, tapi juga diper-

kaya lewat desain-desain kreatif di media sosial, karena itu cara yang dilakukan industri rokok juga untuk menjangkau perokok mudanya. Kami ingin melibatkan lebih banyak anak muda yang punya berbagai keahlian, seperti Information Technology (IT), desain, videographer, photographer, siapapun untuk terjun menjadi Smoke-Free Agents. Dengan berdirinya Smoke-Free Agents, kami lebih sering lagi diajak bekerjasama dalam berbagai kampanye kreatif yang dilakukan Komnas PT.



Foto: Pencopotan iklan rokok di lingkungan sekolah.

Salah satu kampanye yang cukup berkesan adalah penurunan iklan rokok yang berada di sekitar sekolah-sekolah. Kolaborasi dari Komnas PT, SFA, Lentera Anak Indonesia, dan Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) itu diawali dari keresahan kami melihat cara industri rokok menargetkan anak sekolah sebagai perokok pengganti generasi sebelumnya –yang kemungkinan besar meninggal lebih cepat karena dampak buruk rokok juga. Hasil riset dan monitoring yang kami lakukan di awal menunjukkan bahwa lebih dari 360 sekolah yang kami kunjungi di 5 kota, pada 85%-nya kami temukan iklan rokok di sekitar sekolah, baik berupa poster dan spanduk di warung, billboard, baliho, bahkan videotron.

Temuan itu memacu kami untuk memperkencang edukasi kepada anak-anak, tapi dengan cara yang lebih relate dengan perkembangan psikologisnya. Kami menggandeng mereka dengan membawa sebuah gerakan SFA untuk menolak jadi target industri rokok atau kampanye yang kami buat adalah Tolak Jadi Target. Kami pikir cara ini seharusnya bisa diterima oleh para remaja yang sedang memasuki fase *rebel* atau suka melawan, daripada harus mendengarkan kami berbicara tentang bahaya rokok untuk Kesehatan yang membosankan buat mereka.

Kami mulai berkeliling, melakukan roadshow ke 8 sekolah yang paling banyak iklan rokoknya. Para remaja sekolah akhirnya tergerak untuk bersama-sama menurunkan iklan rokok yang ada di sekitar sekolahnya dan menggantinya dengan iklan layanan masyar-

akat yang memiliki muatan positif, seperti “jangan jual rokok pada anak” atau “jauhkan rokok, bahkan mereka membuat pantun sendiri.”

Setelah sukses dengan kampanye penurunan iklan rokok, semakin banyak kolaborasi yang kami lakukan dan berkeliling nusantara, di antaranya kolaborasi dengan para influencer, sekolah-sekolah, universitas, organisasi kecil ataupun besar, bahkan juga bekerja sama dengan Kemenkes. Kemenkes mempercayai SFA untuk melakukan pemantauan kawasan tanpa rokok di sekolah dan tempat kerja. Kami diajak Kemenkes berkeliling Indonesia untuk langsung melihat apakah sekolah-sekolah dan kantor pemerintah sudah menerapkan kawasan tanpa rokok atau belum. Hasilnya, masih banyak sekolah yang gurunya merokok di dalam ataupun luar ruangan, bahkan di lingkungan pemerintah daerahnya sendiri. Kawasan tanpa rokok belum diterapkan dengan baik.

Oleh karena itu, selain melakukan kampanye kreatif, Smoke Free Agents juga melakukan peningkatan kapasitas untuk membagi ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan ke teman-teman muda lainnya di Jakarta ataupun di daerah-daerah supaya menjadi corong untuk mengedukasi masyarakat dan advokasi ke pemerintah lokalnya tentang masalah rokok dan bahayanya untuk generasi muda di Indonesia. Hasilnya, Smoke-Free Agents

berhasil bergerak di berbagai daerah, seperti Sumatera Kalimantan, Jawa dan bahkan sampai Papua. Anak-anak sekolah mengidentifikasi diri mereka sebagai Smoke-Free Agents. Ini sebuah keberhasilan yang diawali dari satu gerakan sporadis, yang kemudian berkembang terus, sampai akhirnya menasional dan anggota SFA pun tidak sedikit yang banyak diminta ke luar negeri untuk berbagi dan belajar.



Foto: Kampanye permintaan perbesar peringatan kesehatan di bungkus rokok dengan tema "Show The Bigger Truth" di Jakarta pada HTTS 2016.

Risiko Adalah Bagian Dari Perjuangan

Perjalanan jatuh-bangunnya perlawanan terhadap industri rokok ini tentu bukannya tanpa hambatan dan tantangan. Pertama, soal pekerjaan yang bersifat sukarela. Tidak ada yang bekerja secara full time, jadi memang pekerjaan ini dilakukan di luar waktu kantor atau jam kuliah. Hal ini menyebabkan keberlanjutan para relawan sedikit lemah. Kedua,

soal ancaman dari industri rokok. Untuk menghadapi mereka, kuncinya cuma dua: harus tahan banting dan tidak boleh *baper!*

Saya pernah waktu itu diserang di sosial media saat Smoke-Free Agents berkolaborasi dengan Suara Tanpa Rokok di Banjarmasin. Saat itu kami punya kampanye menolak industri rokok dengan mengatakan bahwa industri rokok itu berbohong. Kampanye itu bernama *They Lie We Die*. Kami bersama teman-teman komunitas di Banjarmasin menghampiri beberapa kantor industri rokok dan berfoto secara kelompok di depan kantor tersebut. Yang tidak biasa, kami menggunakan kaos bertuliskan “*Go A Dead*” (plesetan dari jargon salah satu industri rokok). Tentu saja, kami sebar ke sosial media sambil memberikan advokasi tentang kebohongan industri rokok. Hal ini ternyata tercium oleh kelompok yang mendukung industri rokok. *Postingan* Saya tentang kampanye ini di Instagram dibanjiri oleh sekelompok orang tidak dikenal yang menghujat Saya. Mereka bahkan mengunggah *screenshot* foto Saya di akunnya untuk menandai dan mengancam Saya. Seribu lebih komentar ramai dinotifikasi Saya. Apakah ini membuat saya menyesal dan jatuh? Tentu tidak, karena banyak dari teman-teman SFA yang juga melawan kelompok tersebut di kolom komentar.

HEALTH

Antitobacco activists turn to art to appeal to youngsters

Vela Andapita

THE JAKARTA POST/JAKARTA

Dozens of Jakarta State University (UNJ) students in Rawamangun, East Jakarta, gathered at the campus' plaza on Wednesday morning. A stage was erected, lines of chairs were placed and 10 black-painted plywood boards were set up in the area, where some were seen busy painting murals containing antitobacco messages.

The event is part of *They Lie We Die* (TLWD), an antitobacco campaign jointly initiated by Smoke Free Agent, the National Commission on Tobacco Control, the National Commission for Child Protection and several other organizations that share the same mission to fight against the country's tobacco industry.

The TLWD campaign was preceded by a two-day workshop in March involving students from five universities: UNJ, Pelita Harapan University, National Multimedia University, Bina Nusantara University and the Uni-

versity of Indonesia (UI).

After learning about the truth behind the tobacco industry from the workshop, the students were asked to create events at their respective campuses to amplify the message.

The head of the TLWD committee at UNJ and the university's workshop representative, Indra Dwi Permana, decided to hold a mural-painting event. He selected a variety of artists, including his fellow UNJ students and professional muralists.

"I believe that [mural] artwork could speak louder than words," said the junior-year art student.

Indra admitted that he was an active smoker. He is currently attempting to quit smoking, as he learned that his right to smoke is not more important than others' right to breathe in fresh air.

"I also learned that the tobacco industry's sponsorship of youngsters' events can't be considered genuine. They expect us to be their future loyal customers," he added.

TLWD campaign spokesperson Hasna "Tyas" Pradityas said the campaign was aimed at enlightening youngsters that people had long been deceived by the tobacco industry through its powerful, omnipresent ads and corporate social responsibility programs.

"Suggesting that people quit smoking for health reasons is no longer effective," she said.

According to the 2013 Basic Health Survey, three out of 10 smokers in the country are aged between 15 and 30, most of which smoked their first cigarette before they turned 19. Tyas said the number had raised concern from antitobacco activists.

Health Ministerial Decree No. 28/2013 on the regulation of pictorial health warnings on cigarette packaging has not been effective in preventing young people from smoking.

"We can't rely solely on the government to create stricter regulations on tobacco control. It's the youngsters' turn to stand up

together and limit the industry's movement," Tyas said.

Koma, a mural artist known for avoiding tobacco-sponsored events, shared his experience in front of UNJ students.

"Stereotypes of the art world are artists who smoke heavily and tobacco-sponsored events. It's hard to maintain your idealism, though it's possible," Koma said, noting that he stopped smoking around six years ago.

Koma said he observed a mutually beneficial relationship between artists and cigarette companies. While the artists receive support from tobacco companies to hold art events, the cigarette companies at the same time have the opportunity to sell and promote their products.

"I want more young artists to know that we don't need support from the tobacco industry to create art and survive," he said, adding that he still found work despite the fact that he refused to participate in tobacco-sponsored events.

Foto: Artikel di surat kabar cetak.

Salah satu cerita seru kampanye lainnya, waktu itu terjadi di Cilandak Town Square, yang pada saat itu masih memperbolehkan merokok di dalam ruangan, yang mana harusnya Kawasan Tanpa Rokok di dalam ruangan sudah harus diterapkan. Kami bekerjasama lagi dengan Suara Tanpa Rokok, membuat semacam flash mob Gerakan jatuhkan badan secara bersamaan. Jadi, kami sebar pasukan dari teman-teman komunitas dan universitas di dalam mall tersebut. Merekapun memakai masker respirator dan berpencar. Lalu, pada saat waktu yang sudah ditentukan, kami semua menjatuhkan diri ke lantai secara bersamaan. Namun ada juga yang mengangkat poster bertuliskan “They Lie We Die”, “Citos Bau Rokok”, dan sebagainya. Saat itu mungkin ada sekitar 30 anak muda berpartisipasi. Pengunjung dan security yang sedang berkeliaran pun panik melihatnya. Mereka menarik seorang teman kami, dan bertanya, “Ini siapa yang tanggung jawab?”. Saya secara percaya diri mendekati Security dan bilang, “Saya, pak”.

Kejadian ini membuat saya diinterogasi di kantor security mall. Saya tidak takut sama sekali, karena memang Citos sudah melanggar peraturan pemerintah. Di kantor tersebut, mereka nampaknya sudah tahu kesalahan mereka dan alasan kami melakukan protes ini. Tentu saja mereka sudah melanggar aturan dan tidak mau berargumentasi lebih panjang lagi. Saat itu mereka justru meminta maaf kepada kami karena belum bisa menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan baik.

Jadi, Smoke-Free Agents ini walaupun gerakannya sporadis, tapi tetap didasari regulasi. Kami tidak melakukan tindakan anarkis atau vandalisme, dan kami bekerja sama juga dengan banyak pihak agar punya dasar hukum yang kuat dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan apa yang mau kita lakukan.



Foto: Kampanye dukung FCTC di Bundaran HI, 2014.

Kembali ke masa kini, kita bisa melihat bahwa mengubah perilaku atau persepsi orang itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 tahun saja. Buktinya, Komnas PT dalam usia yang sudah lebih dari 20 tahun ini masih melakukan advokasi untuk pengendalian tembakau. Oleh karena itu, para penggiat dan aktivis harus bisa melakukan peningkatan kapasitas secara merata ke banyak daerah di Indonesia dan menargetkan segala usia, khususnya

generasi muda. Ingat, kita semua adalah korban industri rokok. Hentikan iklan, promosi, dan sponsor rokok dimanapun.

Remaja dan anak-anak muda harus selalu kreatif. Kalau cari sponsor untuk acara-acara sekolah dan kampus, hindarilah semua yang berhubungan dengan rokok. Kenapa? Karena kalau kita menormalisasi rokok dan kecanduan rokok, itu sama saja dengan mengancam pertumbuhan dan masa depan anak muda di Indonesia. Dalam ilmu tentang masalah tembakau, bukan hanya dari luarnya saja, tapi menyeluruh dari hulu ke hilir, dari petani, industri, nya secara menyeluruh, jangan mau dibohongi.

Dalam ulang tahun Komnas PT yang ke-25, saya berharap Komnas PT tetap berdiri kuat dan menyebarkan semangatnya dalam membangkitkan gairah anak-anak muda untuk menolak jadi target industri rokok. Secara pribadi pun, saya berterima kasih juga pada Komnas PT yang sudah menyatukan anak-anak muda di tahun 2012 sampai akhirnya terbentuklah Smoke-Free Agents. Tanpa dukungan dan didikan dari Komnas PT, Smoke-Free Agents tidak akan bisa tahan banting.

04

Kisah Para Pejuang

DUA DEKADE AKTIVISME DAN REFLEKSINYA

Oleh: **Itsnaeni Abbas**

Aktivis Pengendalian Tembakau



Jalan Sunyi Advokasi

Saya mulai terjun ke dalam aktivisme *tobacco control* (TC) sejak 2003. Saat itu masih ‘sepi.’ Teman-teman saya saat itu adalah para senior dari Yayasan Jantung, Yayasan Kanker, LM3; Bu Mia, Bu Tuti, dan Pak Tulus. Saya sendiri bekerja di Forum Parlemen Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan yang bekerja dengan semua anggota DPR untuk semua isu kesehatan—karena saat itu fokus kita adalah untuk mencapai target-target Tujuan Pembangunan Global (MDGs).

Dalam kurun 2003 hingga 2005, isu pengendalian tembakau di Indonesia adalah soal ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi badan kesehatan dunia WHO. Kami beraudiensi, berdialog, memberi amunisi, dan mendorong para anggota DPR agar mendesak pemerintah meratifikasi konvensi tersebut. Sepanjang proses itu, kami mendatangkan pakar-pakar tembakau dan pakar-pakar kesehatan untuk memberikan ‘pencerahan’ kepada anggota DPR agar mereka *engeh* betapa pentingnya ratifikasi konvensi itu.

Jangan bayangkan donor-donor besar yang mendukung kerja-kerja saat itu. Kantor saya mendapatkan hibah dari WHO, tapi itu hanya sampai 2005. Lalu ada Health Bridge dari Canada, diikuti *funding-funding* lain yang kecil.

Dari SEATCA hingga drama ‘ayat yang hilang’

Pada 2004 saya terpilih mewakili IFPPD (Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development) tempat saya bekerja untuk ikut pelatihan yang digelar South-East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) yang digelar selama empat hingga lima tahun. Saat itu ada tiga orang yang terpilih: saya, Ibu Tuti, dan Pak Tulus. Di sinilah kami ditempa dengan substansi-substansi mengenai kontrol tembakau—termasuk berjumpa dengan banyak ahli dan peneliti. Setelah selesai, para *fellow* ini kemudian bekerja di negara masing-masing menyebarkan apa yang kami dapatkan selama pendidikan.

Pertama kali saya berkenalan dengan dr. Kartono Muhammad adalah pada tahun 2007. Beliau saat itu bekerja dalam isu kesehatan reproduksi. Jadilah kami berkeliling Indonesia dari DPRD ke DPRD mengadvokasi isu-isu kesehatan—karena waktu itu kita masih punya target MDGs—sambil mengawal Undang-Undang Kesehatan yang saat itu hendak direvisi. Di situlah saya menyadari ada yang harus dikawal terkait dengan rokok.

Pada 2008 masuklah CTFK (Campaign for Tobacco-Free Kids) yang didukung Bloomberg ke Indonesia. Dari sini fokus advokasi melebar tidak hanya dalam upaya mendorong ratifikasi FCTC tapi terutama pada undang-undang kesehatan yang bisa mengakomodasi kebuntuan akibat tak kunjung ditandatanganinya konvensi tersebut. Maka pekerjaan kita saat itu adalah menyusun suatu draf undang-undang pengendalian dampak



Foto: Narasumber dan peserta pelatihan SEATCA, 2005.

tembakau terhadap kesehatan. Strategi kita waktu itu adalah mencari *champion* yang membawa akan undang-undang ini. Waktu itu kita mendapatkan dr. Hakim Sorimuda Pohan dan Ibu Aisyah Hamid Baidlowi—adik Gus Dur yang sangat berpengaruh di Komisi IX, komisi kesehatan. YLKI, Komnas Pengendalian Tembakau, dan Yayasan Kanker bergerilya masuk ke DPR untuk mengadvokasi. Dalam jangka waktu 2,5 tahun kami mendapatkan 256 pendukung dari anggota DPR—hampir separuh dari total jumlah anggota DPR untuk menjadi inisiator Undang-undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK). Itu peristiwa bersejarah dalam hal paling banyak inisiatornya. Biasanya inisiator undang-undang cukup minimal satu orang. Akhirnya, pada tahun 2008, Undang-Undang ini masuk Program Legislasi Nasional.

Konsorsium gerakan ini kemudian juga terlibat dalam mengawal amandemen Undang-Undang Kesehatan. Kita menyusun kelompok kecil untuk memantau dan mendampingi focal point kita yang ada di DPR dalam membahas amandemen UU Kesehatan terutama terhadap pasal-pasal ‘rokok’. Setiap bulan kami menggelar pertemuan rutin untuk memonitor dan mengawal proses hingga akhirnya berhasil. Dari pertemuan rutin inilah kami mendapati ‘ayat yang hilang’ di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ayat itu berbunyi “*Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.*” Kami sepakat ini harus dibikin ‘ribut.’ Konferensi pers digelar untuk menyikapi hal tersebut. Saya juga ikut mendampingi pelaporan tindakan sengaja ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga ke Badan Reserse dan Kriminal Polri. Kerja keras itu berbuah manis dengan kembalinya ayat tersebut ke Undang-Undang Kesehatan.

“

Proses regenerasi dan pengkaderan penggiat-penggiat yang melakukan advokasi di DPR tidak berjalan.

”

Aktivitas-aktivitas saya di pengendalian tembakau membuat saya mendapatkan penghargaan dari John Tung Foundation Asia Pacific Young Leader 2010. Saya dan empat orang wakil Asia lainnya diundang ke Sydney untuk penghargaan tersebut.



Foto: Penerimaan penghargaan dari John Tung Foundation Asia Pacific Young Leader 2010.

Pengkaderan dan pendidikan

Ketika pasal rokok itu berhasil kita kembalikan ke Undang-Undang Kesehatan, industri tembakau mengubah strategi. Mereka menyerang undang-undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PPDTK) dan menawarkan konsep baru: RUU Pertembakauan. Akibatnya pada 2010, pembahasan mengenai PPDTK menghilang. Saya dan dr. Hakim sendiri masih berjuang di DPR untuk mengawal isu tembakau hingga 2012. Setelah itu baru saya bergabung dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Namun, kerja-kerja saya di DPR bersama dengan Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD).

Dari episode ini ada pelajaran yang saya petik. Proses regenerasi dan pengkaderan penggiat-penggiat yang melakukan advokasi di DPR tidak berjalan. Padahal keberadaan mereka penting untuk terus mengawal proses penentuan kebijakan dalam skala nasional.

Saya juga melihat perlunya pelatihan-pelatihan yang intensif dan substantif kepada penggiat-penggiat yang baru. Ini penting agar seluruh gerakan advokasi bisa dilakukan lebih strategis dan berkesinambungan, tidak hanya disetir oleh agenda-agenda donor yang berorientasi hanya pada proyek semata: yang penting pekerjaan ini dan itu selesai tanpa menghiraukan apa dampaknya, apa substansi perjuangannya. Yang juga lebih mendasar, para penggiat baru ini perlu untuk belajar apa esensi pengendalian tembakau, mengapa harus dikendalikan, mengapa sulit dikendalikan, dan apa penyebab utamanya. Saya melihat model *capacity building* SEATCA yang pernah saya terima bisa diadaptasi untuk menjadi bahan pendidikan ini. SEATCA bisa diundang untuk berdiskusi dan memetakan siapa lawan dan kawan, bagaimana strategi untuk menghadapi, dan apa yang harus diantisipasi. Dari sinilah

semangat juang itu berasal. Dan dari sini pula kita bisa bekerja dengan hati. Apa yang saya lakukan itu berkat didika. Dari guru-guru yang hebat seperti dr. Tuti Soerojo, dr Kartono Mohamad, Bu Aisyah Hamid Baidlowi, Bu Mia Hanafiah, dan dr. Hakim Sorimuda Pohan.

Peta dan fokus advokasi

Dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan, dunia telah berubah. Media sosial telah mengambil alih arus produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Tidak ada yang salah dengan itu—apalagi jika dikaitkan dengan aktivitas yang sifatnya penyuluhan kesadaran (*awareness*). Tapi dalam konteks pengaturan tembakau, kita harus fokus pada pembuat kebijakan alias *policy maker*, entah itu anggota-anggota DPR atau pemerintah—yang mungkin sebagian di antaranya tidak ada di media sosial.

Kita harus tetap ‘memepet’ para anggota legislatif dan aktor-aktor di pemerintahan. Kita perlu memiliki *champion* yang baru, *messenger* baru yang mampu menghubungkan agenda-agenda *tobacco control* dengan Kementerian Kesehatan dan DPR. Kita perlu *human touch* atau *in person advocacy* yang membawa dampak langsung lewat kebijakan-kebijakan nasional. Siapakah yang bisa menggantikan Bu Tutik, Bu Mia, Pak Hakim yang berperan sebagai *messenger*? Itulah *gap* yang perlu kita isi sekarang. Tidak bisa diisi dengan hanya sekadar *meeting* ke *meeting* atau membuat konferensi pers. Kita perlu berani bercermin dan mencoba untuk mengukur dampak yang telah kita capai. Bukan sekadar tampil di TikTok, Instagram, podcast, atau Youtube. Apakah dampak kebijakan yang telah kita rasakan dalam lima tahun terakhir? Bagaimanakah dampak itu bisa kita capai? Kita harus bisa memetakan siapa sekutu siapa seteru dan menetapkan agenda-agenda sendiri. Tak perlu menunggu apalagi disetir oleh kepentingan donor.



Foto: Tim kerja Komnas Pengendalian Tembakau, 2016.

Bekerja dengan para anggota DPR itu memang melelahkan; mulai dari menyiapkan argumen, kritik, saran, strategi, antisipasi dll. Selesai beraudien dengan anggota DPR bukan berarti pekerjaan selesai. Setelah itu kita harus segera memberikan bahan-bahan tindak lanjut. Bila perlu, kita mengundang mereka untuk sekadar sarapan pagi atau makan malam. Kita harus lihai memetakan siapa

aktor kunci di kementerian—ini tidak harus pejabat teras. Siapa staf ahlinya, biro hukumnya, teman terdekatnya, dan seterusnya. Itulah strategi gerilya yang harus dilakukan.

Melawan gurita dan raksasa

Saya menilai situasi pengendalian tembakau saat ini sudah genting dan tidak boleh disikapi dengan santai. Perjuangan itu tidak akan pernah berhenti karena lawan kita itu adalah industri raksasa yang menguasai politik di Indonesia. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Kesehatan yang akan menggusur beberapa undang-undang kesehatan yang sudah ada.

Masa depan generasi yang akan datang ada di tangan kita. Kalau kita tidak bergerak maka rokok itu akan menjadi legal. Jangan sampai itu terjadi. Perjuangan memang masih panjang, tapi selalu ingat dan resapi kembali apa yang menjadi substansi dari perjuangan ini.

(05)

Kisah Para Pejuang

MENJADI PETUGAS KEMENTERIAN, MENGAWAL BOLA SARAT KEPENTINGAN

Oleh: Lily S. Sulistyowati

Kepala Pusat Promosi Kesehatan (2010 - 2015) dan
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(2015 - 2019) Kemenkes RI



Tahun 2010 adalah awal saya masuk gelanggang resmi 'pertandingan' pengendalian tembakau. Gentar tidak, namun banyaknya pemain dan petaruh di sekitar lapangan cukup mengingatkan situasi tak mudah yang menghadang di depan. Saya fokus saja pada posisi gelandang Kementerian Kesehatan. Ini permainan tim. Kerjasama, konsistensi, kerja keras dan tentunya mental kuat menjadi syarat.

Pusat Promosi Kesehatan, nama kantor yang saya gawangi. Ketika saya masuk, sudah setahun usia Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Layaknya peraturan tertinggi dalam sistem tata-negara, berbagai peraturan penjabarannya harus disusun. Itulah fokus utama tugas pengendalian tembakau yang menjadi tanggung-jawab saya selaku Kepala Pusat Promkes, selain seabreg tugas lain dalam isu kesehatan yang lain.

PP 109 dan KTR

Meskipun perjalanan pengendalian tembakau di negeri ini sejak awal relatif terjal, namun saya meyakini, kemajuan dapat dilakukan, melihat banyaknya pihak yang makin nyata terlibat dan memberi dukungan. Dua tugas yang menjadi perhatian Kemenkes pada waktu itu adalah menyusun Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang-undang, dan mengimplemetasikan kebijakan di berbagai kementerian terkait dan di sektor lain.

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memakan waktu cukup lama, kurang lebih tiga tahun, dan disahkan sebagai PP Nomor 109 Tahun 2012.

Penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih operasional dilakukan secara paralel. Proses ini berlangsung lebih mengembirakan dengan interaksi positif berbagai pihak, salah satunya dengan mitra kerja dari Kementerian Dalam Negeri. Interaksi dengan Dr. Ir. Sapto Supono beserta tim dari Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan tidak akan saya lupakan.

Perjalanan Panjang Pengesahan PP 109/2012

by Rokom - 28 Januari 2013 Reading Time: 1 min read



Foto: Liputan mengenai proses panjang pengesahan PP 109 tahun 2012.

Sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id

Kami bahu-membahu menyusun pedoman dan mengadvokasi lapangan untuk memberlakukan aturan Kawasan Tanpa Rokok atau KTR yang gaungnya cukup keras di masyarakat. KTR sudah menjadi jargon populer yang dicintai maupun dibenci.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang KTR praktis diselesaikan dalam waktu dua bulan saja. Peraturan ditandatangani oleh Dr. Endang Sedianingsih selaku Menteri Kesehatan dan Bapak Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, peraturan bersama ini diikuti dengan Surat Edaran Kemendagri kepada seluruh Gubernur/Bupati /Walikota di Indonesia.

Tantangan dan pertentangan soal pengendalian tembakau terjadi di berbagai simpul dan melibatkan berbagai pihak, baik dari dunia industri, masyarakat, politisi bahkan di dalam pemerintahan sendiri. Jejaring dan proses komunikasi yang baik harus senantiasa dijaga meskipun agenda tak boleh menciut. Berbagai gugatan terhadap UU Kesehatan dan Peraturan Bersama dari pihak yang tidak menghendaki adanya pengaturan zat adiktif dalam tembakau terus dihadapi dan untungnya dapat dipatahkan.

Dalam pasang-surut pengendalian tembakau, saya merasakan pertemanan dan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya dari Komnas Pengendalian Tembakau (Ibu Mia Hanafiah, Ibu Tuti Suroyo, Pak Kartono Mohamad), dari akademisi (Pak Abdillah), dan masih banyak lainnya.

Peraturan lainnya

Bola terus menggelinding. Tugas terus berjalan. Menteri Kesehatan berestafet kepada Ibu Nafsiah Mboi, setelah Ibu Endang Sedianingsih mangkat tepat pada hari Pendidikan Nasional 2 Mei, tahun 2012. Sosialisasi dan advokasi PP 109 makin gencar dilakukan oleh Menkes, khususnya kepada kementerian dan lembaga lain, juga kepada dunia industri.

Berbagai peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengendalian tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk tembakau terus dibahas dan disusun. Upaya membuat peraturan memang lazim lebih dilihat dari produknya. Namun sesungguhnya proses sebelum dan sesudahnya merupakan kerja kolektif yang sangat bermakna.

Produk hukum penting yang berhasil diselesaikan dalam kurun 2012-2014 setidaknya ada empat. Pertama, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 41 tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan cukai lainnya. Dua peraturan lain dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

PHW dan Peta Jalan

Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk

Tembakau. Permenkes ini mengatur bentuk gambar dan tulisan atau *Pictorial Health Warning* (PHW) pada kemasan produk tembakau. Peraturan disebarluaskan kepada industri rokok yang mencapai 1286 industri dan importir rokok. Ibu Tuti dan Ibu Mary Assunta dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) sangat membantu dalam kegiatan ini.

Pictorial Health Warning (PHW) yang menjadi mandat dari Permenkes 28 tahun 2013 disosialisasikan dalam *roadshow* ke pusat industri tembakau di Malang, Surabaya, Kudus, Solo, dan Bandung. Pada 24 Juni 2014, semua industri tembakau sudah harus membuat kemasan rokok dengan mencantumkan PHW, dan setiap 2 tahun PHW ini harus diganti sesuai amanat PP 109 tahun 2012.

Sosialisasi peraturan PHW dilakukan dengan serius dan intensif. Seminggu sebelum tenggat waktu pemberlakuan PHW pada kemasan produk tembakau, Menkes Ibu Nafsiah meminta saya untuk mengundang semua pimpinan industri tembakau dan asosiasi pengusaha tembakau dengan masing-masing membawa contoh kemasan tembakau yang sudah mencantumkan PHW. Beliau ingin melihat komitmen para industri dalam melaksanakan peraturan tersebut. Ternyata para pelaku industri semua menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan pemerintah. Secara terpisah para pimpinan industri menyampaikan kepada Ibu Nafsiah bahwa mereka akan mematuhi PP 109 tahun 2012 namun keberatan bila pemerintah mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menkes menjelaskan bahwa FCTC tidak dimaksudkan untuk menutup industri melainkan melakukan pengaturan dalam pengendalian konsumsi tembakau.

Produk hukum Kemenkes yang juga diterbitkan di tahun yang sama adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi kesehatan. Dalam peta jalan ini antara lain ditargetkan pada tahun 2024, PHW pada kemasan produk tembakau sudah beralih ke kemasan polos atau *plain packaging*, seluruh kabupaten/kota telah menerapkan Perda KTR, dan semua Puskesmas mempunyai fasilitas konseling Upaya Berhenti Merokok.



Foto: Liputan media Suara.com mengenai efektivitas peringatan kesehatan pada bungkus rokok.

Sumber: suara.com

Dana Bagi Hasil Cukai

Aspek lain yang penting dalam program pengendalian tembakau adalah penggunaan dana cukai tembakau. Kerjasama rekan yang ahli sekali lagi saya rasakan sangat membantu. Kali ini Mas Abdillah Ahsan dan Ibu Rita Damayanti terlibat. Kami dan tim menyusun buku dan mensosialisasikan Panduan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di bidang Kesehatan yang diterbitkan pada November 2012.

Panduan Umum tentang Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan merupakan panduan berikutnya yang kami susun. Kami melakukan advokasi kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini. Hasilnya, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK nomor 115 tahun 2013 tentang Tata-Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. PMK ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan (pasal 31A) untuk membuat petunjuk teknis pemanfaatan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota sebesar 50% dari total penerimaan.

Pindah tugas, isu mengikuti

Dengan berjalannya waktu, pada bulan Juni 2015 saya mendapat penugasan baru dari Ibu Nila Moeloek, Menteri Kesehatan berikutnya, sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2 PTM). Ternyata di tempat baru ini pun saya masih berurusan dengan pengendalian tembakau. Kedekatan saya dengan isu tembakau terus berkelanjutan.

Pada masa ini, isu rokok elektronik mulai marak. Promosi isu yang diangkat adalah bahwa rokok elektronik mempunyai dampak kesehatan yang lebih kecil daripada rokok konvensional, dan bahkan dapat membantu perokok untuk berhenti merokok. Padahal, cairan rokok elektronik tetap mengandung nikotin dan justru dapat ditumpangi berbagai bahan lain yang membahayakan.

Kementerian Keuangan bergerak cepat dengan memberlakukan cukai untuk rokok elektronik dan meminta agar Kementerian Kesehatan merekomendasikan jenis rokok-rokok elektrik yang aman. Tentu saja hal ini menjadi masalah baru karena Kemenkes dan Badan POM justru ingin melarang beredarnya rokok elektronik ini. Titik tengah pembahasan persoalan ini tidak kunjung ditemukan.

Dengan makin beragamnya produk hasil tembakau dan makin maraknya berbagai iklan rokok di berbagai saluran media dan kecenderungan pelanggaran-pelanggaran dari industri tembakau, maka tantangan dalam pengendalian tembakau semakin meningkat. Peraturan yang lebih kuat sudah mendesak untuk dibuat. Sejalan dengan itu, wacana merevisi PP 109 mulai bergulir di tahun 2017.

Pajak rokok, mudah dibelok

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 102/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, Direktorat PTM menindaklanjuti dengan menyiapkan materi dan turut menyusun Permenkes nomor 40 tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Pada pasal 2.3 disebutkan bahwa paling sedikit 75% dana digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini menimbulkan rasa lega bahwasanya pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat akan dapat berlangsung berkesinambungan dengan kucuran dana tersebut. Permenkes dimaksud rampung pada Agustus 2016, yang dilanjutkan sosialisasi ke daerah-daerah secara *roadshow* di 6 regional wilayah Indonesia bersama Kemendagri dan Kemenkeu.

Namun sangat disayangkan, belum lama kami selesai melakukan *roadshow*, pertengahan 2017 mulai gonjang ganjing dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus defisit karena semakin meningkatnya pembiayaan JKN, dan rupanya pihak pengelola JKN, yaitu BPJS mengusulkan kepada Kemenkeu untuk dapat mengalihkan penggunaan dana pajak rokok untuk JKN.

Bagaimana nasib pajak rokok yang sudah diatur sebelumnya ini? Pada November 2017, Kemenkes menerbitkan Permenkes nomor 53 tahun 2017 sebagai revisi dari Permenkes nomor 40/2016. Nasib penggunaan pajak rokok berpindah untuk pendanaan program jaminan kesehatan masyarakat nasional sebesar 75% dari alokasi dana pelayanan kesehatan. Saya mengakhiri tugas saya di Kementerian Kesehatan pada 1 Februari 2018. Purna tugas formal, namun pengendalian tembakau tetap menjadi misi personal. Entah kapan bola berjalan lebih cepat dan kepentingan lebih berpihak pada kehidupan yang sehat, namun setitik keyakinan pada kebaikan pantas digenggam setiap saat.

KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU DESAK PEMERINTAH REVISI PP 109/2012

Posted September 02, 2020 Author Administrator Category Berita



Foto: Desakan Komnas Pengendalian Tembakau agar pemerintah dapat segera revisi PP 109/2012 pada tahun 2020.

Sumber: komnaspt.or.id



Kisah Para Pejuang

GIANT PACK OF LIES: PRAKTIK MENYESATKAN INDUSTRI TEMBAKAU

Oleh: Mardiyah Chamim

Penulis buku *The Giant Pack of Lies*



Dalam dunia pengendalian tembakau yang terus berkembang, saya berusaha memberikan kontribusi dalam mengungkap praktik menyesatkan industri tembakau. Sebagai seorang jurnalis dengan banyak pengalaman, saya memulai perjalanan yang akan mengekspos taktik manipulatif dan klaim palsu dari industri tembakau. Melalui buku yang saya tulis, "*Giant Pack of Lies*," saya berusaha memberikan perspektif baru mengenai pengendalian tembakau, melampaui masalah yang hanya terkait dengan kesehatan. Lalu, bagaimana kisah kolaborasi dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan dampak lebih luas dari buku ini terhadap gerakan pengendalian tembakau di Indonesia?

Pengembaraan untuk Menemukan Kebenaran

Sebagai seorang jurnalis yang pernah bekerja untuk Tempo, saya merasa tertarik dengan misteri pengendalian tembakau. Meskipun tidak secara resmi terlibat dengan Komnas PT, keingintahuan untuk menyelidiki manuver industri tembakau membawa saya



Foto: Buku karya Mardiyah Chamim.

pada pencarian untuk mengungkap kebenaran tersembunyi. Ketertarikan ini mendorong saya untuk menulis "*Giant Pack of Lies*," sebuah buku yang membuka mata dan menjadi pijakan dalam wacana pengendalian tembakau.

Terlihat dari judulnya "*Giant Pack of Lies*" berusaha membongkar dokumen internal tentang praktek industri tembakau. Bagaimana kami menggali praktek-praktek buruk dari industri tembakau melalui dokumen mereka sendiri. Itulah yang menjadi *highlight*.

Buku ini mengupas sejarah masuknya tembakau ke Indonesia dan pernyataan yang salah terkait tembakau, terutama yang mendukung industri tembakau, menjadi perhatian utama. Masyarakat Indonesia memiliki banyak miskonsepsi tentang tembakau yang sudah ketinggalan zaman. Contohnya, di Amerika dulu lazim menggunakan perempuan sebagai objek pemasaran rokok, dokter-dokter pun memandang konsumsi rokok sebagai sesuatu yang normal. Tapi, itu dulu. Amerika sudah berubah seiring banyaknya penelitian yang membuktikan bahaya rokok. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih banyak yang jalan di tempat. Dalam buku itu juga dijelaskan tentang upaya Menteri Kesehatan Indonesia untuk meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang gagal. Pengendalian tembakau di Indonesia menjadi sulit karena industri tembakau melakukan banyak intervensi terhadap pemerintah.

Giant Pack of Lies: Mengurai Tipu Daya

"*Giant Pack of Lies*" mencatat sejarah masuknya tembakau ke Indonesia dan mengungkap strategi pemasaran menyesatkan industri tersebut. Dari memanipulasi persepsi publik hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah, jaringan tipu daya industri tembakau terungkap melalui dokumen internal yang diperoleh dari arsip University of California Berkeley dan University of California San Francisco. Bekerja sama dengan rekan sesama jurnalis, Arif Gaban dan Alfian Hamzah, buku ini berusaha mengungkap kebenaran di balik taktik industri tembakau.

Data yang kami gunakan adalah puluhan ribu dokumen yang disita oleh pengadilan Amerika, yaitu dokumen internal industri rokok itu sendiri. Dalam penulisan buku

tersebut, Komnas PT yang saat itu diwakili oleh Bu Tutik, juga sangat mendukung dan menyediakan data-data yang kami butuhkan. Buku tersebut fokus pada dokumen-dokumen dari industri tembakau, sehingga kami perlu melengkapi dengan data-data yang ada di lapangan. Komnas PT memberikan banyak bantuan dan juga mendampingi kami dalam diskusi-diskusi untuk memahami dan menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut. Kerjasama dengan Komnas PT dan peran Bu Tutik sangat berarti bagi keberhasilan proyek ini.

Lebih dari Sekadar Kesehatan: Perubahan Perspektif

Buku "*Giant Pack of Lies*" memperluas diskusi tentang pengendalian tembakau di Indonesia. Alih-alih hanya berfokus pada masalah kesehatan, buku ini membahas isu anti-korupsi, manipulasi sosial, dan eksploitasi kelompok rentan. Saya menyoroti dampak industri tembakau pada petani dan pekerja, serta pengaruhnya terhadap para pembuat kebijakan.



Foto: Pawai di Car Free Day dalam Rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2010.

"*Giant Pack of Lies*" memicu diskusi dan menginspirasi tindakan di kalangan berbagai individu dan kelompok. Peneliti, aktivis, musisi, bahkan seniman komik bergabung dalam gerakan pengendalian tembakau, masing-masing memberikan kontribusi perspektif unik mereka. Komnas PT memainkan peran penting dalam membina suara-suara baru ini dan memperluas wacana

melalui lokakarya dan kolaborasi.

Sebutlah Muhammadiyah yang melakukan penelitian tentang petani dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) yang membahas kajian-kajian ekonomi untuk mendorong kebijakan pajak dan cukai yang lebih progresif. Tidak ketinggalan juga, Pak Hasbullah Thabrany dan timnya yang fokus pada asuransi kesehatan, khususnya biaya kesehatan akibat rokok. Dengan semakin meluasnya dukungan ini, gerakan pengendalian tembakau menjadi semakin kuat. Tidak hanya itu, peran Mas Rohani Budi Prihatin dalam advokasi parlemen juga sangat berarti dalam perjuangan ini. Semua pihak tersebut memberikan kontribusi berarti dalam gerakan ini.

Perjuangan Melawan Campur Tangan Industri

Penerbitan "*Giant Pack of Lies*" tidak berjalan mulus. Beredar desas-desus tentang campur tangan industri, dengan klaim bahwa buku tersebut secara misterius menghilang dari peredaran. Namun yang terjadi tidak seperti itu.

Pada waktu penerbitannya, kami memang mencetak terbatas sejumlah 3.000 eksemplar dan mendistribusikan secara independen melalui Komnas PT dan Aliansi Jurnalis Indonesia—khususnya AJI Jakarta. Awalnya kami berharap buku ini bisa masuk ke toko buku besar. Namun, kemudian industri tembakau mulai menelpon dan bertanya tentang buku ini, antara lain tentang di mana bisa dibeli dan berapa eksemplar yang dicetak. "Keterarikan" dari industri ini membuat kami khawatir terhadap apa yang akan mereka lakukan kalau buku tersebut sampai masuk ke toko buku besar.

Oleh karena itu, kami memilih untuk mencetak sendiri dan mendistribusikannya kepada jaringan-jaringan yang tertarik. Selain itu, PDF dan e-book dari buku tersebut juga dibagikan secara luas. Dengan begitu, buku tersebut tidak harus terpaku pada jaringan toko buku dan sekarang, *e-book* nya pun sudah tersebar luas, sehingga tidak perlu mencetak versi fisiknya.

Setelah buku itu ditulis dan dipublikasikan, publik sepertinya baru terbuka matanya dan mulai membicarakan aspek anti korupsinya, manipulasi iklannya, pengaruhnya terhadap anak muda yang dimanipulasi, dan bagaimana tekanan sosial digunakan di kalangan anak-anak muda. Ada juga yang menyoroti soal bagaimana petani dan buruh tembakau dijadikan "tameng" oleh industri setiap ada regulasi baru tentang rokok. Semakin banyak pembahasan dan perdebatan yang terjadi.

Melalui buku ini saya berusaha mengungkap kebohongan-kebohongan tersebut. Mengenai praktek-praktek manipulatif melalui iklan-iklan yang tidak berdasar, juga mengenai intervensi kebijakan yang diungkap melalui dokumen-dokumen itu, juga korupsi-korupsi yang mereka lakukan dengan mempengaruhi *policy makers* khususnya dirjen bea cukai, dan seterusnya. Satu contoh kecil adalah mengenai hilangnya ayat tembakau di Undang-Undang Kesehatan yang sudah disahkan di pleno DPR pada saat itu.

Masa Depan yang Menantang

Saat ini, ketika kita memperingati 25 tahun berdirinya Komnas PT, saya menekankan pentingnya memperkuat jaringan dan terus melibatkan generasi muda. Saya berharap

dapat menyaksikan lebih banyak buku menyoroti berbagai sudut pengendalian tembakau, yang ditulis dengan gaya populer dan mudah dibaca. Dengan menjaga pendekatan yang luas dan kreatif, gerakan ini dapat terus memperluas dampaknya dan secara efektif melawan praktik menyesatkan industri tembakau.

Saya ingin mengapresiasi Komnas PT yang berhasil membuat gerakan ini meluas dan bukan semata soal kesehatan. Hal ini menjadi dukungan bagi Komnas PT yang mendorong penelitian, mendorong orang-orang muda, musisi, dan komikus, untuk bersama-sama menyuarakan hal ini, termasuk juga asosiasi korban dan petani tembakau. Saya pikir perlu digaris bawahi bahwa Komnas PT tidak hanya menyoroti bidang kesehatan.

Semoga publik bisa melihat bagaimana peranan Komnas PT dalam satu dekade, atau mungkin lebih, dalam meluaskan jejaring itu, sehingga pembicaraan *tobacco control* tidak lagi semata-mata tentang kesehatan.

Saya berharap penulisan buku "*Giant Pack of Lies*" bisa menjadi tonggak dalam gerakan pengendalian tembakau di Indonesia. Melalui jurnalismenya yang menyelidiki dan kolaborasi dengan Komnas PT, kami berusaha mengungkap praktik menyesatkan industri tembakau dan membuka pintu bagi diskusi yang lebih luas, mendorong peneliti, seniman, dan aktivis untuk bergabung dalam perjuangan melawan dampak merugikan tembakau.



Kisah Para Pejuang

MEMBANGUN KAMPANYE PENGENDALIAN TEMBAKAU DARI SERPIHAN

Oleh: **Nina Samidi**

Co-founder Smoke-Free Agents - SFA

- sekarang Social Force in Action for Tobacco Control



Sekitar bulan Mei 2013, saya resmi masuk Komnas Pengendalian Tembakau sebagai Media & Communication Officer, tepat saat setiap anggota tim sedang mempersiapkan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Saya belum terlalu paham dengan prinsip-prinsip pengendalian tembakau saat itu, sehingga saya panik ketika saya harus menyusun siaran pers mewakili Komnas Pengendalian Tembakau. Apa yang harus saya tulis? Bagaimana saya bisa menulis pernyataan dari sebuah nama besar dan penting padahal saya tidak tahu apapun? Saat itu saya mulai menyadari, perjuangan di isu ini adalah perjalanan sepi tanpa pasukan. Sehingga siapapun diharapkan bergabung dan turut berjuang, setidak-penting-apapun sosok yang bergabung, semua jadi penting dan dapat berperan.

Maka mulai belajar lah saya (dengan sungguh-sungguh) tentang pengendalian tembakau. Hal pertama yang saya sadari adalah betapa banyaknya fakta seputar isu rokok yang terpendam selama ini, yang nyaris tidak pernah saya dengar di ruang-ruang publik.

Bagai sebuah gunung es, masalah rokok di Indonesia yang terlihat di permukaan hanyalah pucuk gunung yang dikuasai industri rokok, sedangkan fakta yang sesungguhnya selama ini terpendam di bawah laut tanpa orang peduli. Betapa mitos-mitos yang digulirkan industri rokok telah menutup semua fakta dan membalik kenyataan yang ada; mulai dari soal petani, soal pekerja di industri rokok, sampai soal kerugian yang begitu besar akibat industri produk adiktif ini.

Kesadaran ini membawa saya pada kesimpulan: 1) fakta-fakta yang ada harus diangkat untuk membuka mata masyarakat Indonesia yang selama ini terlena dengan omong kosong industri, 2) fakta-fakta ini tidak pernah muncul karena tidak ada yang mengampunyekannya secara fokus dan konsisten.

Dari kesadaran dan kesimpulan di atas, sepuluh tahun yang lalu, di bawah Komnas Pengendalian Tembakau, saya pun mulai bergerak secara khusus untuk melakukan kampanye bersama rekan-rekan di isu pengendalian tembakau.



Di tengah tantangan besarnya ‘kepercayaan’ masyarakat Indonesia terhadap kampanye pencitraan industri rokok yang bombastis, kami mengais-ngais harapan, mengumpulkan pasukan-pasukan mini untuk melakukan kampanye kecil-kecil dengan berbagai cara.

SFA dan Para Pejuang Muda

Di tahun 2014, saya bersama Hasna Pradityas dan Yosef Rabindanata, dua anak muda yang tadinya secara random membuat gerakan di media sosial melalui akun Twitter @BebasRokok_ID (akun ini akhirnya mati karena sulit mengembalikan status *suspended*) yang kala itu sangat cepat mendapatkan followers, “kasak-kusuk” mengenai butuhnya kita sebuah komunitas terbuka anak-anak untuk pengendalian tembakau. Maka lahir komunitas Smoke-Free Agents (SFA). Didukung penuh Komnas Pengendalian Tembakau, komunitas yang berisi sekumpulan anak muda dari kelompok yang berbeda yang sepakat untuk membesarkan suara mereka dalam sebuah komunitas ini akhirnya terbentuk.

SFA lahir ketika media sosial mulai bergeliat di Indonesia. Setelah melakukan observasi dan memantau gerakan pembicaraan seputar isu rokok di *platform* Twitter, saya menemukan beberapa akun yang secara sporadis melakukan kampanye anti-rokok; mulai



Foto: Aksi damai di Car Free Day yang dilakukan oleh Smoke Free Agent dan anak muda lainnya.

dari teman-teman di *straight edge*, gerakan di daerah-daerah, seperti Depok (@BebasRokok_ID), Bogor (Komunitas Anti Rokok Indonesia - KARI), Bandung (Bebas Rokok Bandung), dst, yang semuanya digerakkan anak muda. Saat itu, saya merasa sangat termotivasi, saya terkesima dan tercerahkan betapa ternyata ada anak-anak muda yang bergerak sendiri secara organik menyuarakan

masalah rokok di lingkaran mereka, yang dilakukan semampu mereka.

Dengan semangat yang justru saya dapatkan dari anak-anak muda yang kemudian saya hubungi satu per satu ini, maka saya kumpulkan mereka dalam sebuah pertemuan sederhana. Dalam pertemuan itulah kemudian mereka tahu bahwa mereka tak sendiri, ternyata ada teman-teman yang punya kekhawatiran yang sama tentang konsumsi rokok yang begitu masif di Indonesia. Mereka pun bersepakat untuk bekerja sama, saling dukung, dalam mengedukasi publik tentang masalah rokok.

Kampanye anak muda di media sosial untuk pengendalian tembakau pun mulai mengalir sejak itu. Narasi-narasi yang mengimbangi mitos-mitos yang digaungkan industri mulai bermunculan. Sedikit demi sedikit muncul berbagai dukungan. Sementara itu, secara konsisten Komnas Pengendalian Tembakau memberikan penguasaan isu dan penguatan substansi dengan menyampaikan data-data, informasi terkini, dan membuat kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas untuk para pemuda hebat yang berjibaku di balik layar.

Tentu saja, industri rokok tak tinggal diam. Menyusul, mereka pun menciptakan akun-akun *front groups* untuk menebas narasi-narasi kesehatan dan ekonomi yang ditampilkan anak-anak SFA dengan masing-masing gerakannya di komunitas. Sekitar tahun 2014 - 2015, akun-akun *front groups* pembela industri rokok bermunculan dan berkampanye lebih keras, lebih terorquestra, dan lebih intens sampai saat ini.

Suara-Suara Baru untuk Pengendalian Tembakau

Tarik menarik di media sosial di tahun-tahun tersebut tidak pernah kering dari pertempuran antara para pejuang organik di dalam SFA dan akun-akun *front groups* industri rokok. Betapa keras perlawanan yang diberikan *front groups* industri, kampanye ini sepadan dengan hasilnya.

Gerakan anak muda yang tergabung dalam SFA adalah inisiasi awal kampanye publik secara digital maupun tatap muka yang kemudian menginspirasi berbagai gerakan kampanye lainnya oleh anak-anak muda yang lebih terorganisir dan bergerak lebih luas, seperti FCTC Indonesia, TC Warriors, 9cm, dan sampai kini muncul lebih banyak lagi, seperti Pemuda Penggerak, Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Aksi Kebaikan, dst. Jatuh bangun SFA telah menjadi contoh praktik kampanye pengendalian tembakau di Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak muda sendiri, secara terbuka, penuh keberanian, dan cerdas.

Dalam sepuluh tahun ini, saya pribadi merasakan mulai adanya perubahan. Ketika kita bersikap “anjing menggonggong, kafilah berlalu” untuk kampanye-kampanye yang dijalankan para pembela industri rokok, dan fokus pada edukasi publik dengan menampilkan data-data *scientific*, publik pun mulai paham duduk perkara di gunung es masalah rokok di Indonesia. Perdebatan di ranah publik tak lagi hanya dikuasai argumentasi pembela industri, namun juga argumentasi publik cerdas yang lebih percaya pada data dan fakta dibanding mitos-mitos yang disebarakan industri melalui para pembelanya.

Liputan media pun semakin ke sini semakin berimbang. Media netral telah bersikap adil dengan turut menaikkan pemberitaan-pemberitaan yang mendukung upaya pengendalian tembakau. Mereka tidak hanya mementingkan iklan rokok (*sebagai informasi, iklan rokok telah dihapus di hampir semua negara di seluruh dunia*), namun juga suara dari perspektif pengendalian tembakau demi memberi ruang keadilan bagi masyarakat untuk

Dalam sepuluh tahun ini, saya pribadi merasakan mulai adanya perubahan. Ketika kita bersikap “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

mendapatkan informasi yang berimbang, atau bahkan yang lebih berpihak pada upaya perlindungan masyarakat dari produk zat adiktif.

Apakah artinya kini kampanye publik untuk pengendalian tembakau sudah menang? Saya optimis, kita sedang menuju ke sana.

Dari Kampanye Publik ke Kebijakan

Kampanye pengendalian tembakau di Indonesia adalah salah satu kampanye yang

sangat kompleks. Kita tidak hanya berhadapan dengan industri rokok dengan strategi-strategi yang didukung anggaran tak terbatas, namun juga harus berhadapan dengan masyarakat yang selama ini terlanjur terjebak pada mitos, dan lebih sulit lagi, berhadapan dengan Pemerintah serta wakil rakyat di parlemen yang seringkali ketakutan ketika harus bersikap tegas kepada industri zat adiktif ini. Jadi, kita berdiri sendirian.



Foto: Penyerahan dokumen aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibuslaw di DPR RI, 2023.

Komnas Pengendalian Tembakau yang fokus pada advokasi kebijakan menyadari bahwa edukasi tidak akan mengubah apapun soal konsumsi rokok di Indonesia. Jungkir-balik kampanye kepada anak muda dan anak sekolah, selalu dijegal dengan kebijakan yang bertolak belakang. Maka, kampanye publik tidak lagi hanya berperan untuk mengedukasi masyarakat dengan data-data dan

fakta, namun perannya meningkat. Kampanye publik pengendalian tembakau juga harus mampu mendorong masyarakat untuk ikut bergerak dalam upaya kebijakan. Publik cerdas yang telah melihat bagian gunung es di bawah air, diharapkan bersuara sebagai bagian dari advokasi kebijakan.

Itulah mengapa, pada peringatan kelahirannya yang ke-25 ini saya berharap Komnas Pengendalian Tembakau bersama jaringan yang bergerak di isu yang sama, mampu bernapas lebih panjang lagi. Lima belas tahun pertama yang fokus pada “mendudukkan persoalan”, lalu sepuluh tahun berikutnya mulai terbuka dengan kampanye publiknya, maka di tahun-tahun yang akan datang haruslah mampu mengolah semua sumber daya untuk mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang berpihak pada masyarakat. Semua sumber daya artinya semua pihak, penting-tidak penting, digandeng dan memiliki amunisi yang mumpuni untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau yang ideal seperti di negara-negara besar lainnya.



Foto: Kampanye #RokokHarusMahal dengan menggambarkan asbak membakar uang di salah satu mal besar, Jakarta pada HTTS 2018.



Kisah Para Pejuang

CERITA DIPLOMASI DARI BALI

Oleh: Nurul Luntungan

Sekjen APACT ke-12 Bali



Catatan Kecil Pekerjaan Besar

Mengurus seribu lebih anggota rombongan dari 23 negara untuk sebuah pertemuan internasional tentu bukan perkara mudah—mulai dari mengurus ruang pertemuan, perlengkapan yang dibutuhkan, hingga menu masakan vegeterian, yang kadang masih saja mendapatkan komplimen dan keluhan. Namun, itulah yang juga menjadi tugas saya sebagai sekretaris jenderal Asia Pacific Association for Control of Tobacco (APACT) yang memimpin tim implementasi hingga jadi jembatan antara ketua, presiden APACT, dan *steering committee* dalam rangka konferensi Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ke-12 atau APACT 12th yang saat itu dihelat di Bali.

Semua itu belum termasuk menghitung urusan abstrak tulisan atau *paper* yang dikirimkan dari banyak peserta dari berbagai negara yang amat beragam judulnya, tapi kadang-kadang mirip isinya. Untungnya saya bekerja dengan tim kecil yang luar biasa militan. Mereka lah yang bekerja keras, bergerilya dari siang sampai malam demi menghasilkan sebuah konferensi yang memuaskan. Selain itu, buat saya pribadi, bekerja bersama

legenda-legenda pengendalian tembakau juga menjadi pengalaman yang amat berkesan dan terlalu berharga untuk dilupakan.

“Untungnya ‘serangan’ atau gangguan yang kami dapat hanya sebatas media sosial atau pemberitaan publik.”

Salah satu hal yang juga menarik adalah saat kami membuat strategi mitigasi risiko kalau sampai kegiatan ini diganggu atau diserang oleh industri rokok atau *pressure group* yang selalu mengganggu upaya pengendalian tembakau dengan mengatasnamakan petani tembakau. Padahal di acara ini, kami juga mengundang petani tembakau untuk bersuara dan memberikan pendapat. Saat itu, kami bahkan perlu untuk membuat pengarahan khusus kepada tim pengamanan dan membuat skenario-skenario terburuk beserta mitigasinya. Untungnya ‘serangan’ atau gangguan yang kami dapat hanya sebatas media sosial atau pemberitaan publik.



Foto: Konferensi pers menuju APACT ke-12 di Bali.

Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) adalah konferensi dua tahunan yang menjadi *platform* di mana delegasi tingkat tinggi dan *stakeholder* kunci bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan kemitraan dan strategi untuk pengendalian tembakau di negara-negara Asia Pasifik—untuk mengakhiri epidemi tembakau. APACT pertama diselenggarakan di

Taiwan pada 12 Juni 1989 dan berlangsung hingga sekarang. Kawasan Asia Pasifik tercatat sebagai wilayah yang paling tinggi konsumsinya di dunia. Kawasan ini telah menjadi target industri rokok transnasional untuk mengembangkan bisnisnya. Inilah yang mendorong aliansi dan kemitraan para pihak di kawasan Asia Pasifik untuk bergerak dalam mengontrol tembakau.

Tuan Rumah dengan Catatan-catatan

Pada 2016, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah APACT 12th, meski catatannya dalam bidang pembatasan tembakau tidak bisa dikatakan cemerlang. Seperti yang kita

ketahui, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control yang dikeluarkan badan kesehatan PBB WHO. Namun, di sisi lain sebenarnya Indonesia berhasil menggolkan berbagai kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan undang-undang yang sebenarnya selaras dengan konvensi WHO tersebut, tentunya berkat advokasi yang tak kenal lelah. Interfensi industri tembakau di Indonesia juga dianggap cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan pengendalian tembakau. Ini misalkan tampak pada penyusunan *roadmap* industri tembakau yang lebih condong berpihak pada industri dan bertentangan dengan kesehatan masyarakat. Jangan lupa juga insiden ‘ayat yang hilang’ dalam rancangan undang-undang kesehatan.

Toh itu semua tidak membuat surut niat untuk menjadi tuan rumah. Komisi Nasional Pengendalian Tembakau yang berperan sebagai *host* lantas segera menggandeng organisasi-organisasi mitranya sebagai *co-host* seperti Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan CISDI. Beberapa pihak lain, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra-mitra internasional juga turut diajak.

“
Penyelenggaraan
APACT 12th juga
mendapatkan pengakuan akan
kemampuan Indonesia untuk
menyelenggarakan konferensi
berstandar internasional.
”



Ada juga beberapa keraguan yang cukup menyeruak dari berbagai pihak mengenai penyelenggaraan ini. Thailand bahkan talh menyatakan siap menjadi tuan rumah, jika Indonesia gagal mempersiapkan diri. Namun, kami terus mengupayakan persiapan yang terbaik. Almarhum Pak Arifin Panigoro yang juga menjadi pembina Komisi Nasional Pengendalian Tembakau juga ikut bergerilya memperkuat dukungan tersebut, utamanya dari sektor dalam negeri.

APACT 12th akhirnya terselenggara dan menjadi momentum yang menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki kapabilitas dan komitmen dalam negeri yang luar biasa dan berkualitas. Penyelenggaraan APACT 12th juga mendapatkan pengakuan akan kemampuan Indonesia untuk menyelenggarakan konferensi berstandar internasional.

Tiada Presiden, Menteri Pun Jadi: APACT 12th dan dampaknya

APACT 12th menunjukkan beberapa hasil positif, meski tidak dapat menghadirkan presiden atau wakil presiden dalam penyelenggaraannya. Secara regional, konferensi ini berhasil memperkuat upaya pengendalian tembakau di Asia Pasifik dengan gerakan kaum muda yang sepenuhnya dipimpin dan ditujukan untuk kaum muda. Di sisi yang lain, penyelenggaraan konferensi ini juga menjadi platform untuk menunjukkan posisi, situasi dan dinamika Indonesia dalam pergerakan pengendalian tembakau di level internasional. Beberapa tantangan dan keberhasilan Indonesia dalam pengendalian tembakau tentu saja bisa menjadi pelajaran untuk pergerakan di tempat yang lain.

“Kepuasan juga disampaikan oleh panitia pengarah, para donor, dan peserta APACT 12th. Kehadiran beberapa menteri juga berhasil mencuri perhatian sehingga masuk menjadi headline di media cetak nasional.”

Akan tetapi yang lebih penting dari itu, APACT 12th sebenarnya juga dapat digunakan untuk konsolidasi advokasi dan arena meraih dukungan dari dalam negeri. Dalam konferensi ini kita misalkan berhasil mendatangkan beberapa menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. Dari suara para delegasi, baik dalam maupun luar negeri kita berhasil menggaungkan dan menunjukkan kepada mereka betapa pentingnya pengendalian tembakau baik untuk kesehatan masyarakat yang amat esensial maupun untuk pencapaian agenda-agenda politik, misalkan target-target pembangunan global seperti SDGs. Dengan pendekatan multisektor, kita bisa menunjukkan kepada wakil-wakil pemerintah dan *stakeholders* lainnya bahwa pengendalian tembakau amat penting dan selaras dengan agenda pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

APACT 12th juga adalah cerita mengenai kerja sama global lintas sektor yang mengikis batas-batas. Kesuksesannya adalah kisah manis kerja sama antara tamu-tamu dan penyelenggara yang memberikan kontribusi terbaik dan partisipasi aktifnya. Kami sebagai penyelenggara berupaya keras untuk memberikan informasi dan menjalin komunikasi yang jelas dan *respectful*. Mendapatkan narasumber-narasumber serta anggota tim dari kalangan profesional (Google, misalnya, membantu untuk *youth campaign*) yang mau membantu secara *pro bono* untuk kegiatan konferensi merupakan berkah luar biasa yang membuat kami terharu. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan pengendalian tembakau adalah gerakan yang memang dibutuhkan dan menjadi isu bersama. Kerja sama lintas batas ini juga menunjukkan bahwa kita bisa tetap bergerak dalam segala keterbatasan yang ada.

Akhir manis pasca-konferensi

Secara umum APACT 12th berhasil terselenggara dengan sukses. Seluruh kegiatan berjalan baik dan lancar hingga usai. Jumlah peserta melebihi target. Dan konferensi juga berhasil menghadirkan narasumber, tamu, dan perwakilan dari lintas sektor. Jadi amat bervariasi. Kepuasan juga disampaikan oleh panitia pengarah, para donor, dan peserta APACT 12th. Kehadiran beberapa menteri juga berhasil mencuri perhatian sehingga masuk menjadi *headline* di media cetak nasional.

Penyelenggaraan APACT 12th tidak hanya memberikan dampak pada upaya pengendalian tembakau dalam negeri, tapi juga memperkuat upaya yang dilakukan di Asia Pacific, terutama dengan adanya gerakan *youth campaign* yang dipimpin anak muda dan untuk anak muda. Melalui *Youth Campaign* ini, puluhan anak muda terpilih dari negara Asia Pasifik mendapatkan pelatihan dan mengembangkan kampanye “*Choose Youth Not Tobacco*” yang diluncurkan di APACT 12th dan dilanjutkan di negaranya masing-masing. Kampanye ini menekankan bahwa anak muda, yang selama ini menjadi objek target penjualan produk tembakau, menyuarakan pendapatnya dan mengajak para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memilih anak muda dengan memperkuat kebijakan pengendalian tembakau.

Selamat ulang tahun Komnas PT! Selalu semangat memperjuangkan hak bangsa ini untuk dapat sejahtera tanpa belenggu industri rokok yang merugikan jutaan anak dan warganya. Semoga perjuangan pengendalian tembakau di Indonesia terus memberikan dampak positif yang semakin luas.



Kisah Para Pejuang

CATATAN AWAL SANG SEKRETARIS

Oleh: Ratu Siti Sapura

Sekretaris Komnas Pengendalian Tembakau Sejak 1999



Ketika menjawab iklan lowongan pekerjaan Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok (yang sekarang kita kenal sebagai Komnas Pengendalian Tembakau) di surat kabar *Peluang* pada tahun 1999, saya pikir ini akan jadi pekerjaan yang sama saja dengan pekerjaan lain. Ternyata saya salah!

Awalnya, ada 30 orang pelamar yang memperebutkan satu posisi sebagai staf administrasi di Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok. Dari jumlah yang lumayan banyak itu, alhamdulillah saya terpilih setelah melalui berbagai tes. Saya adalah lulusan D3 Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia di Jakarta yang sebenarnya tidak mengetahui banyak tentang apa pekerjaan yang akan saya lamar tersebut. Akan tetapi, saya ingat pada lowongan pekerjaan itu tercantum alamat Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga saya berpikir bahwa pekerjaan ini pastilah akan menyangkut masalah kesehatan masyarakat Indonesia.

Saya sebenarnya sudah memiliki banyak pengalaman bekerja sebagai sekretaris di beberapa perusahaan swasta sebelumnya seperti perusahaan pelayaran, perusahaan Korea, hingga perusahaan ekspor-impor *water meter*. Jadi, baru kali itulah saya bekerja dengan

organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Menjadi sekretaris Komnas PT ternyata menjadi salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Bagaimana tidak? Begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan selama ini, mulai dari yang seru sampai yang haru. Pekerjaan ini bagi saya adalah anugerah dan ladang ibadah yang sangat saya syukuri dan nikmati. Semua itu mungkin tidak akan saya dapatkan di pekerjaan lain.



Foto: Audiensi pengurus Komnas PT dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, 2011.

Kesan Bermakna

Salah satu kegiatan yang paling berkesan adalah ketika saya mendampingi para pengurus Komnas PT dalam rangka audiensi di Istana Negara dengan bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Istana Negara dengan Ibu Negara. Menurut saya, pertama kali HTTS diselenggarakan di Istana Negara merupakan momen yang luar biasa membanggakan.

Pengalaman yang tidak kalah berkesan adalah saat mengawal RUU Pertembakauan. Setiap minggu saya dan tim Komnas lainnya, yaitu Yudha, Bob, Dian, dan Dino, turut memonitor, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyampaikan aspirasi, sampai ke *follow up* untuk berbagai hal.

Pernah juga mengalami hal yang seru dan menegangkan ketika saya turut mengawal RUU Pertembakauan, mulai dari aksi dicegat Pamdal, mengikuti sidang paripurna untuk memantau perkembangan RUU Pertembakau, sampai melihat aksi mahasiswa menyuarakan aspirasi menolak RUU tersebut. Pengalaman seperti ini tentunya tidak pernah saya dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya.

Berkegiatan dengan Dana Terbatas

Waktu Komnas PT belum memiliki donor tetap, kami fokus melakukan advokasi dan lobi kepada pemimpin kebijakan, kemudian mencari dana melalui WHO dan donor lain yang peduli dengan isu rokok. Walaupun kami hanya memiliki dana terbatas, tetapi semangat para pengurus untuk melakukan advokasi sangat tinggi sehingga berhasil diterima audiensi untuk menyampaikan aspirasi oleh banyak para Menteri dan anggota legislatif.



Foto: Kegiatan HTTS pada tahun 1999.

Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di masa silam antara lain adalah mendorong pemerintah menandatangani FCTC, memberikan masukan atas PP 81 Tahun 1999, mendorong diterbitkannya perda KTR di daerah-daerah, pembatasan iklan rokok di media massa, kampanye, dan berbagai aksi damai.

Walaupun dulu bisa dikatakan bahwa saya bekerja sendiri di Komnas, dalam setiap kegiatan apapun saya selalu dibantu oleh staf dan pengurus organisasi Anggota Komnas PT, seperti Yayasan Jantung Indonesia, PB IDI, Yayasan Kanker Indonesia, dan Yayasan Stroke Indonesia. Pada masa itu, gerakan *tobacco control* masih dilakukan Komnas PT dengan LM3, tapi syukurlah sekarang sudah banyak organisasi atau lembaga-lembaga yang ikut aktif dalam pengendalian tembakau. Hal ini mengisyaratkan semakin banyak elemen masyarakat dan organisasi yang peduli dan waspada akan dampak bahaya rokok bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Perjuangan Demi Peraturan

Komnas PT tidak pernah berhenti bergerak untuk memperjuangkan tujuannya. Pada awal berdirinya, Komnas PT sudah ikut memperjuangkan dan aktif dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Semua kegiatan dilakukan untuk fokus dalam melindungi dan menyelamatkan generasi sekarang dan masa depan dari dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diakibatkan konsumsi dan paparan asap rokok.

Selain mengawal dan menyampaikan aspirasi dalam pembuatan Peraturan Pemerintah, Komnas PT juga memperjuangkan dan mendorong penandatanganan dan akses FCTC. Kami sudah mengirimkan surat kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Kesehatan dan Presiden untuk segera mengirim wakilnya menandatangani dan mengakses FCTC. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Begitu Banyak Sukacita

Selama 24 tahun saya bekerja di Komnas, bagi saya lebih banyak suka daripada duka. Bekerja berdampingan dengan para pengurus yang perhatian dan teman-teman yang

“

Bahkan banyak panitia muda yang dengan sukarela bermalam di kantor untuk persiapan acara keesokan paginya, bahkan terkadang sampai tertidur di lantai kantor. Hal-hal seperti ini membuat saya sangat terharu.

“

baik dan *solid* membuat pekerjaan terasa menyenangkan. Komnas juga memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan pejabat, selebritis, atlet sepak bola terkenal, bahkan juga menonton konser musik secara gratis.

Setiap kegiatan juga dilakukan dengan sukacita, baik itu aksi damai maupun kampanye di berbagai tempat. Persiapan untuk kegiatan-kegiatan itu membuat kami memupuk rasa saling percaya dan saling mengerti. Misalnya, saat mau acara besar, kami melakukan gladi resik dengan pengurus dan pengurus organisasi anggota serta relawan yang duduk dalam kepanitiaan. Lalu, kami mengecek tempat acara atau *venue* sampai larut malam bahkan banyak panitia muda yang dengan sukarela bermalam di kantor untuk persiapan acara keesokan paginya, bahkan terkadang sampai tertidur di lantai kantor. Hal-hal seperti ini membuat saya sangat terharu.

Dalam rangka ulang tahun Komnas PT yang ke-25, semoga semua insan yang terlibat, baik pengurus maupun staf Komnas, tetap istiqomah dalam perjuangan ini. Percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang sangat berarti bagi kesehatan Masyarakat terutama anak-anak Indonesia di masa yang akan datang. Semoga Komnas semakin jaya, terus bergerak melakukan berbagai inovasi dalam berbagai kegiatan, mewujudkan anak Indonesia yang sehat. Selamat ulang tahun Komnas PT!



Kisah Para Pejuang

ADVOKASI: ANTARA KLAIM DAN KENYATAAN

Oleh: Soewarta Kosen

Peneliti Kebijakan



Advokasi pengendalian tembakau yang dilakukan dari sisi ekonomi kesehatan sebenarnya jelas menunjukkan kerugian yang dialami negara akibat rokok. Namun, iming-iming pemasukan cukai yang tinggi membuat banyak orang menutup mata dan telinga.

Aneh tapi Nyata

Saya menggeluti bidang pengendalian tembakau sejak tahun 90-an. Utamanya yang saya lakukan adalah menganalisa kebijakan kesehatan yang terkait dengan tembakau dan dampaknya pada kesehatan dan beban penyakit. Dari situ saya bergabung dengan Komnas PT, menjadi salah satu pendiri Komnas PT bersama-sama dengan sekitar 22 organisasi dan LSM. Saya pernah menjabat jadi ketua, sekjen, dan beberapa jabatan lain.

Hampir semua negara sudah punya amunisi untuk melarang atau membatasi rokok karena mereka bergabung dan ikut menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi WHO. Anehnya, Indonesia ikut menyusun

framework tersebut, tapi tidak ikut tanda tangan. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memang masih didominasi oleh kekuatan industri tembakau.

(Bukan) Penyumbang Pajak Terbesar

Setiap saya mengikuti berbagai rapat, baik itu inter departemen, intra kementerian, antar kementerian, atau dengan DPR, hampir semua pro pada industri rokok karena rokok dianggap bisa menghidupkan ekonomi dengan bayar pajak yang “katanya” mahal. Hanya Kementerian Kesehatan yang kontra pada rokok.

Sementara itu, di luar sana industri rokok juga rajin berkampanye soal kontribusinya pada ekonomi Indonesia. Mereka menyatakan bahwa perusahaan rokok adalah penyumbang pajak terbesar. Itu adalah klaim itu menyesatkan. Rokok itu penyumbang cukai terbesar, bukan pajak. Bedanya apa? Yang dikenakan cukai itu cuma rokok dan minuman beralkohol. Cukai itu sebenarnya dikenakan pada rokok dan minuman keras untuk mengurangi dampak negatifnya. Ya, tentu saja rokok menjadi penyumbang cukai nomor satu. Hal ini hanya salah satu dari persepsi *misleading* yang disebarakan industri rokok.

Saya berikan gambaran sedikit mengenai hubungan penghasilan negara dan kesehatan masyarakatnya. Seluruh penghasilan pajak dan cukai negara kita itu sekitar 2.200 sampai 2.400 triliun rupiah. Dari jumlah itu, yang berasal dari industri tembakau sekitar 150 triliun—hanya sepersepuluhnya. Jadi, sebetulnya kita masih bisa hidup dengan baik tanpa tembakau. Lebih jauh lagi, dampak yang ditimbulkan oleh tembakau dan rokok adalah sekitar 500 triliun per tahun. Jadi, mereka menyumbang 150 triliun, tapi kita jadi harus mengeluarkan 500 triliun. Mau untung, jadi buntung.

Pengeluaran itu bisa kita lihat dari dana yang harus dikeluarkan pemerintah—lewat BPJS— untuk mengobati masyarakat yang terkena penyakit-penyakit yang terkait rokok. Mulai dari penyakit jantung, stroke, paru, kanker, beserta turunan dan cabang-cabangnya. Jadi kita benar-benar rugi sampai tiga kali lipat. Menurut saya, Komnas PT harus melakukan riset benar-benar tentang pengeluaran BPJS Kesehatan yang untuk menangani penyakit katastropik yang disebabkan rokok.

Bukan Cuma Soal Uang

Usaha untuk menggiring isu bahaya rokok ini sering tersandung dua hal. Pertama, kita kalah soal uang dari industri tembakau. Kedua, aparat pemerintah kita banyak yang



Foto: Buku karya Soewarto Kosen.

belum mengerti. Mereka tergiur angka 150 triliun rupiah tadi, jadi mereka memilih untuk pro rokok.

Soal cukai juga selalu kita mendapat pertentangan. Kalau pun kita berhasil menaikkan sedikit saja, mereka menyerang balik dengan tidak menaikkan harga rokok, tapi membayar cukai dari selisih keuntungan mereka. Jadi, konsumennya juga tenang-tenang saja karena tidak merasakan kenaikan harga.

Pernah dalam suatu rapat, ada satu kementerian yang membuat roadmap industri tembakau, supaya pada akhir pemerintahan ini kita bisa menghasilkan rokok sampai 600 miliar batang. Padahal penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta, yang merokok katakanlah 60 atau 70 juta orang. Kalau mau memproduksi 600 miliar batang, satu orang harus menghabiskan berapa batang? Tidak masuk akal dan sangat aneh.

Petaka *E-Cigarette*

Berjuang melawan industri ini memang tidak akan ada habisnya. Setiap hari mereka punya cara baru untuk memperlebar terus konsumsi rokok melalui berbagai kampanye.

Sekarang mereka maju dengan smokeless tobacco atau *e-cigarette*. Ya, betul, orang-orang di balik rokok biasa dan *e-cigarette* itu adalah orang-orang yang sama. Mereka sudah mulai melihat *sunset* dari industri rokok, maka mulai mengalihkan modalnya ke industri lainnya, misalnya elektronik. Contohnya, Polytron adalah perusahaan elektronik yang dimiliki oleh pengusaha rokok yang juga punya toko elektronik besar dan diversifikasi lain, tapi porsi rokoknya tetap besar. Buktinya survei prevalensi tembakau yang selalu naik setiap tahunnya.

Kalau kita mau melihat data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) dan Global Youth Tobacco Survey, jelas bahwa peningkatan angkatan muda kita yang merokok itu tinggi sekali, mungkin sampai dengan 10 kali lipat. Belum terhitung yang *e-cigarette*.

Anehnya, hampir semua negara anggota APACT (Asia Pacific Association for Control of Tobacco) telah melarang *e-cigarette*. Pertama Singapura, disusul Australia, New Zealand, Thailand, dan lain-lain. Namun, Indonesia sama sekali tidak membuat peraturan

yang melarang padahal *e-cigarette* yang masuk ke sini adalah tipe yang murah dari China, yang bisa dibeli dengan uang 20-30 ribu rupiah.

Akibatnya? Mereka yang sosial ekonomi bawah ikut-ikutan merokok *e-cigarette* karena klaim “tanpa asap” dan harganya mungkin jadi lebih murah dari rokok biasa. Akan tetapi, kita tahu bahaya dan isinya sama. Harus dipikirkan solusi jangka panjangnya karena sekarang *e-cigarette* ini sudah menjamur di mana-mana.



Semua itu, ditambah dengan pejabat kita yang tidak mau tahu, membuat perjuangan ini semakin merepotkan. Buktinya FCTC saja sampai hari ini tidak ditandatangani oleh pemerintah kita karena yang menentang terlalu banyak. Makanya kami dalam rapat-rapat di Jenewa atau tempat lain itu selalu diejek karena merupakan salah satu negara besar yang tidak menandatangani FCTC.

Efek APACT dan Dukungan Internasional

Kalau dibilang kita tidak ada dukungan internasional, itu salah besar. Buktinya, tahun 2018 lalu kita berhasil menyelenggarakan 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health di Bali.

Saya sendiri merupakan anggota dewan pengurus APACT sejak tahun 2007 dan para anggota lain selalu mendorong Indonesia untuk mengadakan konferensi supaya mereka bisa membantu. Jadi, saya terima tantangan untuk menyelenggarakan konferensi di Indonesia.

Saya berdiskusi dengan Ibu Mia, lalu kami bertemu dengan almarhum Pak Arifin Panigoro untuk mendapat dukungan modal yang besar. Gayung bersambut, Ibu Mia dan Pak Arifin setuju. Kepanitiaan dibantu oleh anggota organisasi dari Komnas PT. Jumlah peserta yang hadir cukup banyak dan menghasilkan resolusi yang bagus, tapi lagi-lagi kita hanya bisa bergantung pada respon dari pemerintah.

Tindak lanjut yang diharapkan adalah dengan tetap menggalang kerjasama dengan negara-negara sekitar supaya kita bisa lebih keras bersuara dan didengar pemerintah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok, asalkan pemerintah mau menjalankannya. Misalnya, dengan menaikkan cukai tembakau secara signifikan sehingga tidak

terbeli oleh masyarakat menengah ke bawah.

Memang kita perlu menggalang lebih banyak lagi solidaritas anti tembakau. Jadi, kalau industri tembakau bikin *roadmap* bersama Kementerian Perdagangan dan Industri, barangkali kita juga harus bikin *roadmap* bersama Kementerian Kesehatan mengenai cara mengurangi konsumsi tembakau sehingga kita bisa menurunkan risiko penyakit tidak menular sambil menyelamatkan program BPJS yang selama ini rugi besar gara-gara penyakit terkait rokok.

Rencana Masa Depan

Jika Komnas PT membuat rencana kerja jangka pendek dan jangka menengah untuk menyasar target-target tertentu, hasilnya mungkin akan semakin terukur. Bisa dimulai dengan menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menandatangani FCTC sebelum beliau turun dari jabatan. FCTC adalah amunisi dan merupakan salah satu cara menggalang solidaritas internasional.

Memang kita tahu sejak dulu bahwa lawan kita besar dan punya berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat. Namun, kita tidak boleh putus asa. Saya harap dengan tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan yang lebih baik, masyarakat lebih sadar bahwa bahaya dari nikotin itu mengancam generasi penerus yang seharusnya bisa membangun bangsa. Kalau begini terus, kapan Indonesia bisa lepas landas?

Akan tetapi, saya percaya dan yakin pada kemampuan dan SDM pengurus Komnas PT sekarang yang pasti bisa melangkah lebih jauh dan menggapai hasil yang nyata. Selamat ulang tahun Komnas PT yang ke-25!

11

Kisah Para Pejuang

MENAKLUKKAN BATU PIJAKAN PERTAMA

Oleh: Tari Menayang

Pengurus Komnas PT Sejak 2010



“Look for opportunities in challenges and remember strength is not just for the journey, but it is in the journey where you will become strong.”

Saya diminta oleh ibu Mia Hanafiah untuk bergabung dengan Komnas Pengendalian Tembakau pada tahun 2009 karena ingin mengajukan proposal dana (*grant proposal*) kepada CTFK (Campaign For Tobacco-Free Kids) sebagai rekanan Bloomberg Initiative. Maka saya membuat proposal dana dibantu oleh Ibu Geni Achnas yang saat itu juga baru bergabung dalam isu pengendalian tembakau di CTFK. Artinya, kami menyusun tujuan advokasi, strategi, dan berbagai kegiatannya.

Pada masa awal-awal, tantangannya sangat besar, apalagi dengan anggaran yang sangat terbatas dan staf teknis yang hanya 3 orang, dan kemudian menjadi 5 orang. Jaringan masyarakat madani yang peduli pengendalian tembakau pun belum banyak seperti sekarang. Sehingga salah satu pekerjaan rumah kita adalah bermitra dengan organisasi lain dan berkoalisi agar lebih kuat dalam kampanye-kampanye tersebut. Beruntung, Komnas

Pengendalian Tembakau sudah memiliki anggota-anggota yang terdiri dari 22 organisasi profesional yang ternama.

Kira-kira dari tahun 2010 sampai dengan 2016, isu pengendalian tembakau masih sangat terbatas pemberitaannya, sangat minim kampanye edukasi, apalagi kampanye advokasi. Sosial media juga hanya Facebook yang populer di masyarakat saat itu. Belakangan Twitter menjadi perhatian masyarakat juga. Karena itu, tantangan besar lainnya selain membangun koalisi tersebut adalah memulai gerakan media yang berarti. Saya kemudian melihat perlunya seorang *media specialist* untuk memulai sebuah gerakan masyarakat yang berarti dalam menciptakan tekanan kepada pemangku kebijakan. Saya ingat kami harus bekerja ekstra keras dalam merangkul media-media konvensional (media cetak maupun *online*) mengingat isu rokok bukanlah isu populer dan kebanyakan media saat itu masih banyak yang belum melek pengendalian tembakau. Kami mengunjungi berbagai kantor media terbesar, memperkenalkan isu pengendalian tembakau, dan bekerjasama dengan mereka. Pada akhirnya usaha ekstra ini membuahkan hasil. Mereka mulai mengenal Komnas Pengendalian Tembakau dan gerakannya, dan mulai banyak pemberitaan tentang pengendalian tembakau.

Butuh waktu lebih dari sepuluh tahun untuk perkembangan yang signifikan dalam hal pemberitaan atau kegiatan publik seperti sekarang ini di tahun 2023.

Akhirnya, dengan makin banyaknya pilihan sosial media, dan makin meleknnya masyarakat akan sosial media, pekerjaan Komnas Pengendalian Tembakau menjadi lebih mudah dalam hal ini.

Pekerjaan saya sebagai Program Director selama lebih dari 10 tahun, sangat terbantu dengan adanya koneksi yang baik dari Dewan, Ketua Umum, dan Ketua Harian maupun Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, baik dengan birokrat, tokoh masyarakat, maupun pebisnis. Mereka membantu kerja kami untuk menyambungkan kami ke koneksi-koneksi ini. Dan pada gilirannya birokrat maupun pebisnis ini bersedia membantu tanpa imbalan, baik dalam hal bertemu pemerintah maupun pebisnis lainnya yang mau memberi *sponsorship* untuk kegiatan advokasi dan kampanye.



Foto: Komnas Pengendalian Tembakau beraudiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016 - 2019, Yuliandre Darwis.

Setelah mengikuti beberapa *workshop* tentang pengendalian tembakau, baik di dalam maupun di luar negeri, saya yang waktu itu sebagai *Program Manager* menyadari bahwa betapa besar tantangan bagi Komnas Pengendalian Tembakau untuk mewujudkan visi misinya. Begitu banyak yang masih harus dikerjakan untuk mewujudkan suatu regulasi pengendalian tembakau yang lengkap

seperti yang tertuang di dalam konsep MPOWER*. Jalan akan sangat panjang dan berliku, tidak cukup hanya 10 tahun untuk menyelesaikannya. Dan terbukti, sampai sekarang, setelah 25 tahun Komnas PT berdiri, perjuangan masih panjang, walaupun pemberitaan di media-media arus utama dan media sosial sudah jauh lebih banyak dari 10 - 14 tahun yang lalu.

Kembali soal pengajuan proposal yang menjadi tugas awal saya, melalui konsultasi dengan beberapa ahli yang sudah berkecimpung di bidang ini cukup lama, antara lain Mary



Foto: Wawancara media, setelah acara konferensi pers.

Asunta dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), akhirnya saya memutuskan untuk membuat proposal dana yang pertama yang dapat mendukung kami melakukan kegiatan advokasi dalam isu pelarangan *sponsorship* rokok pada acara-acara musik. Sejalan dengan rancangan PP 109 Tahun 2012 yang saat itu masih didiskusikan, yang di dalamnya direncanakan juga akan melarang

sponsorship industri rokok bila disiarkan oleh media.

Grant proposal pertama Komnas Pengendalian Tembakau pun akhirnya diterima. Tim teknis dibentuk, dan kami benar-benar belajar sambil melakukan dari awal menjalankan strategi-strategi yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Untuk seorang manajer, perlu memahami juga manajemen LSM dan *institutional building*. Apresiasi saya kepada Yayasan Pembangunan Berkelanjutan dan Yayasan TIFA yang sudah memberikan pelatihan tentang NGO Management dan *logical framework* dalam pembuatan sebuah proposal sebelum saya bergabung dengan Komnas Pengendalian Tembakau. Sangat terasa manfaatnya.



Foto: Pertemuan tim Komnas Pengendalian Tembakau dengan Gus Solah, selaku Pimpinan Tebu Ireng.

Dana pertama dari CTFK tersebut kami gunakan untuk mendekati promotor musik. Kami mendekati Java Musikindo, karena merupakan promotor musik terbesar saat itu. Kami tidak hanya advokasi untuk mereka agar tidak menerima sponsor rokok, tapi kami juga membantu mereka mendapatkan sponsor untuk kegiatan konser mereka, yang saat itu adalah merek Pizza Hut sebagai mitra pebisnis pertama Komnas Pengendalian

Tembakau. Sejak saat itulah, Java Musikindo tidak menerima sponsor rokok dan bahkan pendirinya, Adrie Subono, bersedia bertestimoni di dalam buku “Kami Korban” setelah harus dioperasi karena penyakit jantung. Dia yang tadinya perokok telah berhenti merokok. Kisah Java Musikindo ini bisa dibilang keberhasilan indah dalam advokasi awal Komnas Pengendalian Tembakau, bila tidak bisa dibilang yang pertama. Keberhasilan yang merupakan buah kerjasama yang sangat baik di antara anggota tim di Komnas Pengendalian Tembakau, maupun dengan anggota dan mitra. Tentu keberhasilan bisa dalam berbagai bentuk. Berhasil mengajak banyak organisasi bermitra atau membentuk koalisi juga merupakan keberhasilan Komnas Pengendalian Tembakau sejak awal, bagai menaklukkan batu pijakan pertama.

“
**Kisah Java Musikindo ini
bisa dibilang keberhasilan
indah dalam advokasi awal
Komnas Pengendalian
Tembakau, bila tidak bisa
dibilang yang pertama.**
”

Selamat ulang tahun ke 25 tahun untuk Komnas Pengendalian Tembakau. Terus berjuang dalam tim yang mumpuni, saling mengisi atas kekurangan dan melengkapinya kemudian menyempurnakannya. Anggota Komnas Pengendalian Tembakau dan mitra-mitra yang peduli dan berjuang bersama selama ini telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan Komnas Pengendalian Tembakau. *Focus on what you can control.*

**MPOWER adalah strategi kebijakan pengendalian tembakau global dalam paket kebijakan yang lengkap, hemat biaya, namun berdampak tinggi yang dapat diaplikasikan di negara-negara yang ingin mengurangi konsumsi produk zat adiktif tembakau.*

12

Kisah Para Pejuang

UPIN IPIN STORY: “Kadang kita menjadi bos dan kadang kita menjadi *kupro*” harus dinyanyikan!

Oleh: Taufik Hidayat (Bob) dan Laksmana Yudha Saputra

Tim Kerja Harian Komnas PT



Perkenalkan kami adalah “Upin dan Ipin”-nya Komnas Pengendalian Tembakau, Taufik Hidayat alias Bob dan Laksmana Yudha Saputra. Kenapa Upin Ipin? Karena kami selalu bersama; ada Upin, ada Ipin, ada Bob, ada Yudha. Dalam catatan pendek ini, kami ingin bercerita dari kisah yang paling berkesan bagi kami berdua selama delapan tahun bekerja di Komnas Pengendalian Tembakau.

Bagian 1 - Langsung ditugaskan ke DPR

Awal kami bekerja di Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT), kami langsung ditugaskan ke rumah wakil rakyat yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). Perasaan kami waktu itu, anak baru tiba-tiba langsung dimasukkan ke kandang macan yang isinya para politikus berdasi, bingung dan gamang kita rasakan di sana. Namun pada akhirnya kami terbiasa, terutama Yudha yang kini bisa dibilang jadi pawangnya Komnas PT di DPR dan selalu menjadi *liason* untuk advokasi-advokasi ke DPR.

Berbagai kejadian kami alami di DPR, yang membuat kami harus bersikap ‘mawas’ ala cenayang dan menajamkan insting ‘berburu’ *champion* yang mau mendukung isu pengendalian tembakau di dalam gedung rakyat tersebut. Tentunya, ada saja tantangannya. Beberapa kali misalnya, saat di DPR, Yudha sering kali harus *ngumpet* sana-sini untuk menghindari mata-mata industri yang ada di DPR bahkan harus bersembunyi di toilet dan tahan napas dalam-dalam karena si mata-mata industri ada di toilet yang sama. Bagaimana kami bisa tahu itu mata-mata industri? Itu rahasia, beberapa bukti fakta kami ketahui dan sangat jelas mengindikasikan mereka sebagai ‘orang industri’.

Beberapa kejadian lain, mulai dari harus memastikan pesan-pesan rakyat benar-benar sampai ke tangan para wakil rakyat, bagaimana caranya mendapat akses untuk bisa ikut mendengarkan RDPU dst, hingga akhirnya Yudha mampu merangkul beberapa Tenaga Ahli anggota atau fraksi agar isu atau pesan pengendalian tembakau tetap masuk dalam perumusan di DPR. Semua dikerjakan secara ‘manual’ karena modalnya hanya tekad dan berbagai dokumen yang harus dititipkan, tidak ada ‘amplop’ yang ikut disisipkan. Jadi ya, diterima atau tidaknya oleh para anggota DPR, itu sudah di luar kuasa kami.

Bagian 2 - PHW: “Pria Harus kuWat”

Pria punya selera? No.... Kami ini mah pria yang harus kuat, dan di sinilah tercipta lagu kami berdua: “Kadang Kita Menjadi Bos dan Kadang Kita menjadi Kuproy, oooooo Inilah Hidupku”. Bagaimana tidak harus kuat, suatu kali kami berdua harus mengangkat *backdrop* kayu 3 x 3 meter dari lantai dasar sampai lantai 4 di salah satu mal di Jakarta Pusat melalui tangga darurat pada jam 11 malam. *Backdrop* bergambar PHW kami siapkan sebagai kegiatan sosialisasi PHW di Indonesia untuk pertama kalinya. Di lain waktu, kami keliling lapangan Cibubur untuk memasang 100 spanduk “Keren Tanpa Rokok” dalam sehari demi bisa dilihat 10.000 peserta Jambore Nasional keesokan harinya.

“

Namun suatu hari juga, kami harus ‘rapi jali’ dengan batik ala Paspampres untuk beraudiensi dengan pejabat, tampil ganteng, jauh dari “gaya tukang” saat di lapangan. Apalagi kalau ke daerah dan bertemu para Bupati atau Walikota, tamu dari Jakarta mewakili Komnas Pengendalian Tembakau harus rapi dan wangi.

Maka, kami merasakan betul naik dan turunnya dinamika pekerjaan kami selama kami di Komnas Pengendalian Tembakau. Terkadang kita berpakaian rapi karena bertemu dengan pemangku kebijakan, terkadang kami mandi keringat dan berkotor-kotor badan karena harus menyiapkan segala keperluan teknis di lapangan. Kami sama sekali tidak keberatan akan hal ini, karena kami paham betul keterbatasan sumber daya yang bergerak di isu ini dan jiwa serta raga kami memang dibutuhkan untuk membantu mengerjakan segala sesuatunya. Kami bersyukur bahwa semua adalah jalan kami untuk terus belajar dan berjuang agar kelak generasi penerus kami selanjutnya bisa merasakan hidup yang sehat dan lebih baik di negara kita tercinta. Teruslah berjuang bukan hanya sampai titik darah pengha-

bisan namun teruslah berjuang hingga perjuangan tidak dirasakan sebagai beban.



Foto: Kegiatan edukasi bahaya merokok.

Kampanye dan Gerakan Mahasiswa

Kami berdua terlahir dari Klub Jantung Remaja, Yayasan Jantung Indonesia. Itu yang melatarbelakangi kami tertarik bergabung di Komnas PT untuk berkampanye melalui gerakan-gerakan mahasiswa dan kepemudaan lainnya di Indonesia. Kampanye masif dan kreatif harus dilakukan agar pesan yang kami sampaikan didengar masyarakat dan sampai ke telinga pemangku kebijakan, serta mengajak seluruh anak muda di Indonesia untuk bergerak bersama demi anak muda yang sehat dan tidak merokok dengan *tagline* “Keren Tanpa Rokok” yang awalnya disuarakan Klub Jantung Remaja.

Saat kami bergabung, Komnas PT sering melakukan Kampanye Kreatif melalui berbagai kegiatan di Car Free Day (CFD) dengan menggunakan kampanye Keren Tanpa Rokok, dan kami dipercaya untuk *lead* pelibatan anak muda di dalamnya. Beberapa kali kami bersama teman-teman mahasiswa lintas kampus dan organisasi pemuda lainnya bergabung untuk menyuarakan kepedulian kami tentang pengendalian tembakau di Indonesia. Selain kegiatan di CFD, kami bersama teman-teman mahasiswa melakukan kegiatan seminar atau *capacity building* di kampus mereka masing-masing. Saat itu, kami merasakan semangat teman-teman mahasiswa yang sangat masif dan tak kenal lelah. Bahkan ada beberapa



Foto: Kampanye musik keren tanpa rokok.

apa teman mahasiswa sampai harus berurusan dengan pihak kepolisian karena memperjuangkan isu kita. Karena itu, kami sangat berharap gerakan dan rasa perjuangan mahasiswa yang sekarang tidak kendor, bahkan bisa lebih baik daripada pendahulunya demi menyuarakan pesan perjuangan. “Hidup Mahasiswa, Hidup Perjuangan!”

Bagian Ungkapan Cinta - “No Incess, No Happy”

Ratu Sapura a.k.a Ratu Sakura. Ibu Ratu, Sekretaris Komnas PT yang biasa kami panggil Inces singkatan dari *princess* adalah idola tim kerja harian Komnas PT. Ibu Ratu adalah “*juru koentjie*” karena dia adalah staf pertama sejak didirikannya Komnas PT pada 1998. Memiliki sifat yang keras kepala, ‘*grasak-grusuk*’ dan terkadang mudah emosi, karena sifat itulah yang justru membuat Inces alias Ibu Ratu menjadi bahan candaan tim, terutama kami. Kalau ada urusan sama beliau, kita harus siap-siap tahan napas dan tarik urat leher, pasti ada saja yang selisih paham, dan cara menghadapi Inces harus dengan candaan dan bahkan ‘*ceng-cengan*’, cara itulah yang membuat cair suasana sehingga lancar urusan pekerjaan dan bahkan membuat kami semakin dekat satu sama lain.

Nina Samidi. Mbak Nina Samidi yang biasa kita panggil ‘Ibu Bupati Kediri’ merupakan sosok pemimpin yang tegas, pintar, *multi tasking*, dan keras kepala. Mbak Nina bisa menahkodai kapal Komnas PT dari jarak jauh bahkan membawa Komnas PT kini mampu bekerja ‘*sat-set-sat-set*’, cepat. Terkadang, karena kecepatan pekerjaan dan keras kepalanya yang membuat kami sulit mengerti, tidak jarang membuat kami kena omel lagi oleh ‘Ibu

Bupati Kediri'. Tetapi, tim Komnas PT kini menjadi tim yang semakin solid dan dapat bekerja dengan cepat sehingga mendapatkan kepercayaan tanggung jawab yang besar di dalam lingkaran perjuangan pengendalian tembakau di Indonesia.

Putri Arfah. Komnas PT memiliki 'Ibu RT' yang sangat pengertian dan baiknya seperti Ibu Peri, Mbak Putri namanya. Mbak Putri sebagai jembatan untuk kami semua seluruh tim Komnas PT karena kemampuannya memberikan solusi dan bisa jadi benang pengikat kami semua di dalam tim. Semua masalah akan cepat selesai bila dipegang Mbak Putri, apalagi kalau menghadapi Inces. Karena kebaikan, pengertian, dan kesabarannya, maka seluruh tim harus waspada kalau sampai Mbak Putri sudah marah-marah, artinya itu sudah tanda ada bahaya besar.



Foto: Tim dan Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, 2023.

Dian Rahma. Dian, ibu tiga anak yang tetap modis seperti anak SMA. Yudha, Bob, dan Ibu Ratu sering mendapatkan peringatan dari Dian karena sering telat untuk membuat laporan.

Tari Menayang. Kanjeng Mami alias Ibu Tari adalah orang yang memanggil kita 'cecunguk-cecunguk'. Setiap Ibu Tari mau ke kantor, jam kantor kami putar jarumnya jadi lebih cepat 1 jam agar Ibu Tari cepat pulang (maafkan kekurangan kami, oh, Kanjeng Mami).

Ibu Tari adalah orang yang sangat higienis, yang kalau mau pesan makanan, pedagangnya harus pakai sarung tangan.

Sarah Muthiah Widad. Sarah si kecil cabe rawit adalah *influencer* di Instagram yang merupakan lulusan Jurusan Kimia yang bekerja sebagai kreatif konten kreator di Komnas PT (sangat sejalan sekali, ya, dengan jurusannya). Tapi kegigihan dan semangatnya membuat dia melaju pesat di dunia pengendalian tembakau sehingga kini menjadi tulang punggung kreativitas Komnas PT.

Eka Saptiningrum - Diana Rahima. Duo anak muda, tim baru di Komnas PT yang sudah sangat hebat mengikuti dan menyesuaikan ritme pekerjaan di Komnas PT sehingga tim kerja harian jadi semakin kompak dan kuat. Salam sayang 'kecup basah' dari kami Upin dan Ipin Komnas PT, semoga kita terus maju dan menjadi keluarga yang kompak bersama dalam perjuangan ini, terus menguat dengan mengenali karakter masing-masing. LOVE YOU ALL!

13

Kisah Para Pejuang

SEMUA ADALAH (PERTARUNGAN) POLITIK

Oleh: Tubagus Haryo Karbiyanto

Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Bidang Hukum



Kemenangan Kecil dalam Pertarungan Besar

Secara umum, litigasi terkait dengan pengaturan tembakau di Indonesia sebetulnya masih berpihak pada kepentingan publik dan kesehatan. Misalkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 yang menolak gugatan industri tembakau untuk menghilangkan kembali klausul zat adiktif dalam Undang-Undang Kesehatan. Meski tidak menyebutkan secara khusus, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh dunia sudah tahu bahwa tembakau adalah zat adiktif.

Dalam kasus lainnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 juga membuat pengaturan Kawasan Tanpa Rokok menjadi lebih jelas dasar hukumnya. Pemerintah-pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan Kawasan Tanpa Rokok yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan harus memenuhi kriteria tempat terbuka, terpisah dari gedung utama, jauh dari pintu keluar masuk, jauh dari pintu lalu lintas, dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu pun, kita masih menang.

Tapi kekalahan kita paling telak adalah pada isu *Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship* (TAPS). Kita telah berusaha lewat gugatan Komisi Nasional Perlindungan Anak, lewat gugatan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran—bahkan hingga tiga kali. Tapi Mahkamah Konstitusi tetap menolak dengan alasan bahwa tembakau adalah produk legal, jadi sah saja untuk diiklankan. Ini logika aneh karena minuman beralkohol juga legal tapi tidak bisa beriklan.

Hingga sekarang, industri tembakau masih mempersoalkan Undang-Undang Kesehatan. Melalui Pengadilan Negeri setempat mereka juga mempersoalkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Jadi proses-proses hukum ini memang masih jauh jalannya.

Semua Soal Politik

Perjuangan ini masih panjang dan berat. Kita bisa melihat contohnya pada keterlibatan Komnas Pengendalian Tembakau dan teman-teman jaringan saat kemunculan ‘skandal ayat yang hilang’ pada 2008–2009, saat klausul tembakau sebagai zat adiktif dihilangkan dari rancangan Undang-Undang Kesehatan. Semua jaringan bekerja untuk mengadvokasi, mulai dari menyelenggarakan konferensi pers, melapor ke KPK, hingga melapor ke kepolisian.

Buku yang diterbitkan Forum Warga Kota (Fakta) berjudul *Jalan Terjal Pengendalian Tembakau di Indonesia: Dari Legislasi Ke Litigasi*, saya kira bisa menggambarkan proses-proses pengendalian tembakau mulai dari proses hukum hingga proses politik yang berlangsung di DPR. Buku lainnya, *Giant Pack of Lies* yang juga ditulis oleh Mardiyah Chamim juga bisa menjadi jendela kita untuk melihat ketegangan pengaturan tembakau. Dalam buku itu diceritakan bagaimana Indonesia sebagai negara anggota WHO pernah menjadi tuan rumah untuk menyusun, mengusulkan, dan mendiskusikan FCTC (Frame-



Foto: Kerjasama pemasangan billboard mendukung penandatanganan FCTC pada tahun 2009.

work Convention on Tobacco Control). Menteri Kesehatan saat itu akan berangkat ke New York untuk menandatangani konvensi tersebut, namun sebuah panggilan telepon dari Presiden Megawati Soekarnoputri di detik-detik terakhir menggagalkan langkah progresif itu. Sampai sekarang Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum menandatangani konvensi tersebut.

Oleh karena itu, pengaturan tembakau di Indonesia bukan soal hukum semata, tapi juga urusan politik. Semua undang-undang, aturan hukum, dan sebagainya adalah hasil kompromi politik. Keberhasilan pengaturan tembakau adalah perkara *political will* dari pemerintah. Tugas kita adalah untuk terus mengingatkan dan memaksa pemerintah agar berpihak pada kesehatan masyarakat ketimbang kepentingan industri.

Kuatnya kompromi politik antara pemerintah dan industri kelak akan bisa kita lihat lagi di Pemilu 2024 nanti—saat pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD, dan seterusnya. Firasat saya, cukai rokok tidak akan dinaikkan demi mendapatkan dukungan dari industri. Pemerintah masih memanjakan industri rokok untuk berdagang dan membuat rakyat Indonesia menjadi kecanduan tembakau.

Melawan Industri (dan Pemerintah Sendiri?)

Secara global, untuk perkara pengaturan tembakau, Indonesia sebenarnya bisa bilang jadi negeri terbelakang. Menurut indeks yang dikeluarkan The Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), intervensi industri rokok terhadap pemerintah di Indonesia adalah yang paling tinggi. Salah satu indikator yang menentukan peringkat indeks itu adalah respons pemerintah yang begitu kompromistis atas intervensi industri.

Sampai sekarang masih terasa aneh buat saya saat industri diundang ke meja diskusi untuk pengaturan tembakau dengan alasan mereka adalah salah satu *stakeholder*. Dengan logika yang sama, apakah kita akan mengundang predator seksual saat membahas undang-undang perlindungan anak? Apakah kita mau mengundang koruptor untuk membahas undang-undang antikorupsi?

Seringkali saat berdiskusi dengan perwakilan pemerintah, baik itu dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian Perdagangan, kami malah mendapati suara mereka seperti mewakili kepentingan industri, bukan kepentingan publik. Jadi lawan kita bukan hanya industri, tapi kadang-kadang malah melawan pemerin-

tah sendiri. Pada tingkat daerah, kita juga harus mendampingi pemerintah dan Dinas Kesehatan yang kurang determinasi saat mempertahankan indikator-indikator untuk pengaturan tembakau di daerahnya masing-masing. Kerap kali juga mereka tidak menyadari bahwa seharusnya mereka berdiri dan memperjuangkan kesehatan masyarakat.

Hasil dari intervensi ini adalah banyak regulasi yang masih sangat terasa kompromis dan mendukung kepentingan industri rokok: Rokok masih bisa beriklan, sementara alkohol—yang sama-sama zat adiktif—tidak boleh. Kalau cukai alkohol bisa mencapai 80 persen, rokok hanya 57 persen. Setiap tahun kenaikan cukai rokok menurut rekomendasi

WHO paling tidak harusnya 25 persen, tapi di sini kita hanya menaikkan antara 10-12 persen saja. Contoh lainnya saat kami mengusulkan pelarangan total atas iklan, promosi, dan sponsor di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law, pemerintah lah yang justru menghapusnya, bukan industri, dengan dalih bahwa itu terlalu teknis dan memperlama proses pembahasan undang-undang.



Foto: Aksi damai di depan Kementerian Keuangan untuk mendukung kenaikan cukai.

Menjungkirbalikkan Takaran Normal

Salah satu persoalan pengaturan tembakau di Indonesia yang cukup berat adalah bagaimana kita masih menganggap produk tembakau, apakah itu rokok atau vape, masih dianggap ‘normal.’ Kita masih bisa memaklumi dan menganggap normal pula perilaku merokok, meski dampaknya berpengaruh pada semua orang. Kita masih menganggap industri rokok—yang mematenkan lima puluh persen pelanggan loyalnya—sebagai industri yang normal dan masih diterima.

Inilah yang menurut saya dibalik! Kita harus ‘mendenormalisasi’ produknya, aktivitas merokoknya, dan industrinya. Kita harus mengatakan bahwa tiga perkara tadi tidak normal meski secara legal diizinkan. Hanya karena ada Kawasan Tanpa Rokok, bukan berarti aktivitas merokok itu normal karena aktivitas itu merusak kesehatan dan produktivitas—karena mereka yang terlibat sebenarnya adalah pecandu. Industri rokok, meski legal, itu tidak normal karena mereka menjual bahan-bahan yang membuat ketagihan dan merusak kesehatan. Mereka memanipulasi kepercayaan publik dan konsumennya dengan ilusi kenikmatan atau imaji-imaji lain yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Setiap isu pengendalian tembakau yang dikawal oleh Komnas PT tentu ada plus-minusnya. Ada kesulitannya sendiri, perspektif yang berbeda, dan *angle*-nya masing-masing. Jadi, satu pesan saya kepada teman-teman yang sekarang menggeluti isu *tobacco controll*: jangan kapok. Kita harus tetap melakukannya karena kita berada di jalur yang benar. Jangan lupa selalu terapkan *screening test* untuk mengetes efektivitas dari *campaign* atau advokasi kita. Kalau timbul reaksi yang berlebihan dari industri, berarti apa yang kita lakukan itu sudah benar. Kalau mereka tenang-tenang saja, berarti yang kita lakukan tidak benar.

Selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Komnas Pengendalian Tembakau. Biarlah gaung semangat untuk pengendalian tembakau di Indonesia bisa diwarnai oleh teman-teman di Komnas Pengendalian Tembakau dan biarlah karya dari Komnas Pengendalian Tembakau bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Teruskan gerakan *Tobacco-Free Generation* supaya di tahun 2045 anak-anak Indonesia bebas dari adiksi tembakau.

14

Kisah Para Pejuang

DARI ADVOKASI KE REGENERASI: MELAWAN DENGAN OFENSIF

Oleh: Tulus Abadi

Ketua Harian YLKI



Sudah 25 tahun sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di dunia pengendalian tembakau di Indonesia. Sebuah perjalanan yang panjang, penuh tantangan, serta memiliki misi mulia untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman bahaya tembakau. Ulang tahun Komnas Pengendalian Tembakau ke-25 sepertinya menjadi momen yang tepat untuk meninjau kembali perjalanan kita di garis depan perjuangan melawan tembakau, melihat berbagai rintangan, tantangan, dan momen-momen penting yang membentuk gerakan pengendalian tembakau di Indonesia.

Awal Perjalanan di Dunia Pengendalian Tembakau

Pada awalnya, ketika saya baru berkiprah di YLKI, saya diminta mempelajari isu-isu tentang perlindungan konsumen lewat beberapa buku yang ada di YLKI sebagai bentuk pemberdayaan informasi dan aksi-aksi advokasi yang akan dilakukan oleh YLKI.

Seperti yang kita ketahui, YLKI mengatasi banyak isu atau permasalahan konsumen dari A sampai Z. Fungsi dari mempelajari buku ini adalah supaya kita mengetahui isu-isu besar di dalam permasalahan perlindungan konsumen. Dalam salah satu buku itu ada satu bab yang membahas masalah perlindungan konsumen dari asap rokok.

Mulai dari situ saya kemudian menyimpulkan bahwa salah satu *concern* YLKI adalah terkait dengan perlindungan konsumen terhadap bahaya rokok, termasuk di dalamnya mengadvokasi bahaya iklan rokok mulai dari isinya hingga cara penyampaiannya.

Saya juga mencatat komitmen YLKI dari dahulu sampai sekarang untuk tidak menerima pengaduan soal rokok dan miras karena kami menganggap rokok merupakan produk yang sudah jelas bahayanya. Jadi, kalau ada konsumen yang mengadu soal dampak dari rokok, kami tolak.

Saya tak pernah membayangkan akan terlibat dalam gerakan pengendalian tembakau. Namun, panggilan hati yang kuat untuk melawan peredaran tembakau yang semakin marak dan menakutkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat membuat saya bergabung dalam gerakan pengendalian tembakau. Bersama dengan beberapa LSM dan perorangan seperti L3M dan WITT, kami membentuk gerakan sporadis yang berusaha mengedukasi masyarakat akan bahaya tembakau. Namun, kami juga menyadari bahwa edukasi saja tidak cukup. Regulasi yang kuat harus didorong untuk membendung arus bahaya yang meluap dari iklan-iklan merayu yang menyebarkan daya tarik rokok semakin dahsyat di mana-mana.

Tantangan dan Perlawanan dalam Gerakan Sporadis

Perjalanan di dunia pengendalian tembakau bukanlah tanpa tantangan. Kami sering menghadapi perlawanan dari industri tembakau yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka. Strategi mereka sangat cerdas, menyebarkan



Foto: Prof. Faried Afansa Moeloek selaku Ketua Komnas Pengendalian Tembakau bersama mitra jaringan pada sebuah diskusi panel.

iklan-iklan merayu dan menggiring masyarakat untuk percaya bahwa merokok adalah tindakan keren dan gagah. Kami menyadari bahwa gerakan sporadis yang kami bentuk harus lebih kuat, lebih terorganisasi, dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Dukungan dari pemerintah terwujud lewat regulasi baru di zaman Presiden B.J. Habibie di era reformasi yang menurunkan peraturan pemerintah mengenai Pengendalian Tembakau. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur jam tayang iklan rokok dan penayangan iklan-iklan tersebut di media cetak dan media elektronik. Sebelumnya, iklan rokok masih bebas memperagakan fisik rokok dan kegiatan merokok. Jadi, hal ini merupakan pencapaian advokasi yang berharga bagi para pejuang pengendalian tembakau.



Foto: Baliho di beberapa titik di daerah, yang dibuat oleh kelompok anti pengendalian tembakau.

Menghadapi Realitas Edukasi vs Regulasi

Salah satu perdebatan dalam gerakan pengendalian tembakau adalah sejauh mana edukasi menjadi efektif dibandingkan dengan pentingnya regulasi. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya tembakau tentu saja penting, tetapi tanpa dukungan regulasi yang kuat, iklan-iklan akan semakin menyebar dan mempengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Dalam hal ini, kami merasa bahwa regulasi menjadi langkah yang lebih penting, maka kami harus terus mendorong para pengambil kebijakan untuk mengesahkan undang-undang yang lebih ketat terkait tembakau.

Media Darling dan Pengaruhnya dalam Advokasi

Peran media sangatlah penting dalam gerakan pengendalian tembakau. Saya sering dijadikan "*media darling*," dan pernyataan-pernyataan saya sering diutip oleh berbagai media. Hal ini memberi dampak yang besar terhadap perjuangan kita dalam mengadvokasi pengendalian tembakau. Namun, ada sisi negatif dari menjadi pusat perhatian media, yaitu tanggung jawab besar yang harus saya emban. Pernyataan saya harus selalu akurat dan



Perjuangan lewat jalan pengadilan sangat berat karena pihak yang berseberangan memiliki uang untuk membeli jasa pengacara-pengacara andal.



berdasarkan fakta, karena apa yang saya sampaikan akan menjadi referensi penting bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan.

Melangkah ke MK dan Perjuangan untuk Regulasi Lebih Ketat

Tidak hanya bergantung pada dukungan media, kami juga harus menghadapi perjuangan hukum dalam mengadvokasi regulasi yang lebih ketat terhadap tembakau. Kami berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengupayakan perubahan regulasi di undang-undang kesehatan. Ini adalah momen penting dalam perjalanan kami karena keputusan yang diambil di MK akan berdampak pada arah pergerakan pengendalian tembakau di Indonesia.

Perjuangan lewat jalan pengadilan sangat berat karena pihak yang berseberangan memiliki uang untuk membeli jasa pengacara-pengacara andal. Belum lagi kemampuan mereka untuk mengubah isu agar “bengkok” dengan melakukan *counter* melalui media-media baik konvensional maupun media sosial atau digital.

Regenerasi dan Misi Konsisten untuk Pengendalian Tembakau

Ketika Komnas Pengendalian Tembakau memasuki usia 25 tahun, saya merasa perlu untuk berbicara tentang regenerasi dalam organisasi. Kami harus memastikan bahwa misi pengendalian tembakau tetap konsisten dan berlanjut untuk generasi mendatang. Saya percaya bahwa Komnas harus menjadi pusat advokasi yang fokus dan berdaya guna, dengan regulasi yang lebih ketat sebagai perhatian utama. Kolaborasi dengan para pemimpin dan generasi muda yang ofensif akan menjadi kunci keberhasilan perjuangan kita.

Saya ingin berpesan dan mengingatkan Komnas apakah *positioning*-nya sudah bagus terkait advokasi pengendalian tembakau? Lalu, apakah Komnas PT sudah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di mata para pengambil kebijakan?

Perjuangan ini harus dipelihara dan ditingkatkan terus. Selama ini Komnas Pengendalian Tembakau masih kurang ofensif di dalam advokasinya. Seharusnya, selain diperhitungkan oleh pengambil kebijakan juga harus diperhitungkan oleh industri. Dalam usia 25 tahun ini harus ada tokoh atau simbol untuk pergerakan visinya, selain juga harus memperbanyak anak-anak muda terlibat dan mendukung isu ini. Tidak harus selalu saya yang menjadi tokoh di dalam pergerakan ini.

Saya menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, dan tantangan yang harus dihadapi mungkin tak pernah berakhir. Namun, dengan semangat dan komitmen yang tak pernah padam, saya yakin bahwa pengendalian tembakau di Indonesia akan menjadi lebih baik. Kita akan menciptakan masa depan yang bebas dari asap tembakau agar generasi mendatang dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman bahaya tembakau.

Perjalanan selama 25 tahun ini tak akan bisa terjadi tanpa dukungan dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, LSM, masyarakat, dan para pengambil kebijakan yang selalu mendukung gerakan pengendalian tembakau. Mari kita terus berjuang bersama, mengatasi rintangan, dan mencapai masa depan yang bebas dari bahaya tembakau. Semangat kita tak pernah padam. Bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang positif untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Kisah Para Pejuang

JATUH BANGUN MERETAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEROKOK

Oleh: Widyastuti Soerojo

Advokat Kesehatan Masyarakat, Ketua I Bidang Kajian dan Pengembangan,
Komnas Pengendalian Tembakau



Perkenalan saya dengan dunia tembakau berawal ketika Prof. Tjandra Yoga meminta saya, yang saat itu sebagai Konsultan Kesehatan, untuk membantu Yayasan Jantung Indonesia (YJI) membuatkan telaah situasi tembakau di Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan pengarahannya Bappenas pada Lokakarya YJI. Saya dipertemukan dengan Ibu Mia Hanafiah, saat itu Ketua YJI, dan Prof. Fasli Jalal, Kepala Biro Kesejahteraan, Kesehatan dan Gizi Bappenas untuk mendiskusikan materi pengarahannya. Telaah dari sumber data nasional yang terbatas kala itu menghasilkan dokumen berjudul “*Tembakau, Ekonomi, dan Generasi Muda*” yang digunakan sebagai pokok arahan Bappenas pada Lokakarya YJI, 7 Juli 1997, dengan tema “Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Generasi

Muda”. Lokakarya YJI ini agaknya ikut memicu Ibu Mia untuk mempercepat rintisan pembentukan Komnas PMM (Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok - sekarang dikenal sebagai Komnas Pengendalian Tembakau) tahun 1998 dengan mengajak



Foto: Lokakarya penyusunan kerangka kerja 5 tahun program nasional penanggulangan masalah merokok untuk LSM dan Organisasi Profesi, 2000.

semua organisasi masyarakat dan profesi kesehatan yang terkait untuk bergerak menyelamatkan generasi.

Tidak jelas bagaimana Dokumen YJI tersebut sampai ke tangan Menteri Kesehatan (Menkes) yang dijabat Prof. Faried Anfasa Moeloek pada waktu itu. Tetapi secara terpisah, sebagai Konsultan Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat (BPSM)

Kemenkes saat itu saya menerima petikan Disposisi Menkes kepada Kepala Direktorat BPSM untuk mengundang pertemuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kesehatan Anak dengan merujuk Risalah Keputusan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra, tanggal 7 Oktober 1998. Isinya antara lain meminta Menkes menindaklanjuti usulannya tentang “Perlindungan Kesehatan Anak/Remaja terhadap Bahaya Merokok”. Menkes juga mengirimkan, “Resume Masalah Rokok, Ekonomi, dan Generasi Muda” kepada Presiden BJ Habibie melalui Sekneg yang segera merespon dengan memberikan disposisi kepada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pertanian, Menkes dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempelajari halaman rekomendasi, seraya menyatakan bahwa Presiden menerima usulan kenaikan cukai rokok.

Komitmen Menkes diikuti dengan dua langkah progresif berikutnya, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagai turunan UU No 23/1992 dan mengeluarkan SK Pembentukan Forum Komunikasi Nasional Penanggulangan Masalah Rokok di bawah koordinasi Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Anggotanya terdiri dari Direktorat terkait di Kemenkes dan 10 LSM yang berhubungan dengan masalah merokok. Saya mendapatkan naskah RPP dari Menkes tanggal 30 Juni 1999 dengan disposisi untuk dipelajari dan diberikan asupan sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 1999 pada 5 Oktober 1999. PP ini mengalami dua kali perubahan menjadi PP No. 38/2000 dan PP No. 19/2003.

Seusai Lokakarya YJI pada 1997, Prof. Tjandra meminta bantuan teknis saya untuk membenahan internal organisasinya, yaitu LM3 (Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok) yang sudah berdiri sejak 1990 dengan kegiatan utama penyuluhan dan seminar-seminar bahaya dan pencegahan merokok. Program pencegahan ini layak dikembangkan dengan program berhenti merokok. Sepulangnya dari *Cessation Training* di Singapura bersama YJI, Yayasan Kanker Indonesia (YKI), dan FPsi-UI, saya susun paket *self-learning module*, yaitu “Berhenti Merokok dalam 7-hari” yang didesiminasikan ke berbagai lembaga. Ketidakterwakilan LM3 dalam Komnas PMM disebabkan pandangan Ketua LM3 agar kedua organisasi ini berjalan beriringan. Membantu LM3 tidak berarti saya meninggalkan tugas utama sebagai Konsultan Kesehatan.

FCTC menambahkan dimensi hukum pada pengendalian epidemi tembakau

Era 1990an mengawali perubahan paradigma pencegahan merokok setelah WHO mengumumkan tembakau sebagai epidemi global penyebab kematian terbesar di dunia yang dipicu oleh vektor industri yang digdaya, berbeda dengan vektor epidemi penyakit biasa. Fokus pencegahan beralih dari korban rokok dengan edukasi bahaya merokok ke vektor penyebab korban dengan regulasi. Setelah melalui proses internal cukup panjang, pada tahun 1999 WHO memutuskan melakukan pertemuan *Inter-Governmental Body* (INB) dengan 192 negara anggotanya dan menghasilkan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) pada 2003. Indonesia mengirim lima wakil dari lima Kementerian. Transkrip sesi-sesi INB membuktikan keterlibatan aktif Indonesia di mana di antara asupannya, ada yang diadopsi dalam naskah FCTC. Gelombang FCTC diikuti oleh berbagai kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pengendalian tembakau di Indonesia. Di antaranya yang saya ingat saya ikuti adalah audiensi LM3 ke Komisi IX DPR RI, seminar FCTC di Pemda DKI bersama anggota Komnas PMM, membantu LM3 membuat Surat Terbuka kepada Presiden, membantu Komnas PMM Menyusun Petisi yang ditandatangani para tokoh dan organisasi masyarakat, membantu koordinasi Demo Akbar menuntut Akses FCTC di depan Istana Merdeka yang dipimpin oleh YLKI dan diikuti ratusan anggota LSM, terbanyak adalah barisan Klub Jantung Sehat.

Sejak 2001, sebelum FCTC disahkan, WHO Indonesia sudah menginisiasi tiga

langkah strategis dengan mengasumsikan Indonesia akan menandatangani FCTC pada periode penandatanganan 2003-2004 dan melanjutkan dengan ratifikasi. Berarti perlu disiapkan RUU Ratifikasi inisiatif pemerintah; yang ditindaklanjuti dengan UU Pengendalian Tembakau. Dibutuhkan bukti empiris yang komprehensif sebagai landasan advokasi. Kerjasama WHO dilakukan dengan Prof. Anhari, Staf Ahli Bidang Masyarakat Tertinggal Kemenkes RI, Biro Hukor Kemenkes RI untuk pembuatan Naskah Akademik dan *Draft* RUU Ratifikasi FCTC dan IFPPD (*Indonesian Forum of Parliamentarian for Population Development*) untuk mendukung FCTC sekaligus menyusun RUU PDPTK (Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan). Dua tokoh yang terlibat adalah Itsnaeni Abbas IFPPD dan Dr. Hakim Sorimuda Pohan, *champion* kita yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI, keduanya menjadi pengurus Komnas Pengendalian Tembakau saat ini. Penyusunan Buku "*Fakta Tembakau: Data Empiris untuk Strategi Nasional Pengendalian Tembakau*" dilakukan dengan kerjasama Litbangkes RI dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI). Saya diminta ikut sebagai Technical Reviewer and Co-Editor, sekaligus memfasilitasi pertemuan konsultatif dengan sektor terkait. Diseminasi perlunya akses FCTC diperluas ke berbagai kalangan sampai dengan Komnas HAM. Di DPR, bersama Prof Anhari, jatah presentasi saya adalah "Mitos dan Fakta".

FCTC adalah komitmen internasional yang menjadi landasan hukum pengendalian tembakau dari sebuah negara yang tidak dimiliki Indonesia. Ini masih menjadi PR yang tidak bisa kita tinggalkan.

WHO Indonesia tak pernah melewatkan kesempatan mengirimkan wakil Indonesia ke pertemuan-pertemuan terkait FCTC. Juli 2003, saya diikutsertakan mendampingi Kemenkes sebagai anggota Delegasi Indonesia pada *Southeast Regional Consultation on Multi-Sector Mechanism for Comprehensive Tobacco Control*; tahun 2007 sebagai anggota delegasi *Country Observer ke COP-2 di Bangkok* dan tahun 2013 mendampingi Delegasi Indonesia ke *Regional Workshop on Implementation of WHO-FCTC, New Delhi, India, State: Non-Party*. Tahun 2016 membantu penyusunan *FCTC Toolkit* dan tahun 2018 memenuhi permintaan Dirjen HAM kepada WHO untuk menyampaikan materi FCTC di depan pejabat dan staf di lingkungan Ditjen HAM Kemenkumham RI.

Memperkuat *skeleton*, bergerak bersama melepas jerat adiksi

Tahun 2005 Indonesia menerima kunjungan tim Open Society Institute (OSI) untuk melihat situasi tembakau dan apa yang paling mendesak dan perlu bantuan. Tantangan pada waktu itu adalah prevalensi merokok tinggi dan terus meningkat, bukti keberpihakan pemerintah pada industri rokok, kesadaran masyarakat rendah dan tekanan LSM pengendalian tembakau kurang memadai. Yang segera harus dibangun adalah koalisi masyarakat madani yang terlatih dan mampu, dengan kepemimpinan yang mumpuni. Kunjungan OSI diikuti oleh undangan SEATCA kepada empat LSM Indonesia, yaitu LM3, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan IFPPD untuk ikut Pelatihan Advokasi Pengendalian Tembakau Regional ASEAN di Thailand. Dua hal yang menarik saya adalah model pengorganisasian negara-anggota SEATCA dan teknik advokasi “*9 Advocacy Steps*”. Keduanya menginspirasi saya untuk mengujinya di Indonesia.

Sepulangnya dari pelatihan regional, Ketua IAKMI meminta saya hijrah dari LM3 dan membentuk POKJA Pengendalian Tembakau di bawah organisasi IAKMI. Dukungan dana OSI yang tidak besar selama 2006-2007 saya gunakan untuk uji coba pengembangan jaringan pengendalian tembakau dalam satu paket dengan *capacity building*. Diikuti oleh 14 organisasi dan difasilitasi oleh tim SEATCA regional pada akhir pelatihan, peserta dibagi dalam kelompok berdasarkan pilihan topik kebijakan dan diberikan sedikit dana untuk latihan implementasi teori. Peserta dari YKI, YJI, dan Muhammadiyah memilih topik PHW (*pictorial health warning* - peringatan kesehatan bergambar). Topik ini selanjutnya dikembangkan oleh Pokja IAKMI dengan dukungan SEATCA. Diawali dengan undangan lokakarya PHW di Hanoi Vietnam kepada IAKMI, YKI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Pusat Promosi Kesehatan dukungan selanjutnya adalah survei preferensi masyarakat bekerjasama dengan PPK UI.

Uji coba kedua adalah penggunaan *9 advocacy steps* untuk advokasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Cirebon. Waktu yang sangat singkat telah membuahkan Perwali KTR Kota Cirebon. Pendekatan *9 advocacy steps* yang terbukti efektif, dipresentasikan di 13th WCTOH tahun 2006 di Washington DC. Di kemudian hari, pendekatan ini selalu saya gunakan dan telah menghasilkan PERDA KTR Kota Palembang, PERDA KTR Kota Pontianak, PERMENDIKBUD 64/2015 tentang *KTR di Lingkungan Sekolah* dan PER-

MENKES 50/2016 tentang *Pedoman Penanganan Benturan Kempentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan*.

Uji coba Pengembangan Jaringan terbukti *viable*, tidak saja meningkatkan kemampuan teknis tetapi menumbuhkan kepemimpinan pengendalian tembakau di masing-masing organisasi. Tubagus Haryo Karbiyanto dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) – sekarang Forum Warga Kota Indonesia – sebagai salah satu peserta mengusulkan *Indonesian Tobacco Control Network (ITCN)* sebagai nama jaringan tersebut.

Keberhasilan uji coba jaringan dikembangkan lebih lanjut oleh Pokja IAKMI dengan dana bantuan Bloomberg Initiatives (2007-2009) membentuk *Tobacco Control Support Center (TCSC)*. Tujuannya *membangun infrastruktur dan meletakkan landasan bagi respon sistematis terhadap epidemi tembakau di Indonesia* melalui 4 komponen utama: mengembangkan jaringan dan membangun kepemimpinan; meningkatkan kapasitas teknis dan advokasi; membangun pusat data dan informasi, dan; melakukan advokasi/ memberikan bantuan teknis.

Jaringan ITCN bukanlah sebuah organisasi; tujuan utamanya adalah memampukan dan menciptakan pemimpin-pemimpin handal di setiap organisasi sesuai minat dan misi organisasinya yang bekerja bersama dalam koalisi. Berawal dari 14 anggota termasuk organisasi anggota KOMNAS PT (d.h KOMNAS PMM) menjadi 34 pada akhir 2009 di mana setiap anggota jaringan wajib mengikuti pelatihan atau orientasi terlebih dulu untuk pembekalan teknis.

Tahun 2009 menandai keluarnya UU No 36/2009 setelah hilangnya pasal 113 tentang sifat adiktif tembakau dikembalikan. Pihak industri masih tak rela dan mengajukan gugatan ke MK. Saya diminta menjadi salah satu Saksi Ahli pemerintah dari perspektif kesehatan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Pak Machfud MD, kita memenangkan kasus gugatan atas pasal 113 UU No 36/2009. Tidak puas dengan kemenangan ini, pasal 114 dan 115 pun mendapatkan gugatan. Selepas penyelesaian gugatan, barulah penyusunan PP bisa dilaksanakan.

Tahun 2010-2014 saya memfokuskan diri untuk menuntaskan PHW sebagai salah satu kebijakan FCTC yang akan masuk dalam RPP (rancangan peraturan pemerintah) yang baru. Saya hijrah ke FKMUI agar lebih intensif bekerja dalam sebuah tim pengembangan

PHW. Melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya RPP tersebut disepakati oleh Panitia Antar-Kementerian kecuali pasal PHW. Luas gambar yang diusulkan adalah 50% persis seperti yang tertera di FCTC tanpa cadangan untuk tawar-menawar. Kementerian Perdagangan tidak setuju PHW dan Kementerian Perindustrian setuju luas 30% sesuai batas minimal FCTC. Sebagai organisasi yang diposisikan keahliannya di bidang *high-level advocacy*, di sinilah Komnas Pengendalian Tembakau berperan menerobos kebuntuan melalui audiensi dengan Presiden SBY, yang memutuskan luas gambar kompromistis



Foto: Komnas Pengendalian Tembakau dan mitra jaringan beraudiensi dengan Wakil Presiden, Boediono.

sebesar 40%. Peran *high level advocacy* Komnas Pengendalian Tembakau ditunjukkan dengan beberapa audiensi yang saya ikuti, a.l ke Presiden SBY, Wapres Boediono, Wapres Jusuf Kala, Menlu Mary Natalegawa, Menperin MS Hidayat dan Airlangga Hartarto, Mendikbud Anies Baswedan, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mensos Agus Gumiwang, Menteri PPPA Yohana, Menko

Kesra Agung Laksono, Ketua DPR RI, beberapa Menkes dan Wamenkes, Kepala BPOM, Kepala BNN, Kantor Staf Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, sampai Menkop dan UKM.

Lebih lanjut, gangguan industri rokok merupakan sebab utama kegagalan pengendalian tembakau, termasuk di Indonesia. Pasal 5.3 FCTC menegaskan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan kebijakan kesehatan masyarakat terkait pengendalian tembakau terhadap kepentingan komersial industri rokok. *Tobacco Industry Denormalization* (TID) pun menjadi kegiatan utama saya selama 2015 – 2018, kecuali melalui upaya pengenalan konsep di berbagai forum juga peningkatan kapasitas Pengurus Daerah IAKMI dalam beberapa angkatan. Kegiatan TID ditingkatkan selama tahun 2019-2022 dengan pemantauan perilaku industri dan respon pemerintah secara berkala, memberikan skor pada indikator gangguan, dan mengukur indeks gangguan industri rokok (*Tobacco Industry Interference Index/TII*). TII Index Indonesia adalah yang tertinggi dan menetap tinggi semenjak tahun 2015, mengindikasikan keberpihakan pemerintah kepada industri lebih besar daripada kesehatan masyarakat. Menyikapi *mandek*-nya Revisi PP 109/2012, Kemenko PMK



Foto: Peluncuran penerapan gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok, 2014.

bekerjasama dengan Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan Rakor Teknis lintas kementerian pada akhir 2021 untuk mencari solusi. Saya menawarkan upaya terobosan dengan memfungsikan peraturan kementerian non-kesehatan yang memiliki isu yang sama, di antaranya adalah larangan iklan/promosi tembakau termasuk media *online*, larangan

penjualan batangan, dan pengaturan rokok elektronik. Komnas Pengendalian Tembakau mengkoordinir tindak lanjutnya dengan LSM dan sektor terkait.

Derap langkah gerakan moral pengendalian tembakau saat ini telah semakin berkembang. Kunci keberhasilannya terletak pada kemauan politik, utamanya dari pimpinan tertinggi negara. Pernyataan Prof. Emil Salim di pertemuan audiensi dengan KSP Teten Masduki sangatlah tepat; bahwa *hanya dibutuhkan satu kata “setuju-laksanakan” dari Presiden saja, maka semua unsur akan ikut. Akankah kita tetap mengarahkan busur kita lurus pada sasaran ini?*

16

Kisah Para Pejuang

BUKAN SEMBARANG KURIR

Oleh: Zaenal Arifin

Tim Pendukung dan Kurir Komnas Pengendalian Tembakau



Pekerjaan saya memang kelihatannya “begitu *doang*,” tapi sebenarnya tidak semudah itu juga. Banyak tantangan dan halangan yang saya alami selama menjadi kurir untuk Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT). Apapun itu, pengalamannya selalu seru!

Saya, Zaenal Arifin, sudah lima tahun bertugas menjadi kurir di Komnas PT. Kalau sedang tidak ada pekerjaan antar-mengantar, saya bantu membereskan ruangan atau menyiapkan rapat. Tapi, urusan kurir tetap nomor satu. Walaupun terkadang harus bolak-balik karena ternyata surat yang dibutuhkan belum ditandatangani atau apa, tetap saya antar karena surat-surat penting itu harus segera sampai ke tujuan. Kalau ditanya *capek* atau *nggak*, ya, pasti *capek* kalau harus bolak-balik. Tapi memang sudah risiko sebagai kurir. Harus siap *capek* dan pantang menyerah.

Saya sendiri merasa senang karena pekerjaan ini membuat saya bisa keliling kota Jakarta dan sekitarnya. Padahal, dulu, waktu masih jadi *office boy* di daerah Kuningan, saya cuma hafal jalanan sekitar situ saja, dari Kuningan ke Menteng. Belum tahu daerah Jakarta yang lebih luas lagi, apalagi sampai ke Jakarta Utara dan Barat, atau sampai Bintaro dan Bekasi.

Saya ingat, waktu mengantar surat pertama kali itu saya masih buta jalanan. Berkali-kali saya harus tanya sana-sini supaya dapat alamat yang tepat. Untungnya saya tidak malu bertanya sama orang-orang di jalan. Ya, saya pikir, daripada tersasar dan surat tidak sampai, mending bertanya, *kan?*

Kurir itu menurut saya salah satu pekerjaan yang taruhannya nyawa. *Kok*, begitu? Karena selain mengarungi jalanan Jakarta itu perlu kesabaran luar biasa, kurir juga harus mengerti kemampuannya sejauh mana. Kalau sudah mengantuk, jangan memaksakan diri. Berhenti dulu di pinggir, istirahat sambil minum kopi atau teh. Sebentar saja, sampai *nggak* terasa *ngantuk* lagi, baru lanjutkan perjalanan.

Tanggung Jawab Penuh

Bekerja di Komnas PT ini serunya adalah saya jadi bisa mengantarkan surat ke orang-orang penting atau ke bagian penting di pemerintahan. Makanya, saya benar-benar harus menjaga surat-surat ini. Jangan sampai rusak, apalagi hilang. Kalau cuaca terik, saya justru tidak apa-apa. Yang bikin khawatir adalah kalau cuacanya tidak menentu, misalnya, waktu berangkat dari kantor cuaca panas terik lalu di tengah jalan tiba-tiba hujan. Khawatir surat-suratnya basah atau rusak sebelum sampai ke penerimanya. Untungnya, untuk mencegah surat-surat itu kehujanan, saya sudah menyiapkan tas anti air yang kemudian saya lapiasi lagi dengan tas lain supaya aman. Kalau dipikir-pikir, ternyata tanggung jawab kurir itu cukup besar juga, ya.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya diminta mengantar surat untuk Presiden dan Wakil Presiden. Ini istimewa sekali buat saya karena saya tahu tidak sembarangan orang boleh masuk ke Istana Negara. Sebelum masuk, saya harus melakukan pendaftaran, lapor ke penjaganya, kasih *ID card*, ditanya-tanya mau ketemu siapa dan apa keperluannya. Walaupun agak *belibet*, saya *enjoy* saja. Untungnya sampai saat ini, saya tidak pernah diusir atau ditolak saat mengirim surat. Paling sering ditanya sama penjaga atau satpam: “Komnas PT itu apa?” karena mereka cuma kenal Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Jadi, selain mengantar surat, saya juga harus bisa menjelaskan sedikit tentang Komnas PT.

Pengalaman lain yang juga seru adalah ketika saya mau mengantar surat ke pengurus Komnas Pengendalian Tembakau yang ada di daerah Bekasi. Saya antar langsung ke

rumahnya. Eh, ternyata, beliau adalah mantan artis yang dulu main sinetron *Jin dan Jun*. Saya tidak menyangka beliau di rumahnya membuka praktek berhenti merokok. Baik dan ramah sekali orangnya, saya disuruh mampir dulu untuk minum kopi dan ngobrol. Sayangnya, waktu itu saya masih banyak pekerjaan, jadi tidak sempat mampir.



Foto: Perjalanan mengantarkan dokumen.

Belajar Sambil Berjalan

Selain yang seru-seru, ada juga pengalaman yang membuat saya belajar banyak. Misalnya, soal salah kirim: harusnya ke Ketua IDI, saya malah antar ke Ketua IDAI. Begitu juga sebaliknya. Untung suratnya masih dipegang satpam, jadi masih bisa ditukar dengan mudah.

Tapi kalau rusak, sih, belum pernah. Saya jaga baik-baik suratnya, saya bertanggung jawab penuh. Supaya ada cadangan, saya selalu bawa *file* digitalnya. Jadi kalau pun rusak, bisa saya *print* lagi di tengah jalan, tapi juga *nggak* lupa lapor tentang surat yang rusak tadi ke pengirimnya.

Kalau ditanya pernah antar surat ke mana saja, *wah*, itu sudah tidak terhitung. Yang pasti, paling berkesan itu selain mengirim ke Presiden dan Wakil Presiden adalah mengirim surat ke gedung DPR dan ke gedung kementerian, i saya jadi tahu cara masuk dan cara keluarnya. Pokoknya, jangan malu bertanya kepada siapapun, misalnya ke satpam atau resepsionis. Yang penting surat itu aman, nyaman, dan sampai dalam keadaan baik.

Bicara soal pengalaman buruk, pasti ada. Pernah beberapa kali terjadi. Misalnya, yang paling terasa pahit itu kalau harus berurusan dengan polisi. Pernah motor saya ditarik karena salah putar arah di depan petugas polisi yang *ngumpet*. Padahal, semua kelengkapan saya bawa: helm, SIM, spion juga lengkap. Tapi tetap saja motor ditarik.

Pernah juga saya lagi mengantarkan ke daerah Jakarta Pusat. Pas jam 12 siang, saya

minggir sebentar untuk makan. *Eeh*, ternyata ada penderekan motor dan mobil yang parkir sembarangan. Padahal *nggak* ada rambu peringatannya. Akhirnya saya harus ambil motor ke Dishub Senen, bersama orang-orang yang kendaraannya diderek.

Dukungan dari Lingkungan itu Penting

Untungnya, pekerjaan saya ini cukup didukung oleh keluarga dan lingkungan pertemanan. Kalau saya kasih tahu soal bahaya merokok, sebagian besar responnya baik. Mereka jadi paham juga kalau merokok bukan cuma bikin penyakit buat yang merokok, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya. Jadi, sekarang kalau sama teman-teman, yang mau merokok biasanya keluar atau jauh-jauh dari kami yang tidak merokok. Walaupun, ya, tetap ada juga yang nyinyir, katanya kalau tidak merokok itu *nggak* keren dan bukan laki-laki. Ada juga yang bilang kalau rokok itu bisa menghilangkan pusing atau stress. Mungkin karena sudah kecanduan, ya, jadinya mereka bilang begitu. Saya sendiri tidak merokok.

Sebenarnya gampang-gampang sulit, ya, jadi kurir itu. Kalau *ngantuk* sedikit, risikonya nyawa. Kalau alamatnya kurang lengkap atau orangnya tidak bisa dihubungi, suratnya jadi terlambat sampainya. Sedihnya adalah kalau sudah buru-buru, suratnya sudah ditunggu, *eeh*, tiba-tiba ban bocor atau bensin habis di tengah jalan. Walaupun pasti ada kesalnya, tapi saya coba tetap bawa *happy* dan *enjoy* saja. Namanya juga bekerja, pasti ada kesulitannya.

Bekerja di Komnas PT itu menyenangkan karena saya juga dilibatkan dalam berbagai acara atau kampanye. Yang paling berkesan adalah acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) di Kota Tua, Jakarta Barat, dengan judul “Rokok Harus Mahal.” Seru dan berkesan karena banyak tokoh-tokoh yang datang, para ketua umum organisasi juga datang dan, antusias mengikuti rangkaian acara walaupun cuaca saat itu sangat panas terik.

Dalam rangka ulang tahun Komnas PT, harapan saya adalah semoga bisa tetap maju terus pantang menyerah. Tetap harus melindungi bangsa ini dari bahayanya asap rokok terutama bagi anak-anak kecil. Pokoknya, setia terus melindungi bangsa, di manapun berada harus tetap semangat melindungi Indonesia Raya ini.



PENGHORMATAN

PENGHORMATAN

Kartono Mohamad

1939-2020

YANG TERHORMAT, DR. KARTONO MOHAMAD



Orang banyak mungkin mengenal dr. Kartono Mohamad sebagai mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia atau anggota MPR. Banyak juga yang mengenal almarhum dari tulisan-tulisannya di berbagai media yang menyoroti berbagai isu kesehatan masyarakat, termasuk soal pengendalian tembakau. Sepak-terjangnya dalam advokasi dan publikasi bersama Komnas Pengendalian Tembakau telah membantu kemajuan perjuangan pengendalian tembakau di Indonesia. Maka izinkanlah kami mengumpulkan kisah dan kesan dari keluarga dan rekan kerja beliau, sebagai penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam.

Teguh Pada Prinsip, Idealis Menjalani Hidup

Nina Windu Kirana (anak)

Bapak saya pada dasarnya sangat memperhatikan masalah kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Hal ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan beliau yang banyak mengangkat permasalahan kesehatan yang menyangkut masyarakat miskin. Beliau tidak hanya memandang dari sisi kedokteran, tapi juga dari sisi hukum dan kemasyarakatan.

Beliau sangat aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Maka saya tidak heran melihat beliau bersemangat ketika bergabung dalam perjuangan Komnas PT. Salah satu yang menjadi perhatian Bapak soal rokok adalah kurangnya perhatian pemerintah atas dampak buruk dari tembakau bagi kesehatan masyarakat, terutama kalangan muda. Pemerintah berargumentasi bahwa industri rokok memberikan pendapatan cukai yang tinggi bagi negara, namun tidak mau melihat bahwa biaya kesehatan yang timbul akibat dampak merokok jauh lebih tinggi.

Didorong akan keprihatinannya atas masalah-masalah tersebut, Bapak bersama rekan-rekan di Komnas PT berjuang agar tembakau dapat dimasukkan sebagai kategori zat adiktif dan diatur secara legal oleh Undang-Undang. Hal ini penting dilakukan agar penggunaan, pendistribusian, maupun pengiklannya dapat dikendalikan demi kepentingan kesehatan masyarakat luas.



Foto: Poster tolak RUU Pertembakauan yang diunggah di sosial media *instagram* oleh sejumlah *influencer* dan mendapat respon positif dari sejumlah *netizen*.

Salah satu peran terbesar Bapak yang kami ingat adalah ketika beliau berjuang agar tembakau dikategorikan sebagai zat adiktif dalam UU Kesehatan, namun entah bagaimana ujungnya ayat yang mengatur pengamanan zat adiktif tersebut hilang dari UU yang disahkan. Padahal ayat ini sangat penting dituangkan di UU agar menjadi jangkar untuk membuat berbagai pengaturan terkait produk-produk rokok. Berkat pengawalan dan perjuangan beliau bersama rekan-rekan Komnas PT, ayat tersebut bisa dikembalikan ke *draft* asalnya dan sampai sekarang masih tercantum di UU Kesehatan yang baru. Salah satu aturan yang berkembang dari ayat tersebut adalah aturan dalam beriklan dan peringatan bahaya merokok yang harus dicantumkan di kemasan rokok. Pengendalian-pengendalian tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok di Indonesia.

Salah satu hal yang juga tak bisa kami lupakan adalah Bapak tidak hanya mengadvokasi soal bahaya merokok ke para pengambil keputusan, tapi juga ke semua orang di lingkungannya, baik keluarga maupun rekan-rekannya. Semua sejalan dengan tulisan-tulisan beliau di media massa yang tidak bosan-bosannya memberikan informasi terkait permasalahan rokok dan bahaya tembakau bagi kesehatan masyarakat.

Bagi saya, Bapak adalah sosok yang sangat senang dan aktif berorganisasi sejak mahasiswa. Beliau juga sangat suka membaca buku dan menulis. Setiap lewat toko buku beliau pasti mampir dan koleksi bukunya di rumah sangat banyak. Selain tulisan-tulisannya, mungkin selera humornya paling dikenang orang banyak. Tapi bagi saya, Bapak adalah sosok yang selalu teguh memegang prinsip dan idealis dalam menjalani hidup.

Perjuangan beliau bersama rekan-rekan di Komnas PT belum selesai, apalagi jumlah perokok anak terus meningkat. Semoga semua yang telah diperjuangkan Bapak dan rekan-rekan di Komnas PT bisa berguna bagi masa depan masyarakat Indonesia dan terus dijalankan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas dari bahaya tembakau.

Tidak Bicara Yang Tidak Perlu

Widyastuti Soerojo

Saya mengenal Pak Kartono Mohamad sejak di Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3) saat beliau masih menjadi Ketua IDI. Ketika Pokja IAKMI mengajukan proposal ke Bloomberg, Pak KM menghampiri saya sesuai menghadiri salah satu rapat di Kemenkes. Kami berjalan bersama, lalu di depan lift beliau bilang begini: “Saya ikut kamu saja, ya, kalau proyekmu jadi.”

Selama bekerja sama, saya rasa yang paling menjadi perhatian Pak KM soal rokok adalah pengabaian pemerintah terhadap bahaya rokok di Indonesia. Hal ini beliau sampaikan setiap kali bercerita tentang fakta yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada industri rokok.

Menurut saya, peran terbesar Pak KM dalam pergerakan *tobacco control* di Indonesia adalah kritik sosialnya di bidang pengendalian tembakau yang ditulis secara terbuka di media massa, dilandasi dengan pengetahuan yang luas tentang situasi atau fakta yang sama di negara lain lalu dibandingkan dengan keadaan di Indonesia. Hal ini membuat orang jadi bisa bercermin.

Pak KM adalah orang yang sangat vokal, tapi tidak banyak bicara kalau tidak perlu. Beliau sangat suka membaca dan memiliki pengamatan yang cermat, tapi *sense of humor*-nya sangat tinggi. Terkadang beliau mengatakan sesuatu yang “lucu” tanpa perubahan ekspresi, membuat kami seakan terjebak dan bertanya-tanya “Bapak ini lagi bicara serius atau bercanda, ya?”



Foto: Audiensi dengan Ketua MPR, Zulkifli Hasan pada tahun 2015.
sumber: www.mpr.go.id

Pemikir Makro yang Vokal dan Sayang Cucu

Kiki Soewarso

Menurut saya, secara umum Pak Kartono itu seorang dokter yang jiwa seninya tinggi, khususnya di bidang literasi. Beliau sangat pandai mencari sudut pandang yang pas dengan situasi pada saat tertentu, lalu diturunkan dalam bentuk tulisan atau opini editorial dengan bahasa yang mudah

dipahami masyarakat. Misalnya, ketika memberi informasi tentang situasi pengendalian tembakau di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak Kartono tidak perlu menjabarkan banyak data. Beliau hanya mengambil substansinya, lalu menuliskannya sedemikian rupa sehingga mudah dipahami publik. Itulah kelebihan Pak Kartono yang sampai saat ini belum tergantikan.

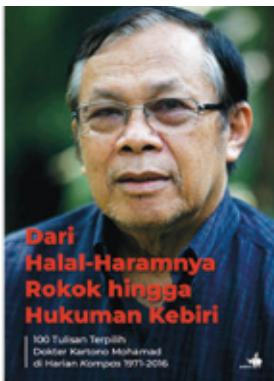


Foto: Buku kumpulan tulisan karya dr. Kartono Mohamad.

Pada awal tahun 2000-an belum banyak orang yang menulis mengenai pengendalian tembakau di Indonesia. Pak Kartono adalah salah satu tokoh yang ikut menyebarkan informasi supaya masyarakat menjadi lebih paham terhadap isu tersebut. Hasilnya, kami mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat secara umum, akademisi, maupun dari lingkungan media.

Waktu muncul kasus ayat yang hilang, memang yang menemukan pertama kali adalah teman-teman di DPR, antara lain Pak Budi Rohani. Namun, saat itu kami tidak punya kekuatan untuk mengangkat isu ini ke taraf nasional supaya mendapat perhatian banyak orang. Pak Kartono pada saat itu mempertanyakan begini: bagaimana bisa, sebuah ayat yang sudah disahkan, hilang dalam perjalanan?

Semua pemerhati pengendalian tembakau tentunya berupaya untuk membongkar kasus ini dengan membawanya ke pengadilan. Namun, teman-teman *lawyer* yang bekerja *pro bono* untuk mendukung gerakan kita tidak bisa membawa isu ini ke pengadilan kalau tidak ada pelapor. Di sini lah Pak Kartono maju menjadi pelapor dan saksi tanpa keberatan sedikit pun.

Mungkin kalau mau dikategorikan, Pak Kartono ini bisa disebut sebagai pemikir makro. Jadi, beliau mampu melihat hubungan dari beberapa masalah dan isu, lalu menggabungkannya supaya advokasi yang dilakukan juga semakin meyakinkan karena menyangkut beberapa bidang sekaligus.

Selain sebagai pemerhati dan pejuang kesehatan masyarakat, saya melihat Pak Kartono sebagai seorang kakek yang sangat dekat dan sangat sayang pada cucunya. Mungkin inilah salah satu alasan beliau begitu vokal menyampaikan aspirasi kesehatan masyarakat, supaya kelak cucu-cucunya tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat.

Mahaguru Kesehatan Masyarakat

Itsnaeni Abbas

Saya pertama kali kenal Pak KM itu tahun 2004, tapi belum terjun dalam isu pengendalian tembakau. Saat itu, kami mendampingi amandemen RUU Kesehatan dalam kapasitas beliau sebagai dokter. Barulah pada tahun 2007 kami bersama Ibu Tuti dan Ibu Mia mulai melakukan advokasi ke DPR untuk masalah-masalah rokok.



Foto: Dalam sebuah kesempatan, berfoto bersama Prof Emil Salim dan Pak Kartono Mohamad setelah rapat bersama.

Beliau sangat peduli pada kebijakan terhadap pengendalian tembakau yang masih sangat rendah di negara ini. Padahal sudah jelas generasi muda kita menghadapi bahaya karena tidak ada perlindungan negara dari gempuran produk tembakau. Maka Pak Kartono selalu melakukan advokasi dengan menghubungkan rokok dengan masalah kemiskinan, stunting, gizi, dan banyak lagi. Beliau sangat mahir melihat masalah rokok ini dari segala sisi dan secara komprehensif.

Ada kenangan yang tidak akan saya lupakan tentang Pak Kartono, yaitu saat saya mendampingi beliau melakukan hearing dengan DPR. Saat itu saya bisikkan ke Pak Kartono bahwa ada mata-mata industri yang hadir di acara tersebut. Gawatnya lagi, orang ini berjalan mendekati Pak Kartono. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi Pak Kartono langsung mengatakan kepada orang itu: “saya tahu kamu orang industri.”

Memang seperti itulah Pak Kartono, bicara apa adanya, termasuk juga yang ia tuangkan lewat tulisan. Menurut saya, Pak KM adalah satu-satunya penulis opini di koran

yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai orang kesehatan. Jadi tidak atas nama lembaga atau organisasi, tapi atas nama profesi. Beliau itu selalu punya data yang kadang tidak disadari orang lain. Apa yang disampaikan oleh Pak Kartono dalam tulisan-tulisannya merupakan hal-hal yang benar-benar harus diketahui oleh para pembuat kebijakan. Tidak salah kalau beliau dianggap sebagai salah satu motor penggerak kegiatan pengendalian tembakau di Indonesia yang bisa menyampaikan pandangannya secara jelas, baik kepada anak muda maupun kepada golongan senior. Bagi saya, Pak KM adalah maha guru dalam hal *public health*.



Foto: Sesekali menghabiskan waktu di luar pekerjaan, kami mengkrabkan diri di sela-sela banyak diskusi.

Akan tetapi, kehebatannya tidak membuat beliau menjadi orang yang kaku. Dalam beradvokasi pun Pak Kartono sering melontarkan ujaran-ujaran yang mencairkan suasana. Begitu pula dalam bekerja dengan rekan-rekannya, Pak KM tidak pernah berjarak dan tidak membuat batasan, sehingga kami tidak perlu merasa sungkan. Selama saya bekerja bersama Pak Kartono, saya selalu mendapat ilmu baru. Beliau adalah paket lengkap: seorang teman, guru, sahabat, dan orang tua.



PENGHORMATAN

Arifin Panigoro

1945-2022



PERJUANGAN PENUH KENANGAN

Oleh: Rasis Arifin Panigoro



Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi almarhum Bapak Arifin Panigoro adalah orang yang sangat peduli dengan isu pengendalian tembakau. Ia tidak mau anak-anak dan generasi muda tercemar rokok, maka ia sangat mendukung gerakan yang dilakukan Komnas Pengendalian Tembakau.

Tidak Pernah Setengah-Setengah

Awal keterlibatan Bapak Arifin dalam perjuangan ini adalah ketika saya memintanya untuk membantu Komnas PT. Posisi saya waktu itu adalah sebagai pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) yang mewakili PPTI di Komnas Pengendalian Tembakau tahun 2002.

Bapak selalu mendukung apa yang saya lakukan. Pun ketika pada tahun 2005 saya minta tolong Bapak untuk membantu Komnas dengan caranya sendiri. Saya tahu Bapak selalu menjaga relasi dengan para petinggi di pemerintahan, misalnya dengan Menteri Keuangan atau pemangku jabatan lain yang bisa memuluskan jalannya advokasi dan perjuangan Komnas.

“

Masih banyak cita-cita yang ingin dicapai Bapak,
tapi ternyata waktunya di dunia sudah selesai.

“



Foto: Pertemuan dengan Mark Hurley
di Griya Jenggala.

Bapak selalu berkomitmen tinggi jika sudah masuk ke dalam suatu gerakan atau wadah, tidak pernah setengah-setengah dengan apapun yang dikerjakannya di Komnas. Kenapa? Ya, kembali lagi karena beliau sangat *concern* dengan masa depan anak-anak dan tidak mau mereka menjadi *lost generation* kalau tidak diselamatkan dari rokok.

Peran Pak Arifin Panigoro di Komnas PT ini adalah sebagai salah satu penasihat atau *advisor*, seperti Pak Emil Salim dan Ibu dr. Nafsiah Mboi. Banyak gagasan yang beliau sampaikan di rapat-rapat besar yang kemudian dieksekusi oleh rekan-rekan di Komnas.

Peran Arifin Panigoro dalam Penyelenggaraan The 12th APACT

Pak Arifin mulai terlibat dan ikut konferensi-konferensi pengendalian tembakau, seperti yang diadakan di Afrika Selatan dan China. Nah, ketika konferensi di China itu lah Bapak Arifin disemangati oleh dr. Soewarto Kosen untuk membawa konferensi tersebut ke Indonesia. Pihak pengurus komite internasional dari konferensi itu juga meminta Bapak untuk mengadakan konferensi berikutnya di Bali, Indonesia. Saat itu Bapak menyanggupi, walaupun belum terbayang sebanyak apa halangan dan tantangannya.

Dengan memanfaatkan koneksi dan relasinya, baik di pemerintah maupun swasta, Bapak akhirnya bisa meyakinkan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi untuk menjadi tuan rumah Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT). Tentunya, untuk menyelenggarakan konferensi sebesar ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, yang kemudian dijembatani oleh Bapak Arifin.



Foto: Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) ke-12 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2018.

Selain itu, saya rasa kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam menyelenggarakan perhelatan sebesar ini tidak terlepas dari sisi finansial. Kebetulan Bapak Arifin terjun langsung mengajak rekan-rekannya yang juga concern masalah rokok untuk bersama-sama turut membiayai konferensi ini.

Akhirnya, The 12th APACT sukses dilangsungkan di Bali pada tahun 2018, padahal banyak pihak yang menyangsikan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah karena kita adalah salah satu negara yang tidak menandatangani FCTC. Namun, ternyata, APACT berjalan dengan lancar dan membuahkan banyak manfaat bagi perjuangan pengendalian tembakau di Indonesia.

Perjuangan Terus Berjalan

Kalau mau ditarik ke belakang, keterlibatan Pak Arifin bukan hanya di penyelenggaraan konferensi APACT saja. Pada tahun 2013, Bapak bersama Ibu Itsnaeni Abbas pernah melaporkan badan legislatif ke KPK terkait adanya dugaan suap dalam pembahasan RUU Tembakau. Saat itu saya agak kaget ketika melihat liputannya di media televisi karena Bapak tidak menceritakan soal keterlibatannya dalam hal ini. Begitulah Bapak, kalau sudah terjun, ya, pasti *all out*.

Bukan cuma peduli soal pengendalian tembakau, Bapak Arifin juga sangat mendukung berbagai gerakan yang menyangkut kesehatan dan pendidikan. Kalau ada yang meminta bantuan soal pendidikan dan kesehatan, pasti Bapak bantu. Selain di Komnas PT, Bapak juga menjadi salah satu *advisor* di PPTI dan salah satu pendiri Sentra Laktasi Indonesia yang mengkampanyekan ASI sebagai asupan terbaik untuk bayi. Bapak selalu punya hubungan baik dengan Menteri Kesehatan, siapapun yang menjabat.

Masih banyak cita-cita yang ingin dicapai Bapak, tapi ternyata waktunya di dunia sudah selesai. Saya bersyukur Bapak terlibat di begitu banyak kegiatan dan gerakan positif di berbagai bidang. Salah satu cita-citanya yang belum tercapai adalah peraturan yang lebih ketat dan larangan menyangkut rokok di Indonesia, seperti soal anak-anak yang merokok dan menaikkan angka cukai rokok setinggi mungkin. Begitu pula soal penanganan TBC yang sampai sekarang angkanya masih tinggi, yang pastinya juga berhubungan langsung dengan rokok.

Kalau Bapak masih bersama kita, pasti beliau akan membantu untuk menggolkan Omnibus Law Kesehatan dengan cara berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-temannya yang duduk di DPR. Bapak pasti sangat peduli dan akan mengusahakan semaksimal mungkin karena Omnibus Law Kesehatan ini bisa menjadi *breakthrough* yang kita semua butuhkan dalam pengendalian tembakau.

Teruntuk rekan-rekan di Komnas PT, semoga perjuangan dan perlawanan tidak pernah berhenti, walaupun sekarang kita bergerak tanpa Bapak. Semoga Komnas PT terus berjaya dan apa yang dicita-citakan oleh Pak Arifin bisa tercapai satu saat nanti.

MENJARING IKAN *dengan* JALA BERLUBANG

“Menjaring ikan dengan jala berlubang.” Kira-kira metafora inilah yang kami rasakan dan alami selama mengawal isu pengendalian tembakau. Keinginan dan harapan bisa menjaring ikan-ikan kebijakan yang bernutrisi tinggi untuk diberikan kepada masyarakat agar hidup mereka lebih sehat dan sejahtera bermodal jala yang penuh lubang, kami akui cukup menantang dan melelahkan.

Dalam rangka 25 tahun Komnas Pengendalian Tembakau, melalui buku ini, kami, tim kerja harian Komnas Pengendalian Tembakau, mempersembahkan hadiah 25 Kisah di Balik Perjuangan Komnas Pengendalian Tembakau sebagai dokumentasi perjuangan kita bersama demi memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan nutrisi yang penting untuk hidupnya.

Terima kasih untuk para senior panutan dan rekan-rekan seperjuangan yang telah membagikan kisahnya dalam buku ini, selain sebagai kenang-kenangan atas perjuangan bersama, juga sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua.

ISBN 978-623-09-6215-8



Perjuangan di antara Kata & Gambar

Di tengah gempuran iklan rokok yang begitu masif, Komnas Pengendalian Tembakau meluncurkan iklan-iklan layanan masyarakat baik sebagai penyadaran akan gaya hidup sehat maupun sebagai bagian dari upaya advokasi.

SEBENTAR LAGI ROKOK GANTIKAN POSISI NASI

ILUSTRASI FCTC:

1. Menghentikan iklan dan promosi tembakau yang menyesatkan
2. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan
3. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan
4. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan
5. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan

AMARAN FCTC:

1. Menghentikan iklan dan promosi tembakau yang menyesatkan
2. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan
3. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan
4. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan
5. Menghentikan promosi dan pemasaran produk tembakau yang menyesatkan

FCTC UNTUK INDONESIA
DUKUNG PEMERINTAH AKSES FCTC

#DukungFCTC

SELAMAT! ANDA MELINDUNGI BANDAR PRODUK YANG MENJANJIKAN KEMATIAN

RUU PERTEMBAKAUAN IZIN RESMI MEMENJAJI INDONESIA

#TolakRUUPertembakauan

Anak Indonesia Berhak Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok

Sebanyak 13 juta anak di Indonesia dijamin bakal injak rokok untuk menjadi pemakai.*

#FCTCUNTUKINDONESIA

Bapak Presiden, Lindungi masa depan kami dengan akses FCTC.

MEREKA BUTUH BAHAN POKOK BUKAN ROKOK

Sebanyak 12,4 juta perokok di Indonesia adalah keluarga miskin yang memprioritaskan pengeluaran untuk rokok - terbesar kedua setelah beras.* RUU Pertembakauan mendorong konsumsi rokok. RUU Pertembakauan mendorong peningkatan kemiskinan di Indonesia.

#TolakRUUPertembakauan

INFORMASI LEBIH LANJUT, KUNJUNGI: WWW.KEMPUK.CO

CIGARETTES MAKE YOUR STYLE VANISH IN SMOKE!

STATE YOUR STYLE BY WEARING FASHION MASTERPIECE. NOT WITH A CIGARETTE IN YOUR HAND. THE 4,000 HARMFUL CHEMICALS DO NOT MAKE YOU LOOK FASHIONABLE.

MARKA: PAKSIAN BAKSO

NIKOTIN DAN NARKOBA SAMA-SAMA MEMATIKAN

Konsumsi rokok sebanyak 22,5 DOKU setara dengan 100 mg heroin yang mematikan di Indonesia.*

#FCTCUNTUKINDONESIA

Tentang FCTC, kunjungi: www.kompas.co

RAKYAT INDONESIA BUKAN ASBAK

Rakyat Lapar, Butuh Makan #MBAKOBUKANSEMBAKO

Konsumsi rokok adalah bencana kesehatan masyarakat yang semakin mengancam anak-anak dan nyawa. Menjelajahi perokok anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

FCTC adalah pedoman internasional untuk memajukan Indonesia Sehat dan mencegah kematian dan disabilitas akibat rokok dan paparan asap rokok orang lain.

BAPAK PRESIDEN, SEGERALAH AKSES FCTC

#FCTCUNTUKINDONESIA

Tentang FCTC, kunjungi: www.kompas.co

DEKLARASI Gerakan Dokter MENYELAMATKAN INDONESIA

Epidemi rokok sekarang terjadi di Indonesia. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011, kerjasama WHO dengan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Indonesia menjadi peringkat pertama dari 16 negara dengan tingkat prevalensi perokok aktif tertinggi (67,4 persen laki-laki & 4,5 persen perempuan). Artinya sekitar 36,1 persen atau 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif dan terbesar di negara-negara Asia Tenggara. Genosida pemerasan produk rokok dan lemahnya kebijakan mengakhiri konsumsi rokok di masyarakat terutama generasi muda dan pelajar, terus meningkat. Jumlah perokok piro di Indonesia tertinggi di dunia. Karena tingginya jumlah perokok aktif maka semakin banyak perokok pasif menjadi korban asap rokok tersebut.

Regulasi pengendalian tembakau sudah sangat mendasar. Desakan harus dilakukan seluruh elemen masyarakat. Tenaga profesi dokter merupakan figur pemimpin sejati di bidang kesehatan yang mempunyai peran besar untuk mendorong terwujudnya regulasi tersebut, serta perannya dalam mengkomunikasikan tercapainya bahaya merokok secara benar kepada pembuat kebijakan, pengambil keputusan dan masyarakat pada umumnya. Pengendalian rokok menjadi tanggung jawab profesional seorang dokter, selain menjadi role model juga memiliki kredibilitas dalam menyampaikan opini medis berkaitan dengan tercapainya masyarakat oleh asap rokok yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Untuk itu, kami berkumpul di sini untuk menyatakan visi dan misi dokter dalam isu pengendalian tembakau sebagai berikut:

1. Mengalokasikan kaselitas masyarakat bahwa merokok menyebabkan disfungsi dan menimbulkan bahaya kesehatan.
2. Memasukkan status merokok ke dalam rekam medis.
3. Menyuarakan dan memberikan tekanan perilaku tempo rokok di berbagai kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai media.
4. Melakukan penelitian dan publikasi terkait dengan dampak buruk produk tembakau.
5. Mendesak pemerintah untuk menyediakan bantuan kesehatan merokok sebagai bagian terintegrasi dalam pelayanan kesehatan.
6. Melakukan advokasi di bidang peraturan dan perundangan, baik di tingkat lokal maupun nasional, tentang Pengendalian Tembakau (bahaya rokok).
7. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
8. Mendesak DPR dan Pemerintah memusulkan nikotin dalam tembakau sebagai zat adiktif ke dalam Undang-Undang Narkotika.
9. Mendesak Presiden untuk segera menandatangani RPP tentang Penguatan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Demikian deklarasi Gerakan Dokter Selamatkan Indonesia ini kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia, dengan rahmat Tuhan YME.

Jakarta, 13 Oktober 2012
Deklarasi
Gerakan Dokter Selamatkan Indonesia

(List of signatures follows)

BANGSA PEROKOK, GENERASI PENERUS TERPURUK

Lebih dari 90% Negara di dunia menjadi bagian dari FCTC dan menuliskan komitmennya untuk kesehatan masyarakat Indonesia satu satunya negara di Asia yang menolak akses atau tanda akses FCTC.

FAKTA MEROKOK DI INDONESIA

- 3 dari 5 pelajar terpapar asap rokok di rumah dari di tempat umum
- Rokok membunuh 1 dari 2 perokok
- 100 perokok yang meninggal karena penyakit akibat rokok
- Indonesia diakui sebagai negara "high burden" yang memiliki 229.000 perokok anak dibawah 10 tahun.
- 70% remaja mulai merokok karena masalah sosial yang mempengaruhi.
- Indonesia memiliki jumlah perokok yang melebihi 100 juta perokok aktif.
- Indonesia memiliki jumlah perokok yang melebihi 100 juta perokok aktif.

FCTC adalah solusi dan perlindungan bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

OLAKRAGA 14 KEHARI 14 BAKSI ROKOK

Di seluruh dunia, industri rokok melakukan "CRS washing" dengan mempromosikan berbagai kegiatan CSR yang justru tidak dilakukan agar perokok tetap senang dan produktif yang bertentangan dan merugikan.

Di Indonesia, industri rokok terus menggunakan kegiatan olahraga, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan penjualan rokok. Hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi konsumsi rokok.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok dan pentingnya akses FCTC, Komnas Pengendalian Tembakau akan mengadakan acara olahraga yang bertema "14 Hari 14 Baksi Rokok".

KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN TEMBAKAU
Jl. Terusan Umar Rais, 9 Menteng, Jakarta Pusat 10110
Telepon/Fax: (021) 991 7354
eMail: sekretariat@komnastembaqa.go.id
www.komnastembaqa.go.id

Linimasa 25 Tahun Komnas Pengendalian Tembakau



25 tahun yang lalu, lahir sebuah inisiatif gerakan: perlunya menanggulangi masalah merokok yang tampak semakin tidak terkontrol.

20 organisasi bergabung dalam sebuah organisasi payung: Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok



dr. Merdias Almatzier

Dimulailah gerakan-gerakan berkelanjutan. Diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja lima tahun, kerja advokasi pertama pun telah dimulai.

Dorongan agar pemerintah menandatangani FCTC telah dilakukan, namun kekosongan peraturan harus segera diisi. Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok pun ikut bergerak dalam proses lahirnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Setelah berganti nama menjadi Komite Nasional Pengendalian Tembakau, berbagai aksi kampanye publik dilakukan untuk menggali dukungan dari berbagai pihak; mulai dari kelompok profesi kesehatan, guru, pemuda, selebriti, sampai anggota parlemen dan pejabat pemerintah.

Puncaknya, Komnas Pengendalian Tembakau berhasil membuat peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2008 di Istana Negara yang dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai langkah awal high level lobbying ke istana.



Gaung kampanye bahaya rokok membesar dengan dukungan berbagai pihak. Peringatan-peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diadakan Komnas Pengendalian Tembakau menjadi salah satu kampanye pengendalian tembakau terbesar yang menarik perhatian publik. Setiap tahunnya, penghargaan diberikan kepada pihak-pihak yang memberi dampak pada pengendalian konsumsi rokok. Dorongan kebijakan, salah satunya masih berfokus pada FCTC, yang juga diperkuat dengan iklan layanan masyarakat.

Sampai akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Komnas Pengendalian Tembakau dan rombongan di Istana Negara untuk mendiskusikan peluang Indonesia menandatangani FCTC.

Eksistensi Komnas Pengendalian Tembakau menguat, dukungan berbagai pihak menambah sumber daya untuk berbagai kampanye dan upaya advokasi.

Komnas Pengendalian Tembakau bergerilya menciptakan kantong-kantong champion yang akan bersuara bersama; perempuan, guru, pemuda, korban rokok, kelompok agama, tokoh masyarakat.

Tahun yang berat menerpa Komnas Pengendalian Tembakau dan jaringan pengendalian tembakau dengan 'terjangan' RUU Pertembakauan. Berbagai strategi dilakukan; advokasi di parlemen, konferensi pers, menggali dukungan penolakan dari berbagai kelompok, sampai akhirnya RUU tersebut terhalau.

Kampanye "Rokok Harus Mahal" pun mulai diperdengarkan melalui berbagai cara kreatif, dan kesuksesan menjadi tuan rumah AFACT 12th Bali membawa Komnas Pengendalian Tembakau mampu berperan dalam gerakan pengendalian tembakau di level global.

Pendekatan kampanye Komnas Pengendalian Tembakau semakin populer dan inklusif, kampanye pengendalian tembakau muncul lewat isu anak, olahraga, musik, agama, dst melalui pemberitaan di media arus utama dan penguatan kampanye digital di media sosial. Kerjasama-kerjasama dengan Pemerintah semakin erat untuk memperkuat advokasi terkait nilai-nilai pengendalian tembakau dalam MPOWER.

Ketika pandemi menerpa, langkah perjuangan tak surut. Komnas Pengendalian Tembakau sebagai organisasi pertama yang mengangkat pendekatan hubungan rokok dan Covid-19 melalui konferensi pers, kampanye digital, dan survei. Sederet kegiatan kampanye dan advokasi dilakukan melalui media daring, menjadi bagian dari advokasi untuk revisi PP 109/2012 dan kenaikan cukai, dengan penguatan pesan kunci dan evidence base serta kolaborasi dengan mitra kerja pengendalian tembakau.

Pada 27 Juli 2023, 25 tahun sudah Komnas Pengendalian Tembakau berjuang untuk mendorong perubahan demi Indonesia yang lebih baik.